

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MASA RESES DPRD
KOTA SERANG MASA BHAKTI 2009-2014
TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada
Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

SEPTIAN GESTIARDI

NIM. 6661092196

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
FEBRUARI, 2015**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SEPTIAN GESTIARDI

Nim : 6661092196

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MASA RESES DPRD
KOTA SERANG MASA BHAKTI 2009-2014 TAHUN 2013

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi

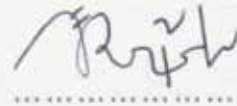
Di Serang, 18 Februari 2015 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Februari 2014

Ketua Penguji:

Arenawati, M.Si

NIP. 197004102006042001



Anggota:

Leo Agustino, Ph.D

NIP. 197408032003121001



Anggota:

Ipah Ema Jumiati, M.Si

NIP. 197501312005012004



Mengetahui,

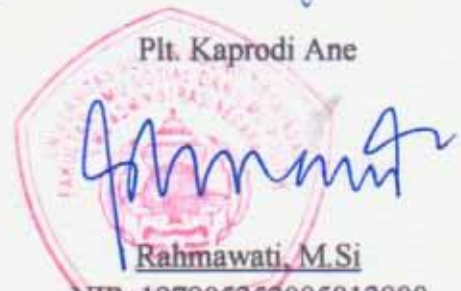
Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP. 197108242000511002

Plt. Kaprodi Ane



Rahmawati, M.Si

NIP. 197905252005012000

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Gestiardi
NIM : 6661092196
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 29 September 1991
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MASA RESES DPRD KOTA SERANG PERIODE 2009-2014 TAHUN 2013" ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, 18 Februari 2015



Septian Gestiardi

ABSTRAK

Septian Gestiaradi. 6661092196. Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Ipah Ema Jumiati, M.Si. Dosen Pembimbing II: Listyaningsih, M.Si

Kata Kunci: Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses

Latar belakang penelitian ini adalah pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 Tahun 2013 belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Kota Serang Periode 2009-2014 Tahun 2013. Kriteria efektivitas meliputi: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket. Populasi penelitian ini adalah seluruh jumlah pemilih tetap di Kota Serang yang terdiri dari 5 (lima) dapil yang berjumlah 454.774 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional area sampling* dan dengan rumus Slovin diperoleh sampel berjumlah 100 responden. Teknik pengolahan data menggunakan uji t. Tempat dan waktu penelitian di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan: diketahui nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($26,28 < 2,035$), maka hipotesis yang diajukan adalah efektivitas pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang $\leq 65\%$ dari kriteria yang diharapkan dapat diterima. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 belum efektif karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat kegiatan reses.

ABSTRACT

Septian Gestardi. 6661092196. Effectiveness of Serang City Council Recess Period 2009-2014 in 2013. Public Administration Departement. Social and Political Science Faculty. Supervisor I: Ipah Ema Jumiati, M.Si. Supervisor II: Listyaningsih, M.Si

Keywords: Effectiveness of Recess

The background of this research is the implementation recess Serang City Council's term in 2013 has not been implemented properly. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Implementation Recess Serang City Period 2009-2014 in 2013. Effectiveness criteria include: clarity of purpose and strategy, process analysis and formulation, planning, programming, availability of infrastructure, monitoring and control systems that are educational. The method used is quantitative approach to data collection through questionnaires. The population of this study is the whole number of voters in the city of Serang which consists of 5 (five) dapil totaling 454 774 people. The sampling technique using proportional sampling area and the Slovin formula obtained sample of 100 respondents. Data processing techniques using the t test. The place and time of the study in Serang. The results showed: unknown t_{count} greater than t_{table} ($26.28 < 2.035$), the proposed hypothesis is the effectiveness of the implementation of the recess Serang City Council ≤ 65 % of the criteria are expected to be received. Thus, the effectiveness of the implementation of the recess legislators attacked the service period 2009-2014 in 2014 has not been effective because of the lack of dissemination to the public of the benefits of recess activity.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013”.

Dengan selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung penulis. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Spto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwianna M, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ismanto, S.Sos., MM, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Plt. Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Ipah Ema Jumiati, M.Si., Plt Sekretaris Jurusan Administrasi Negara dan sekaligus Pembimbing I yang membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan teliti dan sabar dari awal hingga akhir.
8. Listyaningsih, M.Si., Pembimbing II yang membantu dan memberikan masukan yang berarti bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Anggota DPRD Kota Serang yang telah membantu serta memberikan data untuk pengerjaan dan kelengkapan skripsi ini.
10. Alm. Nardi dan Sawitem dalam keseharian saya memanggilnya papah dan mamah yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi penulis untuk menempuh gelar strata 1. Mohon maaf apabila selama ini belum bisa memberikan yang terbaik dan belum bisa membalas segala kebaikan kalian selama ini dan harapan papah yang belum bisa saya realisasikan untuk menjadi sarjana saat beliau masih hidup.
11. Mas Tri, Mas Andi, Mas Heri, dan terutama Mba Titin yang telah memberikan bantuan materi dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
12. Monika Aprilianingsih yang tidak pernah berhenti memberi dukungan.
13. Aldi dan Imat atas kebersamaan selama beberapa tahun ini bukan hanya sahabat tetapi kalian saudara.
14. Dace, ova, Putri, Nining, Hijri dan senior Ilmu Administrasi Negara yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan.

15. Teman-teman *Civil Society* dan Teman-Teman senasib seperjuangan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kalian berikan selama ini dan diskusi-diskusi yang bermanfaat tentunya.
16. Kawan-kawan HIMANE 2011 Kabinet SENI yang mengajarkan apa itu arti organisasi dan merubah saya lebih baik dan UKM Jurnalistik Untirta yang menjadi rumah kedua saya di kampus Untirta.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya sehingga penulis dengan rendah hati menerima masukan dari semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Serang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Batasan Masalah.....	17
1.4 Rumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian.....	18
1.6 Manfaat Penelitian.....	18
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.6.2 Manfaat Praktis	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	19

BAB II	DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
2.1	Deskripsi Teori	21
2.1.1	Pengertian Teori	21
2.1.2	Teori Efektivitas	23
2.1.3	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35
2.1.4	Masa Reses	44
2.2	Kerangka Berpikir	46
2.3	Hipotesis Penelitian	50
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Metode Penelitian	51
3.2	Instrumen Penelitian	52
3.3	Teknik Pengumpulan Data	56
3.4	Populasi dan Sampel	56
3.4.1	Populasi	56
3.4.2	Sampel	57
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	60
3.5.1	Uji Validitas	62
3.5.2	Uji Reliabilitas	63
3.5.3	Uji t-test (Uji Hipotesis)	64
3.6	Tempat dan Waktu Penelitian	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	66

4.1.1	Deskripsi Wilayah Kota Serang	66
4.1.2	Sejarah DPRD Kota Serang.....	69
4.2	Karakteristik Responden	87
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	87
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	88
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	88
4.3	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	89
4.3.1	Uji Validitas.....	89
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	91
4.4	Deskripsi Hasil Penelitian	91
4.5	Pengujian Hipotesis	130
4.6	Pembahasan	132
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	141
5.2	Saran	142
DAFTAR PUSTAKA		143
 LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahun Sidang DPRD Kota Serang	11
Tabel 1.2	Daftar Tempat yang Dikunjungi Dalam Kegiatan Reses Tahun 2013.....	15
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas Organisasi Menurut Campbell.....	26
Tabel 3.1	Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	53
Tabel 3.2	Skor Item-item Instrumen	55
Tabel 3.3	Jumlah Pemilihan Tetap Kota Serang	57
Tabel 3.4	Perhitungan Sampel.....	59
Tabel 3.5	Waktu Penelitian	65
Tabel 4.1	Daftar Anggota Dewan Komisi I Masa Bakti 2009-2014.....	73
Tabel 4.2	Daftar Anggota Dewan Komisi II Masa Bakti 2009-2014	74
Tabel 4.3	Daftar Anggota Dewan Komisi III Masa Bakti 2009-2014	74
Tabel 4.4	Daftar Anggota Dewan Komisi IV Masa Bakti 2009-2014.....	75
Tabel 4.5	Badan Anggaran DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014.....	76
Tabel 4.6	Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014....	77
Tabel 4.7	Badan Legislatif DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014	78
Tabel 4.8	Badan Kehormatan DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014.....	78
Tabel 4.9	Daftar Anggota Dewan Komisi I Masa Bakti 2009-2014.....	79
Tabel 4.10	Daftar Anggota Dewan Komisi II Masa Bakti 2009-2014	80
Tabel 4.11	Daftar Anggota Dewan Komisi III Masa Bakti 2009-2014	81
Tabel 4.12	Daftar Anggota Dewan Komisi IV Masa Bakti 2009-2014.....	81

Tabel 4.13	Badan Anggaran DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014.....	82
Tabel 4.14	Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014....	83
Tabel 4.15	Badan Legislatif DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014	84
Tabel 4.16	Badan Kehormatan DPRD Kota Serang Masa Bakti 2009-2014.....	84
Tabel 4.17	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	87
Tabel 4.18	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	88
Tabel 4.19	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	89
Tabel 4.20	Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang	89
Tabel 4.21	Uji Reliabilitas Instrumen Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang	91
Tabel 4.22	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Memberikan Manfaat.....	92
Tabel 4.23	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Kegiatan Reses Menyerap dan Menghimpun Aspirasi	93
Tabel 4.24	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Kegiatan Reses Menindaklanjuti Aspirasi	94
Tabel 4.25	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Lain Kegiatan Reses Untuk Pencitraan	95
Tabel 4.26	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Mengawasi Pembangunan Daerah.....	96
Tabel 4.27	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Dilaksanakan di Seluruh Daerah Pemilihan.....	97

Tabel 4.28	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Menggunakan Konsep Audensi	98
Tabel 4.29	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Menggunakan Konsep Pintu ke Pintu	99
Tabel 4.30	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Menyediakan Bantuan Dalam Bentuk Uang/Barang	100
Tabel 4.31	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Melakukan Kunjungan ke RT/RW Setempat.....	101
Tabel 4.32	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat.....	102
Tabel 4.33	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Memiliki Program Khusus Sesuai Daerah Pemilihan	103
Tabel 4.34	Tanggapan Responden Tentang Hasil Kegiatan Reses Sudah Terlaksana	104
Tabel 4.35	Tanggapan Responden Tentang Hasil Kegiatan Reses Merumuskan Kebijakan yang Dibutuhkan Masyarakat	105
Tabel 4.36	Tanggapan Responden Tentang Anggota DPRD Memberikan Pengumuman Terkait Kegiatan Reses.....	106
Tabel 4.37	Tanggapan Responden Tentang Anggota DPRD Mensosialisasikan Kegiatan Reses Kepada Masyarakat.....	107
Tabel 4.38	Tanggapan Responden Tentang Anggota DPRD Membuat Agenda Sesuai Kebutuhan Masyarakat.....	108
Tabel 4.39	Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengetahui	

Jadwal Kegiatan Reses	109
Tabel 4.40 Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Dihadiri Perwakilan Dari RT dan RW	111
Tabel 4.41 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Terbantu Adanya Kegiatan Reses	112
Tabel 4.42 Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Memenuhi Harapan Masyarakat.....	113
Tabel 4.43 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Terwakili Kepentingannya.....	114
Tabel 4.44 Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Dinantikan Masyarakat	115
Tabel 4.45 Tanggapan Responden Tentang Lokasi Kegiatan Reses Mudah Diakses.....	116
Tabel 4.46 Tanggapan Responden Tentang DPRD Kota Serang Menyediakan Sarana Kritik dan Saran Via Telepon.....	117
Tabel 4.47 Tanggapan Responden Tentang Dalam Kegiatan Reses Menyediakan Sarana Tenda/Ruangan.....	118
Tabel 4.48 Tanggapan Responden Tentang Dalam Kegiatan Reses Menyediakan Kuisisioner/Angket	119
Tabel 4.49 Tanggapan Responden Tentang Dalam Kegiatan Reses Menyediakan Modul/Materi.....	120
Tabel 4.50 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengadukan Anggota DPRD yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses	

Kepada Badan Kehormatan.....	121
Tabel 4.51 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengadukan Anggota DPRD yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses Kepada Partai Politikny.....	122
Tabel 4.52 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengawasi Kegiatan Reses	123
Tabel 4.53 Tanggapan Responden Tentang Partai Politikny Mengawasi Kegiatan Reses.....	124
Tabel 4.54 Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Memberikan Manfaat.....	125
Tabel 4.55 Tanggapan Responden Tentang Adanya Evaluasi Kegiatan Reses.....	126
Tabel 4.56 Rekapitulasi Tanggapan Responden Atas Kegiatan Reses	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 4.1	Wilayah Administrasi Kota Serang.....	69
Gambar 4.2	DPRD Kota Serang.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Data Hasil Uji Coba Instrumen
- Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
- Lampiran 4 Data Hasil Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin matang, menimbulkan tuntutan rakyat kepada wakil rakyat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerjanya. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan tertinggi adalah rakyat) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen)

dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif sesuai hukum dan peraturan.

Semenjak era otonomi daerah bergulir, telah menempatkan DPR maupun DPRD pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi legislasi, *budgeting*, kontrol, dan fungsi representatif. Namun pada kenyataannya, kinerja parlemen tersebut belum berjalan dengan maksimal. Begitu juga yang terjadi di Kota Serang.

Kinerja dalam fungsi *budgeting*, DPRD Kota Serang dirasa lemah dalam mengkritisi penyusunan APBD Kota Serang tahun 2013 yang dinilai terlalu boros. Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Serang tentang APBD tahun 2013 yang dilakukan Kepala Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Serang mencatat dari Rp 340 miliar rencana anggaran belanja langsung, sekitar 161 miliar diantaranya digunakan untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan sekitar Rp 57 miliar digunakan untuk belanja pegawai, yakni honor pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS. Sementara untuk belanja modal yakni peningkatan aset tanah, bangunan dan alat milik pemerintah daerah hanya sekitar 121 miliar. Jika seperti ini, tentu saja yang paling dirugikan adalah rakyat karena rakyat sebagai tujuan dari adanya penyelenggaraan pemerintahan. Seharusnya anggaran untuk rakyat yang lebih besar akan memperbesar legitimasi fungsi pemerintahan. Pemerintahan hanyalah alat untuk mensejahterakan rakyat dan akan sangat aneh apabila alatnya justru menjadi penghambat kesejahteraan rakyatnya. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Kurang maksimalnya kinerja dalam bidang *budgeting* tersebut semestinya tidak terjadi, terlebih DPRD memiliki masa reses sebagai sarana untuk menggali aspirasi dari rakyat. Berdasarkan masukan atas persoalan yang semestinya dijadikan perhatian oleh pemerintah daerah, baik sebagai penyusunan peraturan daerah maupun sebagai bahan penyusunan anggaran (APBD). Masukan dari masyarakat atau hasil pengamatan anggota dewan terhadap kondisi di daerah idealnya menjadi bagian untuk menyusun kebijakan ke depan.

Di sisi lain, kewajiban anggota DPRD Kota Serang untuk bertemu dengan konstituen dan daerah pemilihannya (Dapil) merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pelaksanaan Reses antara lain adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah pasal 300 dan rumusan pasal tersebut diatur oleh peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang tahun 2009-2014 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2010 BAB VIII Bagian Kesatu Pasal 64 Tentang Persidangan.

Adapun anggota DPRD Kota Serang priode 2009-2014 yang terbagi dalam 5 Daerah pemilihan (dapil) yaitu dari 45 orang anggota DPRD Kota Serang yang mewakili daerah pemilihan Kota Serang I Kecamatan Serang berjumlah 16 orang,

daerah pemilihan Kota Serang II Kecamatan Cipocok Jaya berjumlah 6 orang, daerah pemilihan Kota Serang III Kecamatan Kasemen berjumlah 7 orang, daerah pemilihan Kota Serang IV Kecamatan Curug dan Walantaka berjumlah 10 orang, daerah pemilihan Kota Serang V Kecamatan Taktakan berjumlah 6 orang. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Idealnya, *reses* adalah sarana komunikasi politis antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa *reses*. Komunikasi politik diwujudkan tidak saja dengan bentuk penyerapan aspirasi, menerima pengaduan, dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Tapi juga dijadikan forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Anggota dewan akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana *follow-up* dari *reses* sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan.

Tujuan *reses* adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Peserta *reses* bisa terdiri dari seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas, Lurah/Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Ormas, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Majelis Taq'lim.

Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu: 1) Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; 2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; 3) Pelaksanaan Reses; dan 4) Rapat Paripurna pelaporan hasil reses. Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa Parpol yang ada Anggota DPRD pada Dapil tersebut dan individu secara mandiri yang dilakukan secara impersonal kepada kontituen pada Dapilnya. Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna. Laporan perseorangan dan atau kelompok, dihimpun dan direkapitulasi menjadi laporan per kecamatan. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kota Serang. Dana sekitar Rp 700 juta dalam sekali reses yang tersedia untuk seluruh anggota dewan dan sekretariat pendamping untuk penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Di luar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana

ketentuan Pasal 53 dan 61 PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Kunci penting keberhasilan reses dilihat dari kemampuan DPRD dalam memaksimalkan fungsi reses itu sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Kegiatan reses yang seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk menjaring aspirasi rakyat yang kelak akan diperjuangkan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tertuang dalam APBD belum dilaksanakan secara maksimal. Pada kenyataannya, reses hanya dijadikan sebagai ajang pulang kampung dan silaturahmi dengan para pengurus partai politik di daerah. Walaupun dilaksanakan forum terbuka dengan konstituennya, itu pun hanya dalam rangka konsolidasi internal untuk agenda politik tertentu seperti Pilkada.

Dewasa ini, masyarakat sebagai target dalam kegiatan politik membuat partai politik harus memilih dengan bijaksana dan cerdas siapa yang tepat mewakili partainya menjadi anggota legislatif karena masyarakat akan menyampaikan aspirasinya kepada anggota partai yang terpilih menjadi anggota legislatif. Dengan jumlah 45 anggota dewan yang terbagi di dalam fraksi-fraksi yang mewakili daerah pilihnya masing-masing diharapkan dapat menjalankan fungsi DPRD Kota Serang dengan baik dan dapat menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihannya dalam kegiatan reses.

Kota Serang yang memiliki beragam permasalahan seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sosial dan ekonomi. Hal ini dilihat dari hasil kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan di daerah pemilihannya. Di sektor pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena biaya mahal, jarak sekolah jauh serta kurangnya jumlah sekolah kejuruan, dan masyarakat mengharapkan agar tidak terjadi lagi pungutan seperti adanya uang pendaftaran dan uang inventaris yang terjadi ditingkat SD, SMP dan SMA di Kota Serang. Masyarakat pun menginginkan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan terutama dana BOS. (<http://www.antarabanten.com>). Adapun, di sektor infrastruktur warga di Kota Serang mengeluhkan buruknya sejumlah infrastruktur yang ada di wilayah mereka. Keluhan masalah infrastruktur ini terungkap dalam rapat paripurna laporan hasil reses DPRD Kota Serang di gedung DPRD Kota Serang (<http://www.serangkota.go.id>). Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan diseluruh jalan utama kota serang yang terdapat kerusakan dan masyarakat

berharap agar dilakukan normalisasi irigasi dan perlu adanya pembersihan saluran irigasi di kota serang. Adapun, di sektor pariwisata dan budaya masyarakat menginginkan pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung lokasi wisata bahari dan wisata sejarah di Banten lama, masyarakat juga mengharapkan pembuatan kampung budaya di wilayah yang memiliki cagar budaya agar menarik bagi wisatawan, selain tempat wisata ziarah yang sudah ada dan menjadi kebanggaan bagi warga Kota Serang, masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah melakukan pembenahan dan penataan di kawasan banten lama karena sampai saat ini kawasan tersebut masih kurang pengelolaannya dan adanya pembinaan terhadap adat bugis di kecamatan kasemen dan adat-adat di Kota Serang. Adapun, di sektor kesehatan masyarakat menginginkan pendataan ulang terhadap masyarakat yang belum memiliki JAMKESDA, Dinas Kesehatan diharapkan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerimaan JAMKESDA dikarnakan belum menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat memohon peningkatan fasilitas sarana dan prasarana posyandu sebagai ujung tombak kesehatan dan pemberdayaan ibu dan anak di seluruh wilayah Kota Serang. Sementara itu, di sektor sosial dan ekonomi masyarakat Kota Serang Khususnya para ketua RT dan RW meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehubungan dengan beban kerja yang sangat berat di tengah masyarakat, masyarakat Kota Serang meminta agar honor pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) mohon diperhatikan, karang taruna di Kota Serang mengahrapkan adanya bantuan tempat

untuk kesekretariatan karang taruna di Kota Serang, masyarakat memohon kepada pemerintah Kota Serang untuk mengatasi tingkat kemiskinan pada masyarakat Kota Serang agar diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan terhadap ibu dan anak yang di sebabkan oleh kesenjangan ekonomi, masyarakat mengharapkan adanya pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, masyarakat mengharapkan pemerintah kota serang membuka lapangan pekerjaan mengingat setiap tahun angkatan kerja semakin bertambah, masyarakat pun mengharapkan adanya program pengembangan ekonomi kerakyatan dan adanya bantuan untuk kelompok usaha kecil atau usaha bersama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, masyarakat mengharapkan kepada pemerintah Kota Serang agar memperhatikan dengan serius untuk kemudahan dan akses dalam mendapatkan pekerjaan, masyarakat mengharapkan agar adanya pelatihan bagi generasi muda yang potensinya dapat disalurkan karena masih banyak masyarakat Kota Serang yang belum bekerja, hal ini dapat dikoordinasikan dengan BLKI yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Permasalahan yang ada menjadi faktor utama pentingnya memaksimalkan kegiatan reses. Anggota DPRD Kota Serang melakukan kegiatan reses untuk kembali kepada masyarakat, dari kegiatan reses banyak masyarakat berharap dapat menyampaikan aspirasi namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak seluruhnya tahu tentang kegiatan reses yang sosialisasinya hanya dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kota Serang yang hanya dihadiri SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Sosialisasi yang seharusnya diteruskan oleh SKPD

tidak berjalan dengan baik karena pada implementasi di lapangan dari sosialisasi tersebut masih menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dianggap mudah, masyarakat Kota Serang tidak seluruhnya mengerti dan memahami arti dari reses itu sendiri, karena permasalahan tersebut berimbas pada masyarakat luas. Anggota DPRD Kota Serang selaku pelaksana kegiatan resespun memiliki andil dalam keberhasilan kegiatan reses. Adapun hasil dari kegiatan reses dibidang legislasi masih kurang maksimal hal ini dilihat dari 16 perda yang dihasilkan pada tahun 2013 hanya 4 yang dihasilkan dari kegiatan reses yaitu 1. Perda No 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah; 2. Perda No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 3. Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan; 4. Perda No 8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan sisanya diajukan oleh pemerintah kota serang.

DPRD Kota Serang membentuk masa persidangan yang dibahas oleh Badan Musyawarah dan disahkan pada sidang paripurna. Masa persidangan itu sendiri meliputi masa sidang dan masa reses. Masa Sidang adalah masa DPRD Kota Serang melakukan kegiatan terutama di dalam Gedung DPRD Kota serang. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan. Adapun jadwal masa reses DPRD Kota Serang dalam tahun sidang 2013 sebagai berikut:

Tabel 1.1**Tahun Sidang DPRD Kota Serang**

No	Tahun Sidang 2013	Waktu Kegiatan
1	Masa Sidang I	Januari s/d April
2	Masa Reses I	April
3	Masa Sidang II	Mei s/d Agustus
4	Masa Reses II	Agustus
5	Masa Sidang III	September s/d Desember
6	Masa Reses III	Desember

Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013

Dari tabel 1.2 di atas menjelaskan jadwal kegiatan pada satu tahun sidang 2014 yang meliputi 3 (tiga) kali masa sidang dan 3 (tiga) kali masa reses yang dimana masa reses dilakukan pada minggu akhir selama 5 (lima) hari. Dengan diadakannya Masa Reses DPRD Kota Serang ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Adapun nilai positif dari kegiatan reses tersebut yaitu: 1) Untuk mempermudah anggota DPRD Kota Serang menyerap aspirasi secara langsung dari konstituennya, 2) Masalah yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Kota Serang berbeda-beda sehingga dapat menjadi acuan untuk diberikan solusi, dan 3) Agar mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan-keluhannya.

Berlandaskan Peraturan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang telah dijabarkan mengenai fungsi dan peran DPRD, sudah selayaknya anggota dewan Kota Serang menjalankan dan

bertanggung jawab dalam mengakomodir seluruh keluhan masyarakat maka ini menjadi kewajiban para anggota legislatif dalam pelaksanaan masa reses. Akan tetapi terlepas dari itu masyarakat sebagai target dari kegiatan reses masih belum seluruhnya merasakan manfaat kegiatan reses itu sendiri yang dikarenakan belum maksimalnya kegiatan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Pertama, Tujuan kegiatan reses sebagai sarana aspirasi masyarakat belum tercapai dengan baik. Pada kenyataannya, reses hanya dijadikan sebagai ajang pulang kampung dan silaturahmi dengan para pengurus partai politik di daerah. Kalaupun dilaksanakan forum terbuka dengan konstituennya, itu pun hanya dalam rangka konsolidasi internal untuk agenda politik tertentu seperti Pilkada. Karena seharusnya reses selain melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, reses juga dilakukan untuk mengawasi implementasi kebijakan pemerintah dan pembangunan. Di sana mereka seharusnya melayani masyarakat dengan menampung semua aspirasinya yang pada gilirannya nanti menjadi bahan-bahan masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tidak efektifnya kunjungan kerja atau kegiatan reses anggota dewan akibat tidak adanya keterpaduan antara agenda Komisi atau alat kelengkapan Dewan. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Kedua, Reses untuk sementara orang masih dianggap hal yang biasa, padahal memiliki arti strategis bagi perkembangan suatu daerah, mengingat dari berbagai aspirasi konstituen itu nantinya jadi bahan masukan untuk membuat program rencana pembangunan. Namun, pada kenyataannya kegiatan reses tidak memiliki strategi kegiatan yang jelas dalam mengakomodir aspirasi masyarakat.

Tidak ada sebuah format kunjungan kerja Dewan ke daerah agar lebih optimal. Materi atau instrumen untuk reses tidak ada dan anggota Dewan punya cara masing-masing dalam kegiatan reses ada yang individu dan berkelompok dalam berkunjung ke daerah pemilihannya, agenda dan program dalam kegiatan reses juga tidak ada hanya ada jadwal reses yang ditentukan pada rapat paripurna. Juga tidak ada kewajiban agar reses memuat materi yang terkait dengan tiga fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Anggota dewan hanya datang untuk menyerap aspirasi tanpa materi dan instrumen yang jelas. (Sumber: Setwan DPRD Kota Serang 2013)

Ketiga, Perencanaan dalam kegiatan reses sangat penting agar lebih efektif dan komprehensif. Namun faktanya tidak adanya perumusan agenda dan program yang jelas dalam pelaksanaan reses membuat proses penyerapan aspirasi masyarakat tidak optimal. Padahal perencanaan sangat penting dalam memaksimalkan kegiatan reses untuk mencapai tujuan dari reses yang nantinya menjadi bahan masukan pemerintah dalam pembangunan daerah.

Keempat, pada saat pelaksanaan reses DPRD Kota Serang terlebih dahulu memberitahukan kepada SKPD dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang, pihak kecamatan yang menjadi fasilitator dalam mensosialisasikan kegiatan reses tentang perihal kedatangan mereka. Pihak kecamatan akan mengundang perangkat desa dan perwakilan masyarakat untuk berdialog dan bertatap muka dengan masyarakat tanpa menutup pada masyarakat yang lain untuk hadir. Namun pada kenyataannya, sosialisasi yang sudah diumumkan pada rapat paripurna yang dihadiri oleh SKPD yang terkait tidak tersampaikan dengan baik oleh pihak

kecamatan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Ketua RT Desa Taman Baru KS yang mengatakan tidak pernah mendapatkan undangan kegiatan reses sehingga beliau tidak mengetahui jadwal kegiatan reses yang dilakukan di Desa Taman Baru KS. (Sumber: Ketua RT Desa Taman Baru KS)

Kelima, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan reses untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di daerahnya, hal ini juga dilatarbelakangi oleh kesibukan dan pengetahuan masyarakat tentang kegiatan reses DPRD Kota Serang yang kurang karena kegiatan reses dilaksanakan pada hari kerja dimana seluruh warga banyak yang beraktifitas seperti bekerja ataupun aktifitas lainnya. Sebagai contoh pada kegiatan reses di Daerah Kecamatan Kasemen yang hampir seluruh warganya bekerja sebagai petani dan nelayan. Kegiatan reses yang dilaksanakan pada hari kerja dan pada waktu siang hari membuat partisipasi masyarakat yang hadir hanya sedikit. (Sumber: Warga Desa Kasemen)

Keenam, tidak meratanya jangkauan wilayah dalam kegiatan reses yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Serang. Dilihat dari tanggung jawab setiap anggota DPRD Kota Serang yang mewakili setiap kecamatan atau daerah pemilihannya masing-masing seharusnya kegiatan reses dapat berjalan maksimal. Namun melihat dari fakta yang terjadi dilapangan kegiatan reses yang seharusnya dihadiri semua perangkat desa dan masyarakat yang ada di kecamatan hanya dihadiri sebagian golongan atau perangkat desa karena yang dikunjungi hanya sebagian masyarakat. Hal ini yang menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang

kurang tertampung seluruhnya. Berikut adalah tempat yang dikunjungi pada kegiatan reses:

Tabel 1.2

Daftar Tempat Yang Dikunjungi Dalam Kegiatan Reses Tahun 2013

No.	Dapil	Ket.	No.	Dapil	Ket
1.	Kasemen	Ketua RT. 01 RW.12 Desa Banten	23.	Taktakan	Ketua RT. 03 RW. 02 Kel. Serang
2.		Ketua RT. 03 RW. 05 Desa Kasemen	24.		Ketua RT. 01 RW. 03 Kel. Serang
3.		Ketua RT. 02 RW. 11 Desa Banten	25.		Ketua RT. 03 RW. 01 Kel. Serang
4.		Ketua RW. 08 Desa Kasemen	26.		Ketua RW. 05 Ds. Sayar
5.		DPAC Demokrat Kec. Kasemen	27.		Ketua RW. 02 Ds. Umbul Tengah
6.	Serang	Ketua RT. 01 RW. 03 Desa Unyur	28.		Ketua RT. 02 kel. Drangong
7.		Ketua RT. 03 RW. 01 Kel. Cimuncang	39.		Ketua RW. 05 Ds. Sayar
8.		Kelurahan Cimuncang	30.		Ketua RW. 02 Ds. Umbul Tengah
9.		Ketua RT. 01 RW. 04 Kel. Sukawana	31.		Ketua RT. 02 RW. 04 Ds. Sayar
10.		Forum pemuda Ciracas	32.		Kecamatan Taktakan
11.		Ketua RT. 01 RW. 08 Kel. Kagungan	33.		Kelurahan Taktakan
12.		Ketua RW. 08 Kel. Kagungan	34.		Ketua RT. 01 RW. 04 Kel. Taktakan
13.		Ketua RT. 02 RW. 03 Kel. Kagungan	35.		Karang taruna Ds. Sayar
14.		Ketua RT. 03 RW. 02 Kel. Serang	36.		Ketua RT. 02 RW.05 Ds. Sayar
15.		Ketua RT. 01 RW. 03 Kel. Serang	37.		DPC. PDI Perjuangan
16.		Ketua RT. 03 RW. 01 Kel. Serang	38.		Majlis ta'lim Ds. Sayar
17.	Cipocok Jaya	Ketua RT. 01 RW. 03 Kel. Tembong	39.	Curug	Ketua RT. 01 RW. 01 Ds. Curug
18.		Ketua RT. 07 RW. 04 Kel. Dalung	40.		Ketua RT. 01 RW. 02 Ds. Cilaku

19.		Ketua RT. 03 RW. 01 Kel. Gelam	41.		Kecamatan Curug
20.		Kecamatan Cipocok Jaya	42.		Kelurahan Cilaku
21.		Ketua RT. 04 RW. 03 Kel. Dalung	43.	Walantaka	Ketua RT. 02 RW. 01 Ds. Cigoong
22.	Taktakan	Forum Pemuda Taktakan			

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari tabel 1.3 di atas, dapat diketahui hanya beberapa tempat yang dihadiri pada kegiatan reses yang seharusnya mengakomodir seluruh desa yang ada di kecamatan sebagai daerah pemilihannya bukan hanya sebagian kecil seperti RT, RW, Forum Pemuda atau partainya sendiri.

Kegiatan Reses DPRD Kota Serang bertujuan untuk mendengarkan keluhan dalam rangka menyerap aspirasi dan saran dari masyarakat tentang persoalan-persoalan masyarakat yang berkembang dan skala prioritas apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Serang. Oleh karena itu, perlu adanya tanggung jawab dan keterbukaan dari pemerintah maupun masyarakat. Seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan aspirasi untuk pembangunan Kota Serang yang menyeluruh. Harapannya dapat memaksimalkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan DPRD Kota Serang terutama dalam pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang agar tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Serang.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MASA RESES DPRD KOTA SERANG MASA BHAKTI 2009-2014 TAHUN 2013"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Di dalam pelaksanaan Masa Reses tentunya juga menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain :

1. Tujuan kegiatan reses belum tercapai dalam menyerap aspirasi masyarakat Kota Serang.
2. Tidak adanya strategi dalam kegiatan reses.
3. Tidak adanya Perencanaan yang matang dalam kegiatan reses.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan setempat kepada masyarakat sehingga tidak semua warga mengetahui kegiatan reses.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan reses.
6. Jangkauan wilayah dalam masa reses yang tidak merata diseluruh desa di Kota Serang.

1.3 Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang sekaligus membatasi permasalahan yang diteliti, perumusan masalah tersebut adalah seberapa besar Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengukur efektivitas pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan Manfaat Teoritis / akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis.

1. Memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis
2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai partisipasi masyarakat, politik, dan administrasi negara serta mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan khususnya Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) yang di dalamnya menjelaskan fungsi lembaga tinggi negara dan sistem penyelenggaraan negara.

1.6.2 Manfaat praktis

Kegunaan praktis/fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi.

1. Dapat memberikan informasi, masukan serta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam melaksanakan kegiatan reses sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat Kota Serang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan baca yang bermanfaat bagi pembaca atau mahasiswa khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untirta dalam memberikan informasi yang dibutuhkan ataupun dapat dijadikan bahan referensi, rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian serupa.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang relevan yang mendukung dalam penelitian ini mengenai pengertian dari masing-masing

variabel, pengertian dari beberapa kata yang berhubungan dengan judul, menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab analisis data dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori adalah:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari kontrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2008:41) menyatakan bahwa: *A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.* Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena.

Dalam bidang administrasi Hoy dan Miskey (2001) dalam Sugiyono (2009:54) mengemukakan teori sebagai berikut. *“Theory in administration, however has the same role as theory in physics, chemistry, or biology; that is providing general explanations and guiding research”.* Selanjutnya didefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. *“theory is a set of interrelated concepts, assumptions, and generalizations that systematically describes and explains regularities in behavior in organizations”.*

Berdasarkan yang dikemukakan Hoy dan Miskel (2001) dalam Sugiyono (2009:54) dapat dikemukakan bahwa teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis, yang berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan, dan teori juga sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi. Contoh konsep dalam administrasi adalah *leadership* (kepemimpinan), *satisfaction* (kepuasan) dan *informal organization* (organisasi informal). Sedangkan asumsi merupakan pernyataan diterima kebenarannya tanpa pembuktian.

Dalam penelitian mengenai analisis implementasi program pemberdayaan masyarakat bagi wanita rawan sosial ekonomi, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengklasifikasikan kedalam teori. Adapun penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut

2.1.2 Teori Efektivitas

Efektivitas organisasi mempunyai banyak pengertian, tergantung bagaimana cara kita memandangnya, sehingga mengandung pengertian yang multidimensi. Sesuatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauhmana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Konsep efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata, Stoner dalam Tangklisan (2005:138) menekankan

bahwa pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci kesuksesan suatu organisasi.

Sedangkan Miller dalam Tangkilisan (2005:140) mengemukakan bahwa:

"Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments."

(Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan).

Atmosoeprpto (2002:139) menyatakan:

Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Berdasarkan sifatnya, organisasi cenderung merupakan kesatuan yang kompleks, yang berusaha mengalokasikan sumber dayanya secara nasional demi tercapainya tujuan.

Steers dalam Syarief (2007:120) mengemukakan bahwa:

Makin rasional suatu organisasi, semakin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah ketujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh kearah tujuan, organisasi makin efektif pula. Efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir organisasi.

Dalam keterkaitan efektivitas organisasi Sudarno dan Mulyono (2001:128) mengemukakan sebagai berikut:

Efektivitas organisasi harus mampu menggambarkan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan lingkungannya lebih luas. Efektivitas organisasi juga adalah apakah suatu organisasi itu mampu bertahan dan

hidup terus dalam lingkungannya sehingga kelangsungan organisasi yang bersangkutan merupakan ukuran terakhir atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi.

Oleh karena itu, dalam mengukur efektivitas organisasi pemerintah legislatif, akan dilihat sejauhmana atau seberapa besar kemampuan organisasi pemerintah dalam melakukan inovasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemampuan organisasi dalam mengambil pelajaran, baik dalam kegagalan maupun keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu untuk mengatur perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan legislatif melalui penerapan optimal fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam keterkaitan ini, Robbins (2006:51) menyatakan dalam menyelenggarakan aktivitas organisasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Adanya tujuan yang jelas;
2. Sumber daya manusia;
3. Struktur organisasi;
4. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat,
5. Adanya sistem nilai yang dianut.

Konsepsi tersebut menunjukkan secara jelas adanya pengaruh sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas organisasi. Sumber daya manusia dan partisipasi merupakan dua variabel yang erat kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat. Tanpa pemberdayaan masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat sulit untuk diwujudkan. Hal ini dapat dipahami bahwa sebuah organisasi dalam menetapkan berbagai kebijakan bahkan sampai pada implementasi kebijakan memerlukan dukungan masyarakat, baik pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

Dalam usaha membina pengertian efektivitas yang semula bersifat abstrak itu, menjadi sedikit banyak lebih konkret (dan dapat diukur). Beberapa analisis organisasi berusaha mengidentifikasi segi-segi yang menonjol yang berhubungan dengan konsep ini. Dalam konteks ini, Etzioni dalam Makmur Syarief (2007:125) berpendapat sebagai berikut:

Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Berdasarkan pendapat ini, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya.

Menurut Robbins (1994:53) keefektivan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.

Tabel 2.1

Kriteria Efektivitas Organisasi Menurut Campbell

1. Keefektivan keseluruhan	17. Internalisasi tujuan organisasi
2. Produktivitas	18. Keterampilan interpersonal manajerial
3. Efisiensi	19. Keterampilan manajerial
4. Laba	20. Manajemen informasi dan komunikasi
5. Kualitas	21. Kesiapan
6. Kecelakaan	22. Pemanfaatan lingkungan
7. Pertumbuhan	23. Evaluasi pihak luar
8. Kemangkiran	24. Stabilitas
9. Pergantian pegawai	25. Nilai sumber daya manusia
10. Kepuasan Kerja	26. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
11. Motivasi	27. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
12. Moral/semangat juang	28. Penekanan pada performa
13. Kontrol	
14. Konflik/solidaritas	
15. Fleksibilitas/penyesuaian	
16. Perencanaan dan penetapan tujuan	

Sumber: Robbins (1994:55)

Efektivitas lebih menekankan kepada kegiatan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Untuk itu, usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Kegiatan organisasi lebih difokuskan kepada pencapaian target yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi. Ini dilakukan untuk tercapainya tujuan sebuah organisasi.

Adapun kriteria atau indikator daripada efektivitas (Tangkilisan, 2007:314) yakni diantaranya:

1. Pencapaian Target
Maksud pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi (fleksibelis)
Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi.
3. Kepuasan kerja
Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan/sistem insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.
4. Tanggung Jawab
Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaan.

Tampak dari pandangan dan argumentasi tersebut bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi. Pandangan pakar lainnya mengemukakan

efektivitas adalah melakukan hal secara benar. Efisiensi, tetapi tidak efektif menunjukkan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya efektif, tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau tidak lazim disebut ekonomi biaya tinggi. Efektif banyak dikaitkan dengan kepemimpinan, sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan masa reses. Secara umum efektivitas pelaksanaan masa reses dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan masa reses yang dilakukan organisasi dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas masa reses yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh adanya keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pada dasarnya efektivitas sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Menurut Gie dalam Halim (2004: 166) berpendapat bahwa:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu akan dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Efektivitas menurut Gibson (1996: 25) adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Gibson menyimpulkan kriteria efektivitas suatu organisasi dalam lima indikator yaitu:

1. Produksi (*Production*). Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan, ukuran ini berhubungan secara langsung dengan output yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi.
2. Efisiensi (*Efficiency*). Sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input, perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan output dengan waktu merupakan bentuk umum dari ukuran ini.
3. Kepuasan (*Satisfaction*). Kepuasan dan semangat kerja adalah istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan/masyarakat.
4. Kemampuan menyesuaikan diri (*Adaptiveness*). Sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan ekstern. Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri.
5. Perkembangan (*Development*). Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan atau sosialisasi bagi tenaga manajemen/masyarakat dan non manajemen. Tetapi sekarang ini pengembangan organisasi telah bertambah banyak macamnya dan meliputi sejumlah pendekatan psikologi dan sosiologi.

Efektivitas menurut Georgopoulos dan Tannebaum dalam Tangkilisan (2005: 139) efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi

merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya. Sementara itu, Sharma dalam Tangkilan (2005: 64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktifitas organisasi atau output;
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan Strees dalam Tangkilan (2005: 64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Produktifitas;
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan ber laba;
5. Pencarian sumber daya.

Gibson dalam Tangkilan (2005: 65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan

- artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
 5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja ;
 6. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh

Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997: 25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu
Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas Kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataanya individu saling berkerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
3. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap bagiannya.

Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handayani (1996:16) bahwa “efektivitas adalah tercapainya sesuatu sasaran eksplisit dan implisit”. Winardi (2003: 84) menjelaskan “efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang perkerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu”. Apabila peneliti analisa kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang diperoleh seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang

dipergunakan untuk mengasikkan barang/jasa tersebut. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Jadi efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran. Sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich kosep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem (1997:27-29). Dua pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
2. Sedangkan teori sistem organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Untuk terwujudnya kerja yang efektif, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut Steer (1985:30) terdapat empat macam faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relative tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam

produksi, dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dan segi-segi dan efektifitas, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi, yang mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah.

3. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berkaitan dengan peranan perbedaan individu para perkerja dalam hubungannya dengan efektifitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat perkerja inilah yang menyebabkan perilaku orng berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterkaitan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Manajer mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian melaksanakannya melalui orang-orang, oleh sebab itu orang-orang didalam organisasi merupakan sumber daya yang terpenting. Dari faktor Kebijakan dan Praktek Manajemen ini, dapat diidentifikasi sedikitnya enam variable yang menyambung pada efektifitas yaitu penyusunan tujuan strategis; pencarian dan pemanfaatan sumber daya; menciptakan lingkungan prestasi; proses komunikasi; kepemimpinan dan pengambil keputusan serta inovasi dan adaptasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik benang merah dari efektifitas yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran, sehingga lebih menekankan pada hasil yang dicapai. Dengan kata lain efektifitas mengarah tepat pada tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya modal (financial).

Adapun pengertian efektivitas menurut Sedarmayanti (2001:59) yaitu

“efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas tentu efisiensi meningkat”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2003:14) efektivitas adalah sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Pandangan yang sama menurut pendapat Drucker yang dikutip Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (dalam Moenir, 2006:166).

Berdasarkan pendapat di atas efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan

dan jumlah orang yang telah ditentukan. Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan

2.1.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.1.3.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Menurut Sukarna memberikan pengertian tentang badan ini adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control*, *legal control*, *social control*, *economic control*, *education*, *educational control* dan lain-lain.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkependudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Wikipedia Indonesia)

Dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila melihat dari pengertian di atas berarti fungsi DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik lagi.

2.1.3.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, implementasi peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu : 1. Fungsi legislasi; 2. Fungsi anggaran; 3. Fungsi pengawasan.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif, dalam arti Peraturan Daerah yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme

penyusunan PERDA yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

2.1.3.3 Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. DPRD memiliki tugas dan wewenang yang tertulis dalam UU No.27 Tahun 2009 Tentang (MPR, DPR, DPD, DPRD) pasal 344 yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/ Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan hukum, yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Tugas tanpa wewenang akan mandul, dan wewenang tanpa tugas adalah kesewenang-wenangan. Untuk itu wewenang senantiasa memiliki batas, yaitu: 1. Secara limitatif/enumeratif ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan (termasuk asas-asas umum pemerintahan yang layak); 2. Batas waktu tertentu (masa jabatan); 3. Moral.

2.1.3.4 Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Anggota DPRD Kota Serang diharapkan dapat melaksanakan kewajiban anggota DPRD Kota Serang yang tertulis dalam UU No.27 Tahun 2007 Tentang (MPR, DPR, DPD, DPRD) Pasal 351 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;

- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.1.3.5 Pengertian Perwakilan Politik

Perwakilan Politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakil dapat dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil, sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi tersebut ammpu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokratis.

Menurut Pitkin dan Napitipulu (2007:11), menyatakan bahwa “proses keterwakilan menyangkut dua hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan, dan keterwakilan dari sisi opini”, yaitu:

“Perwakilan kepentingan berarti wakil rakyat terikat pada kelompok-kelompok kepentingan yang mengandung wakil tersebut sedangkan perwakilan opini mengikatkan wakilnya kepada pendapat umum dan yang diwakilinya bersifat simbolik, berupa perasaan, emosi dan aspek psikologis keseluruhan anggota masyarakat. Yang diwakili dalam perwakilan kepentingan adalah individu dan kelompok setra golongan kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga selalu terjadi atau hubungan yang etrus menerus antara wakil dan yang diwakili sedangkan perwakilan opini atau simbolik, todak terbangun hubungan kontak yang kukuh antara keduanya”.

Selain dari pada yang diungkapkan diatas, Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa:

“keterwakilan politik atau *political representativeness* adalah terwakilnya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik.”

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam keterwakilan politik menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat terkayani atau dapat diwujudkan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Napitipulu (2007:154) memberikan definisi perwakilan politik sebagai berikut:

“perwakilan politik berarti bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang maupun keseluruhan anggota masyarakat”. Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa perwakilan politik menggambarkan adanya seseorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan atau kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.”

Menurut *Encyclopedia Of Knowledge* mengungkapkan bahwa representative atau wakil adalah sebagai berikut:

“A representative is some one ultimately held to account by the represented. Representative may stand for other by resemblance so that the legislative is regarded as a miniature of the nation (for instance, in proportional representation), or the individual representative, as typical of his constituency. (seorang wakil adalah seorang yang mengemban tanggung jawab yang dari pihak yang diwakili. Wakil dapat memiliki kedudukan lain sebagai dewan perwakilan rakyat yang dianggap sebagai miniatur bangsa sebagai wakil individu khusus untuk para pemilihnya).”

Uraian pengertian diatas menunjukkan bahwa hasil merupakan orang-orang yang memiliki peranan sebagai wakil masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengemban kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang diwakili.

Pito Dkk (2006:102-103) mengemukakan pengertian perwakilan lainnya dari beberapa ahli dalam Andrianus (2006:102-103), yang pada intinya mengemukakan bahwa:

“Perwakilan diartikan sebagai proses hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk bertindak sesuai kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili, selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan kepentingan pihak terwakili.”

Pengertian perwakilan yang diuraikan di atas mempertegas bahwa perwakilan menunjukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakil yang terwujud dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat. Selain itu dalam setiap sikap dan tindakan seorang wakil harus sesuai dengan kehendak pihak terwakil, serta harus peka terhadap kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu menurut Birch dalam Pito (2006:108-109), pada umumnya terdapat lima konsep pengertian tentang perwakilan atau wakil, yaitu:

- a. *Delegated Representation*, menunjukkan bahwa seorang wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang diwakilinya dan tidak diperkenankan melampaui kuasa yang diberikan kepadanya.
- b. *Microcosmic representation*, menunjikan bahwa sifat-sifat wakil itu memiliki kesamaan dengan sifat-sifat golongan atau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya.

- c. *Symbolic representation*, menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas dan kualitas golongan/ kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya.
- d. *Elective representation*. Konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil tersebut.
- e. *Party representation*, menunjukkan bahwa para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi/ partai politik bersangkutan.

Beberapa konsep pengertian perwakilan di atas menggambarkan hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili, dimana dalam menjalankan kuasanya lembaga perwakilan sebagai pihak wakil tidak boleh melampaui kuasa yang telah diberikan masyarakat sebagai pihak terwakili kepadanya. Selain itu perwakilan juga merupakan gambaran kesamaan dari sifat-sifat lembaga perwakilan sebagai pihak wakil dengan sifat-sifat lapisan masyarakat yang diwakilinya.

Menurut Nurtjahjo dalam Pito (2006: 111), menyatakan bahwa perwakilan menginsyafi tiga karakter yang dapat secara penuh “mewujudkan rakyat,” yaitu:

- a. Perwakilan Politik (*Political representation*)
- b. Perwakilan Daerah (*Regional representation*)
- c. Perwakilan Golongan (*Functional representation*)

Uraian di atas menjelaskan bahwa perwakilan memiliki karakter yang apabila diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan rakyat dalam arti sebenarnya baik itu aspirasi, kepentingan, kebutuhandan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian harus benar-benar terwujud secara nyata setiap karakter perwakilan tersebut baik perwakilan politik, perwakilan daerah, maupun perwakilan golongan dalam hal ini adalah lapisan masyarakat.

Jadi ketiga karakter perwakilan di atas harus dapat dilaksanakan secara seimbang jangan sampai salah satunya diabaikan agar masyarakat merasa setiap

aspirasi, kepentingan dan kebutuhan mereka sudah terwakili dalam dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan.

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan andalan utama dari dinamika perubahan dan kebebasan dalam iklim demokrasi. Pembangunan nasional, mengandalkan partisipasi publik secara luas. Dalam perspektif politik, setidaknya menurut Huntington dan Nelson (1994), partisipasi publik merupakan ciri khas modernisasi politik. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi (Agustino, 2006: 101). Dalam hal ini berarti sebuah Negara dikatakan sudah mengalami modernisasi politik dimana partisipasi politik publiknya telah maju, partisipasi politik merupakan sebuah pemberdayaan sekaligus sebuah sikap yang peka dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan aspirasi rakyat. Berangkat dari sebuah asumsi yang menyatakan bahwa hanya orang yang bersangkutanlah yang mampu mengartikulasikan kebutuhannya sendiri.

2.1.4 Masa Reses

Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Kemudian Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa "reses", menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya.

Istilah masa reses bagi DPRD baru tahun 2004 di jelaskan dalam PP No. 25 Tahun 2004 ini mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPRD tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPRD dan pada faktanya istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 dan PP No 25 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi PP No 16 Tahun 2010, kemudian istilah diadopsi ke dalam peraturan DPRD Kota Serang tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang.

Dalam tata tertib DPRD tersebut, yaitu BAB VIII tentang Persidangan, Rapat dan Pengambilan Keputusan, Pasal 78 menyebutkan:

1. Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
2. Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
4. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
5. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

6. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membawa laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
7. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
8. Apabila dipandang perlu pimpinan DPRD dapat menyampaikan hasil kegiatan reses kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti.
9. Untuk kegiatan reses, sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.

2.2 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2007:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti.

Sementara itu, menurut Sekaran dalam Sugiyono (2005:65), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti, serta kaitan antar variabel yang diteliti, bagan tersebut disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian. Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis yang dibahas terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi. Dari pengertian tersebut efektivitas yang dimaksud adalah sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan masa reses. Secara umum efektivitas pelaksanaan masa reses dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan masa reses yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas masa reses yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gibson dalam Tangkilisan (2005: 65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

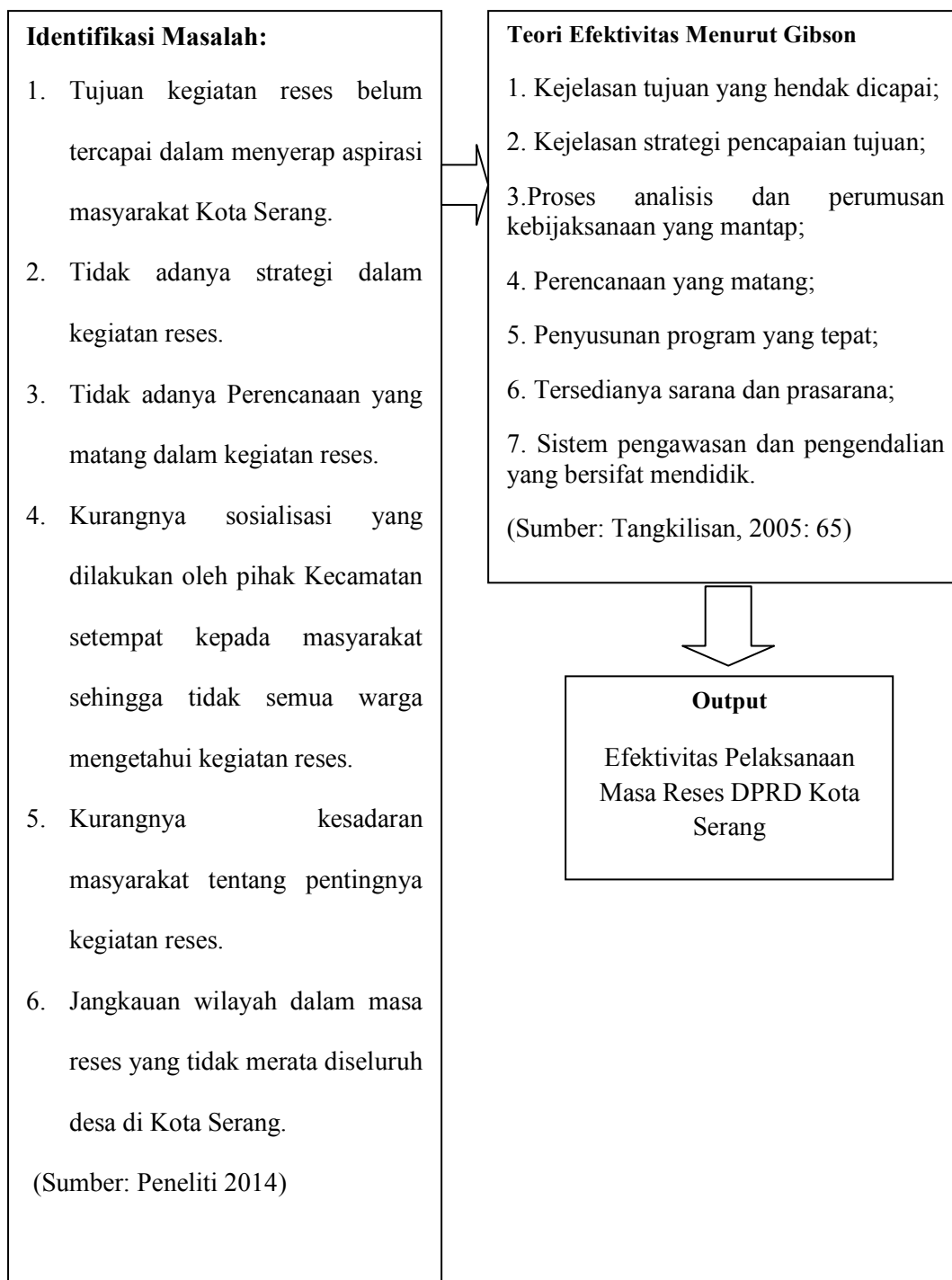
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan;
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
6. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Berfikir



Sumber: Peneliti 2014

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan hasil refleksi peneliti berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah hipotesis deskriptif yaitu dugaan sementara terhadap nilai variabel secara mandiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis yang dipakai adalah:

Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang sebesar 65% dari nilai ideal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dikatakan belum baik apabila lebih rendah atau sama dengan 65% :

$$H_0: \mu_0 \leq 65\%$$

2. Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dikatakan baik apabila lebih dari 65% :

$$H_a: \mu_a > 65\%$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tepat. Metodologi penelitian merupakan suatu usaha pembuktian suatu terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Husaini, 2008:41). Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008:35). Metode penelitian kuantitatif

adalah penelitian dengan menggunakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya (Sugiyono).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengenali dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013.

3.2 Instrumen Penelitian

Setelah desain penelitian telah dirancang, maka langkah berikutnya adalah merancang instrument penelitian. Sugiyono (2008:102) menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel

penelitian. Setelah desain penelitian telah dirancang, maka langkah berikutnya adalah merancang instrument penelitian. Instrument ini dimaksud sebagai perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data di lapangan (Bungin, 2005: 94).

Adapun instrumen untuk mengukur Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No butir Pada Instrumen
<i>Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2014</i>	1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	a. Pelaksanaan Tujuan Organisasi b. Pencapaian Tujuan	1,2,3,4,5
	2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan	a. Strategi yang digunakan	6,7,8,9,10
	3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap	a. Analisis program yang akan dilakukan b. Bagaimana perumusan kebijakan	11,12,13,14
	4. Perencanaan yang matang	a. Penyusunan agenda b. Sosialisasi agenda	15,16,17,18

		kegiatan	
	5. Penyusunan program yang tepat	a. Program tepat sasaran b. Memberi manfaat	19,20,21,22,23
	6. Tersedianya sarana dan prasarana	a. Tempat kegiatan b. Instrumen kegiatan	24,25,26,27,28
	7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik	a. Pihak yang member pengawasan b. Proses evaluasi terhadap hasil kegiatan c. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan	29,30,31,32,33,34

(Sumber: Peneliti, 2014)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan diberikan jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti yang dijelaskan pada tabel skor item instrumen di bawah ini:

Tabel 3.2
Skor item-item Instrumen

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Kurang setuju	2
Tidak Setuju	1

(Sumber: Sugiyono, 2007)

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

3.2.1.1. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian (Bungin,2005:122). Data primer adalah berupa angket (kuesioner), wawancara (*interview*), dan observasi (pengamatan).
- 2) Data Sekunder, yaitu sata yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan (Bungin, 2005: 122-123). Data yang tidak langsung diperoleh peneliti, namun diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti, hasil penelitian yang relevan.

3.2.1.2. Sumber Data

- 1) Responden, yaitu masyarakat Kota Serang yang mengikuti kegiatan reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.
- 2) Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Menurut Bungin (2005:123), sering pula metode angket disebut pula sebagai metode kuesioner. Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.

Instrument penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini, metode angket sebagai metode primer, karena data yang diperoleh dari angket merupakan data elementer dalam pengujian hipotesis penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2007:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah seluruh jumlah pemilih tetap di Kota Serang yang terdiri dari 5 (lima) dapil yaitu sebanyak 454.774 orang.

Tabel 3.3.
Jumlah Pemilih Tetap Kota Serang

NO.	DAPIL	JUMLAH PEMILIH TETAP
1	DAPIL 1 (Kecamatan Serang)	170.418 orang
2	DAPIL 2 (Kecamatan Cipocok Jaya)	61.536 orang
3	DAPIL 3 (Kecamatan Kasemen)	66.998 orang
4	DAPIL 4 (Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka)	97.036 orang
5	DAPIL 5 (Kecamatan Taktakan)	58.786 orang
	TOTAL PEMILIH	454.774 orang

Sumber: KPU Kota Serang 2014

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2007:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel dari yang diambil dari populasi itu.

Teknik sampling yang digunakan adalah *proportional area sampling*, karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilih Tetap di Kota Serang yang terdiri dari 5 (lima) Dapil dengan jumlah 454.774 orang dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga peneliti mendapatkan hasil sampel 100 orang/responden.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Husein (2004:107) yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$\frac{454.774}{1+(454.774).(0,1)^2}$$

$$\frac{454.774}{4548}$$

$$99,99 = 100 \text{ Responden}$$

Untuk perhitungan sampel di masing-masing dapil akan dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perhitungan Sampel

No.	Area	Jumlah Populasi	Perhitungan	Hasil Akhir
1	DAPIL 1 (Kecamatan Serang)	170.418 orang	$\frac{170.418}{454.774} \times 100$ = 37,4	37 orang
2	DAPIL 2 (Kecamatan Cipocok Jaya)	61.536 orang	$\frac{61.536}{454.774} \times 100$ = 13,5	14 orang
3	DAPIL 3 (Kecamatan Kasemen)	66.998 orang	$\frac{66.998}{454.774} \times 100$ = 14,7	15 orang
4	DAPIL 4 (Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka)	97.036 orang	$\frac{97.036}{454.774} \times 100$ = 21,3	21 orang
5	DAPIL 5 (Kecamatan Taktakan)	58.786 orang	$\frac{58.786}{454.774} \times 100$ = 12,9	13 orang
	TOTAL	454.774 orang		100 orang

Sumber: KPU Kota Serang 2014

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut menggunakan cara sebagai berikut :

- 1) *Editing Data*. Adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing* ini. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen dan poin yang janggal tersebut.
- 2) *Coding data*. Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala *Likert*. Skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sangat baik, sangat mudah, sangat sesuai, sangat memadai, sangat disiplin, sangat mampu, sangat cepat, sangat nyaman, dan sangat jelas diberi skor = 4.
 - 2) Baik, mudah, sesuai, memadai, disiplin, mampu, cepat, nyaman, jelas dan tepat diberi skor = 3.
 - 3) Kurang baik, kurang mudah, kurang sesuai, kurang memadai, kurang disiplin, kurang mampu, kurang cepat, kurang nyaman, kurang jelas dan kurang tepat diberi skor = 2.
 - 4) Tidak baik, tidak mudah, tidak sesuai, tidak memadai, tidak disiplin, tidak mampu, tidak cepat, tidak nyaman, tidak jelas dan tidak tepat diberi skor = 1.
- 3) *Tabulating data*. Adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyusunan data dalam tabel-tabel yang mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk dianalisis.

Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dimana analisis itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan data yang didapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data

dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013 maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan Teknik Pengolahan dan Analisis Data sebagai berikut:

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus Korelasi Product Moment :

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana :

r = Koefisien Korelasi Product Moment

$\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan

- ΣX^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- ΣY^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = Jumlah sampel

3.5.2 Uji Reabilitas

Reabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *Realy*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan. Pengujian reabilitas instrument yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam kuisisioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30. Dengan dilakukan uji reabilitas maka akan menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien reabilitas instrument yang dihasilkan lebih besar berarti instrument tersebut memiliki reabilitas yang cukup baik.

Pengujian reabilitas adalah pengujian derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran. Dikatakan reliabel jika nilai $\alpha > r$ tabel.

Rumus Alpha Cronbach

$$r_{ii} = \left[\frac{(K)}{(K-1)} \right] \left[\frac{1 - (\sum si)}{(\sum st)} \right]$$

Keterangan :

r_{i1} = Koefisien Reliabilitas Internal seluruh item

K = banyaknya item

S_i = jumlah varians skor tiap-tiap item

S_t = varians total

3.5.3 Uji t-test (Uji Hipotesis)

Karena uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio, oleh karena data dalam penelitian ini berbentuk interval maka digunakan uji t-test sample, dan menggunakan uji pihak kiri, karena t tabel berada di sebelah kiri t hitung. Uji t-test sampel digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{x - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

t = Nilai t yang dihitung

x = \bar{x} rata-rata

μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan

S = Simpangan baku sampel

n = Jumlah anggota sampel

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh jumlah penduduk di Kota Serang yang terdiri dari 5 (lima) Dapil sebagai responden. Tempat penelitian yaitu di 5

(lima) Daerah Pemilihan di Kota Serang. Adapun waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Waktu Penelitian

Kegiatan	2012			2013						2014-2015				
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Agt	Okt	Feb
Pengajuan Judul	■	■												
Observasi Awal			■											
Revisi Bab I				■	■	■								
Bimbingan				■	■	■	■	■	■	■	■			
Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■			
Sidang Proposal Penelitian												■		
Revisi Proposal Penelitian												■		
Acc Lapangan													■	
Penyebaran Angket												■	■	
Pengumpulan Data												■	■	
Sidang Skripsi														■
Revisi Skripsi														■

Sumber: Peneliti, 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Serang, gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang. Hal tersebut dipaparkan dibawah ini.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Serang

Banten merupakan salah satu provinsi termuda yang ada di Indonesia. Banten berdiri pada tanggal 4 oktober 2000 sesuai dengan UU No 23 tahun 2000, serta dengan luas wilayah 9.1670,70 km² dan populasi totalnya 10.644.030 jiwa dengan kepadatan 1.161,91 km² dari jumlah tersebut ada kenaikan dari tahun ke tahun yang tersebar ke 4 kabupaten dan 4 kota yang berada di Banten. Tingginya jumlah penduduk dari tahun ke tahun karena adanya mobilitas penduduk dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Provinsi Banten. Menyebabkan tingginya kebutuhan lapangan kerja namun itu semua tidak di dukung dengan peningkatan kualitasnya seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, bila faktor-faktor tersebut ditingkatkan maka perekonomian pun akan naik dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Banten. Ironis kiranya, Provinsi yang bisa di bilang cukup dekat dengan Ibu Kota RI namun masih ada masyarakatnya yang hidup terbelakang. Masih banyak yang harus dibenahi di Provinsi Banten mulai dari pemerintahan

provinsi sampai pemerintah kabupaten/kota, salah satunya Kota Serang yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Kota Serang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Serang. Kota Serang harus siap dengan segala aspek masalah yang timbul mulai dari aspek ekonomi, budaya, infrastruktur, dan sosial. Kota Serang harus mampu memobilisasi segala aspek apalagi dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sarana dan prasarana yang belum memadai membuat Kota Serang terlihat belum siap menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten. Namun masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan bila dinas dan instansi yang terkait saling mendukung dalam hal memobilisasi jumlah penduduk yang kian meningkat.

Kota Serang memiliki luas wilayah 266,74 km² serta populasi 501,471 jiwa dan kepadatan 1.880/km² yang terdiri dari 6 Kecamatan, 46 Desa, dan 20 Kelurahan dengan Walikota Tubagus Haerul Zaman. Di sisi lain, Kota Serang merupakan mitra terdepan pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat sewilayah Provinsi Banten. Kota Serang bercitra Banten yang mampu melestarikan khazanah historis, kultural, etnis dan religi yang menyatu ke dalam pola kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun. Kota Serang terletak strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera dan dilintasi jalan negara.

Kota Serang adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Banten. Kota Serang merupakan daerah otonom yang secara yuridis dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2007, secara geografis Kota Serang ini berada pada posisi koordinat $6^{\circ}7'12''\text{LU}$ $106^{\circ}9'1''\text{BT}$ / $6,12^{\circ}\text{LS}$ $106,15028^{\circ}\text{BT}$, dengan luas wilayah sebesar 266.74 km^2 (102.99 mil^2). Kota dengan julukan Kota madani ini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Dahulu Serang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditetapkan sebagai kota otonom pada tanggal 2 November 2007. Kota Serang terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan. Kota Serang terdiri atas:

1. Serang
2. Cipocok Jaya
3. Curug
4. Kasemen
5. Taktakan
6. Walantaka

Batas wilayah sebelah Utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kec. Pontang, Kec. Ciruas dan Kec. Kragilan Kab. Serang, Sebelah Selatan yaitu Kec. Cikeusal, Kec. Petir dan Kec. Baros Kab. Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kec. Pabuaran, Kec. Waringin Kurung dan Kec. Kramatwatu Kab. Serang. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam

lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Adapun peta Kota Serang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Wilayah Administratif Kota Serang

4.1.2 Sejarah DPRD Kota Serang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2009.

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administrasi, yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di provinsi.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di Kabupaten.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota), berkedudukan di Kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.



Gambar 4.2
DPRD Kota Serang

4.1.2.1 Batas Wilayah

Utara : Laut Jawa

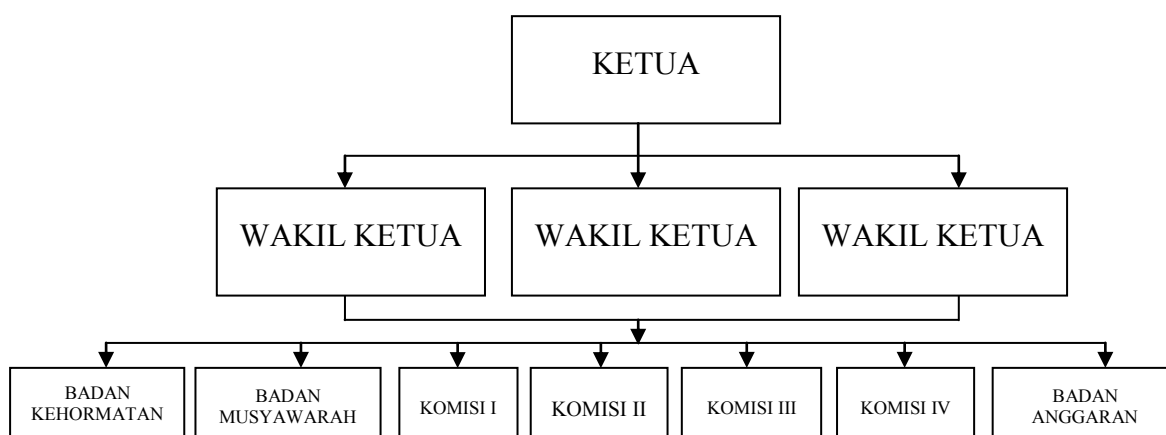
Selatan: Kabupaten Serang

Barat : Kabupaten Serang

Timur : Kabupaten Serang

4.1.2.2 Struktur Organisasi DPRD Kota Serang

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Wakil Ketua
4. Wakil Ketua
5. Badan Kehormatan
6. Badan Musyawarah
7. Komisi I
8. Komisi II
9. Komisi III
10. Komisi IV
11. Badan Anggaran
12. Badan Legislasi Daerah



Bagan 4.1
Struktur Organisasi DPRD Kota Serang

4.1.2.3 Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD yang staffnya terdiri atas pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan kepala daerah atas persetujuan pimpinan DPRD. Sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada daerah melalui Sekretaris daerah. Di bawah ini merupakan daftar anggota dewan yang tergabung dalam Komisi I di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Anggota Dewan Komisi I Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi I
1	Drs. Aminudin
2	Wawan Mulyawan, S.Sos.I
3	Samuti, SE
4	Redi Ismail
5	H. Namin, SH
6	Ujang Syafrudirman, SE
7	H. Rohani
8	Encop Sofia, MA
9	Drs. H. Samsul Bahri, SE
10	Marlan Shafar, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.1 di atas, diketahui jumlah anggota Komisi I di DPRD Kota Serang masa bakti 2009-2014 adalah sebanyak 10 orang yang dipimpin oleh Drs. Aminudin dan wakil ketua adalah Wawan Mulyawan, S.Sos.I serta sekretarisnya adalah Samuti, SE.

Selanjutnya, berikut ini daftar anggota dewan yang tergabung dalam Komisi II di DPRD Kota Serang masa bakti 2009-2014, yaitu:

Tabel 4.2
Daftar Anggota Dewan Komisi II Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi II
1	Ramlan Junaidi, S. Sos
2	H. Moh. Mishari
3	DR. H. Furtasan Ali Yusuf, SE, S. Kom, MM
4	Dra. Muajah
5	ACH. Anis Fuad Bin KH Djawahir
6	H. Junaedi, SE
7	Rizal Azis, SP
8	Siti Suwarini, S. AP
9	Acep Rofiudin
10	Agus Afendi
11	Suradi, SP
12	H. Sahrani, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.2 di atas, diketahui jumlah anggota Komisi II di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 12 orang yang dipimpin oleh Ramlan Junaidi, S.Sos dan wakil ketua adalah H. Moh Mishari serta sekretarisnya adalah Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE, S.Kom., MM.

Daftar anggota dewan Komisi III di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Daftar Anggota Dewan Komisi III Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi III
1	Sukara, S. Kom
2	Agus A Subarli, ST
3	H. Mujib
4	Aan Nurhidayat, Amd. Kom
5	H.M. Abdurahman, SE
6	Euis Rismawati
7	H. Tajudin
8	H. TB. Ali Mursid

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.3, diketahui jumlah anggota Komisi III di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 8 orang yang dipimpin oleh Sukara, S.Kom dan wakil ketua adalah Agus A Subarli, ST serta sekretarisnya adalah H. Mujib.

Daftar anggota dewan Komisi IV di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Daftar Anggota Dewan Komisi IV Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi IV
1	Mahfuzh, SE
2	H. Amanudin Toha
3	Muji Roman, SH
4	Hj. Ratna Komalasari
5	Afiaturrohman, SE
6	Acim Machtar, SE
7	H. Lukman Latief
8	Hj. Munjiah, SE
9	H. Ahmad Rosadi, SE
10	M. Tomi
11	Sam'un

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.4, diketahui jumlah anggota Komisi IV di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Mahfuzh, SE dan wakil ketua adalah H. Amanudin Toha serta sekretarisnya adalah Muji Roman, SH.

Daftar anggota badan anggaran di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Badan Anggaran DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Anggaran
1	Hj. Nur'aeni, S. Sos
2	Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos
3	Bamabang Janoko, SE
4	Iif Fariudin, SE
5	Drs. H. Nanang Sefudin, M. Si
6	H. Amanudin Toha
7	Ramlan Junaidi, S. Sos
8	Samuti, SE
9	Hj. Ratna Komalasari
10	Mahfuzh, SE
11	H. Moh. Mishari
12	Ujang Syafrudirman, SE
13	Encop Sofia, MA
14	Sam'un
15	H. Junaedi, SE
16	Acim Muchtar, SE
17	Afiaturrohman, SE
18	H. Tajudin
19	Acep Rofiudin
20	Sukara, S. Kom
21	Agus Efendi
22	H. M. Aburahman, SE
23	H. ahmad Rosadi, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.5 di atas, diketahui jumlah anggota badan anggaran di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 23 orang yang dipimpin oleh Hj. Nur'aeni, S. Sos dan wakil ketua adalah Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos.

Daftar anggota badan musyawarah di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Musyawarah
1	Hj. Nuraeni, S. Sos
2	Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos
3	Bambang Janoko, SE
4	Iif Fariudin, SE
5	Drs. H. Nanang Sefudin, M. Si
6	H. Amanudin Toha
7	Aan Nurhandiyat, Amd. Kom
8	Samuti, SE
9	Hj. Ratna Komalasari
10	Mahfuzh, SE
11	ACH. Anis Fuad Bin KH Djawahir
12	Suradi, SP
13	M. Tomi
14	Encop Sofia, MA
15	Muji Rohman, SH
16	H. Rohani
17	Drs. Aminudin
18	Agus A Subarli, ST
19	Euis Rismawati
20	Sukara, S. Kom
21	H. Lukman Latief
22	DR. H. Furtasan Ali Yusuf, SE, S. Kom, MM
23	Hj. Munjiah, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.6 di atas, diketahui jumlah anggota badan musyawarah di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 23 orang yang dipimpin oleh Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos dan wakil ketua adalah Bambang Janoko, SE.

Daftar anggota badan legislasi di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Badan Legislasi DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Legislasi
1	Drs. H. Samsul bahri, M. Sj
2	ACH. Anis Fuad Bin KH Djawahir
3	Drs. H. Nanang Sefudin, M. Si
4	Redi Ismail
5	Dra. Muajah
6	H. Mujib
7	Suradi, SP
8	H. Sahrani, SE
9	Rizal Azis, SP
10	Hj. Siti Suwarini, S. AP
11	Wawan Mulyawan, S. Sos
12	Marlan Shafar, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.7 di atas, diketahui jumlah anggota badan legislasi di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Drs. H. Samsul bahri, M. Sj dan wakil ketua adalah ACH. Anis Fuad Bin KH Djawahir.

Daftar anggota badan kehormatan di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Badan Kehormatan DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Kehormatan
1	H. Rohani
2	Dra. Muajah
3	H. naming, SH
4	Sam'un
5	Hj. Mujinah, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2013)

Dari Tabel 4.8, diketahui jumlah anggota badan kehormatan di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 5 orang yang dipimpin oleh H. Rohani dan wakil ketua adalah Dra. Muajah.

Sehubungan dengan adanya pemilihan legislatif (Pileg) pada tahun 2014 khususnya di Kota Serang Propinsi Banten, maka terdapat perubahan susunan daftar anggota dewan di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014. Adapun susunan keanggotaan dewan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Daftar Anggota Dewan Komisi I Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi I
1	H. Moh Mishari, SE
2	Kevin Harinusa, SH., MH
3	Suradi, SP
4	Ir. Halashon Simbolon
5	Ramlan Junaidi, S.Sos
6	Hj. Siti Suwarini, S.AP
7	Drs. Aminudin
8	Jumhadi, S.Ag.
9	H. Iis Ismail
10	Agus Efendi, S.Ip
11	Iyus Gusmana, S.Pd.I

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.9 di atas, diketahui jumlah anggota Komisi I di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 setelah perubahan adalah sebanyak 11

orang yang dipimpin oleh H. Moh Mishari, SE dan wakil ketua adalah Kevin Harinusa, SH., MH serta sekretarisnya adalah Suradi, SP.

Selanjutnya, berikut ini perubahan daftar anggota dewan yang tergabung dalam Komisi II di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014, yaitu:

Tabel 4.10
Daftar Anggota Dewan Komisi II Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi II
1	Ichsan, S.Pd.
2	Dra. Hj. Wahyu Hidayati
3	M. Ali Soerohman
4	Lia Mahdalia, A.Md
5	Jajuli
6	Wahyu Papat Juni Romadonia, SE
7	Roni Alfanto, SE
8	Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
9	Sukara, S.Kom
10	Tb. Ridwan Ahmad, S.Pt
11	Asep Sulaeman

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.10 di atas, diketahui jumlah anggota Komisi II di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Ichsan, S.Pd. dan wakil ketua adalah Dra. Hj. Wahyu Hidayati serta sekretarisnya adalah M. Ali Soerohman.

Perubahan susunan daftar anggota dewan Komisi III di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Daftar Anggota Dewan Komisi III Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi III
1	Hj. Mira Merdianty
2	Ach. Anis Fuad, SE bin KH. Djawahir
3	Samlawi Said
4	H. Eka Suryana
5	Abdul Muhit, MA
6	H. Rohani, SE
7	Hj. Teti Kurnaeti, SE
8	Iif Fariudin, SE
9	H. Uhen Zuhaeni, HZ, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.11, diketahui jumlah anggota Komisi III di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 9 orang yang dipimpin oleh Hj. Mira Merdianty dan wakil ketua adalah Ach. Anis Fuad, SE bin KH. Djawahir serta sekretarisnya adalah Samlawi Said.

Perubahan susunan daftar anggota dewan Komisi IV di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Daftar Anggota Dewan Komisi IV Masa Bhakti 2009-2014

No	Komisi IV
1	H. Namin, SH
2	Ujang Syafrudirman, SE
3	Mochamad Rus'an
4	Firdaus Ghozali, SE
5	H. Tajudin
6	Muji Rohman, SH
7	Prana Rismayandi
8	Dede Rafiudin
9	Dra. Deviana Idris
10	Maryaman, S.Pd.I

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.12, diketahui jumlah anggota Komisi IV di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 10 orang yang dipimpin oleh H. Namin, SH dan wakil ketua adalah H Ujang Syafrudirman, SE serta sekretarisnya adalah Mochamad Rus'an.

Perubahan susunan daftar anggota badan anggaran di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Badan Anggaran DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Anggaran
1	H. Namin, SH
2	H. Moh Mishari, SE
3	Ichsan, S.Pd.
4	Suradi, SP
5	M. Ali Soerohman
6	H. Eka Suryana
7	Mochamad Rus'an
8	Firdaus Ghozali
9	Ramlan Junaidi, S.Sos
10	Wahyu Papat Juni Romadonia, SE
11	Drs. Aminudin
12	Roni Alfanto, SE
13	Prana Rismayandi
14	Drs. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
15	Iif Fariudin, SE
16	Sukara, S.Kom
17	Agus Efendi, S.IP
18	Iyus Gusmana, S.Pd.I

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.13 di atas, diketahui jumlah anggota badan anggaran di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh H. Namin, SH dan wakil ketua adalah H. Moh Mishari, SE.

Perubahan susunan daftar anggota badan musyawarah di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Musyawarah
1	H. Moh Mishari, SE
2	Kevin Harinusa, SH., MH
3	Ichsan, S.Pd.
4	H. Namin, SH
5	Samlawi Said
6	Ir. Halashon Simbolon
7	Lia Mahdalia, A.Md.
8	Jajuli
9	Abdul Muhit, MA
10	Wahyu Papat Juni Romadonia, SE
11	H. Rohani, SE
12	Hj. Siti Suwarini, S.AP
13	Jumhadi, S.Ag.
14	Hj. Teti Kurnaeti, SE
15	Dede Rafiudin
16	Dra. Deviana Idris
17	Maryaman, S.Pd.I
18	Asep Sulaeman

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.14 di atas, diketahui jumlah anggota badan musyawarah di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 18 orang yang dipimpin oleh H. Moh Mishari, SE dan wakil ketua adalah Kevin Harinusa, SH., MH.

Perubahan susunan daftar anggota badan legislasi di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Badan Legislasi DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Legislasi
1	Ach. Anis Fuad, SE bin KH. Djawahir
2	Hj. Mira Merdianty
3	Kevin Harinusa, SH., MH
4	Ujang Syafrudirman, SE
5	H. Eka Suryana
6	Abdul Muhit, MA
7	Muji Rohman, SH
8	Hj. Teti Kurnaeti, SE
9	H. Iis Ismail
10	H. Uhen Zuhaeni, HZ., SE
11	Tb. Ridwan Ahmad, S.Pt

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.15 di atas, diketahui jumlah anggota badan legislasi di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 adalah sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Drs Ach. Anis Fuad, SE bin KH. Djawahir dan wakil ketua adalah Hj. Mira Merdianty.

Perubahan susunan daftar anggota badan kehormatan di DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Badan Kehormatan DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014

No	Badan Kehormatan
1	Samlawi Said
2	Jajuli
3	H. Tajudin
4	Iif Fariudin, SE
5	Asep Sulaeman

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang (2014)

Dari Tabel 4.16, diketahui jumlah anggota badan kehormatan di DPRD Kota Serang masa bakti 2009-2014 adalah sebanyak 5 orang yang dipimpin oleh Samlawi Said dan wakil ketua adalah Jajuli.

4.1.2.4 Fungsi, Tugas Pokok, dan Wewenang DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah.

Fungsi DPRD, yaitu sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Sementara itu, tugas dan wewenang DPRD adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalaui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
5. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

6. Untuk DPRD Kota, pengangkatan/pemberhentian walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
7. Memilih wakil kepala daerah (wakil Gubernur/wakil Walikota/wakil Bupati) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
8. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
12. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
14. DPRD memiliki *hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, penyampaian usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti

orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

4.1.2.5 Keanggotaan DPRD

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

1. Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.
2. Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 4.17 di bawah ini.

Tabel 4.17
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	67	67
2	Perempuan	33	33
Jumlah		100	100

Sumber: Diolah dari data primer (2014)

Data pada Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang yang merupakan responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebesar 81 orang sedangkan perempuan sebanyak 19 orang. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden yang menjadi objek penelitian ini menurut umur ditunjukkan pada Tabel 4.18 di bawah ini.

Tabel 4.18
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	21 s.d. 30 tahun	10	10
2	31 s.d. 40 tahun	35	35
3	41 s.d. 50 tahun	47	47
4	51 s.d. 60 tahun	8	8
Jumlah		100	100

Sumber: Diolah dari data primer (2014)

Tabel 4.18 menunjukkan kebanyakan umur responden berada pada kisaran umur 41 s/d 50 tahun sebesar 47% sedangkan yang terkecil berada pada umur 21 s/d 30 tahun tahun yaitu sebesar 10%. Tingkat usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah usia dewasa.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut pendidikan ditunjukkan pada Tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	1
2	SMP/Sederajat	12	12
3	SMA/Sederajat	52	52
4	D1/D2/D3	30	30
5	S1	5	5
Jumlah		100	100

Sumber: Diolah dari data primer (2014)

Tingkat pendidikan responden yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 52 orang (52%), SMP/ sederajat sebanyak 12 orang (12%), SD sebanyak 1 orang (1%), D1/D2/D3 sebanyak 30 orang (30%), S1 sebanyak 5 orang (25%). Jika dilihat dari tabel di atas sebagian besar responden memiliki latarbelakang pendidikan yang cukup terpelajar dan nampak bahwa responden didominasi oleh lulusan SMU/Sederajat.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Berikut ini ditunjukkan hasil uji validitas instrumen pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang melalui program SPSS 17.00.

Tabel 4.20
Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang

Item	Nilai Korelasi	Kriteria	Validitas
Pert_1	0,693	0,444	Valid
Pert_2	0,848	0,444	Valid
Pert_3	0,819	0,444	Valid
Pert_4	0,650	0,444	Valid
Pert_5	0,877	0,444	Valid

Pert_6	0,760	0,444	Valid
Pert_7	0,709	0,444	Valid
Pert_8	0,694	0,444	Valid
Pert_9	0,645	0,444	Valid
Pert_10	0,774	0,444	Valid
Pert_11	0,910	0,444	Valid
Pert_12	0,916	0,444	Valid
Pert_13	0,715	0,444	Valid
Pert_14	0,899	0,444	Valid
Pert_15	0,675	0,444	Valid
Pert_16	0,701	0,444	Valid
Pert_17	0,939	0,444	Valid
Pert_18	0,686	0,444	Valid
Pert_19	0,871	0,444	Valid
Pert_20	0,946	0,444	Valid
Pert_21	0,806	0,444	Valid
Pert_22	0,824	0,444	Valid
Pert_23	0,718	0,444	Valid
Pert_24	0,681	0,444	Valid
Pert_25	0,734	0,444	Valid
Pert_26	0,781	0,444	Valid
Pert_27	0,716	0,444	Valid
Pert_28	0,791	0,444	Valid
Pert_29	0,782	0,444	Valid
Pert_30	0,891	0,444	Valid
Pert_31	0,899	0,444	Valid
Pert_32	0,956	0,444	Valid
Pert_33	0,864	0,444	Valid
Pert_34	0,746	0,444	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.20, kriteria untuk uji coba instrumen sebesar 0,444 diperoleh dari jumlah responden uji coba sebanyak 20 orang di luar sampel. Apabila nilai korelasi masing-masing butir soal dibandingkan dengan

kriteria uji validitas variabel pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang di atas tampak bahwa nilai korelasi *Product Moment* tiap butir memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang ada pada kuesioner dapat dikatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Berikut ini ditunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang melalui program SPSS 17.00.

Tabel 4.21
Uji Reliabilitas Instrumen Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang

Cronbach's Alpha	N of Items
.957	34

Berdasarkan Tabel 4.21, uji reliabilitas yang menggunakan metode *alpha cronbach* diperoleh nilai alpha sebesar 0,957. Hal ini berarti nilai alpha yang diperoleh adalah lebih besar dari nilai 0,300. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan yang terdapat pada kuesioner penelitian dapat dinyatakan reliabel.

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi, menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) dapat diukur melalui: 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap; 4) perencanaan yang matang; 5) penyusunan program yang tepat; 6) tersedianya sarana dan prasarana; dan 7)

sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Dari ketujuh indikator tersebut, data hasil penelitian berupa tanggapan/respons masyarakat terhadap pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dimaksudkan supaya anggota DPRD Kota Serang dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Memberikan Manfaat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0	0
2	Sering	3	27	81	27
3	Kadang-kadang	2	47	94	47
4	Tidak Pernah	1	26	26	26
Total			100	201	100
Rata-rata		2.01			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 1 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.22, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang respon masyarakat terhadap kegiatan reses memberikan manfaat bagi masyarakat di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 47 orang responden atau 47% dan 26 orang atau 26% tidak pernah mendapat manfaat dari kegiatan reses. Sementara itu,

27 orang atau 27% mendapat manfaat dari kegiatan reses tersebut.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 belum memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Tentang Tujuan Kegiatan Reses
Menyerap dan Menghimpun Aspirasi

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	4	1
2	Sering	3	21	63	21
3	Kadang-kadang	2	54	108	54
4	Tidak Pernah	1	24	24	24
Total			100	199	100
Rata-rata		1.99			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 2 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.23 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tujuan kegiatan reses menyerap dan menghimpun aspirasi, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 54 orang responden atau 54% dan 24 orang atau 24% menyatakan tujuan kegiatan reses tidak pernah menyerap dan menghimpun aspirasi. Sementara itu, 21 orang atau 21% tujuan kegiatan reses dapat menyerap dan menghimpun aspirasi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat masih banyak keluhan

masyarakat yang perlu disampaikan termasuk para penagih janji kampanye wakil rakyat yang tidak terakomodir.

Tabel 4.24
Tanggapan Responden Tentang Tujuan Kegiatan Reses
Menindaklanjuti Aspirasi

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	4	1
2	Sering	3	20	60	20
3	Kadang-kadang	2	52	104	52
4	Tidak Pernah	1	27	27	27
Total			100	195	100
Rata-rata		1.95			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 3 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.24 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tujuan kegiatan reses menindaklanjuti aspirasi, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 52 orang responden atau 52% dan 27 orang atau 27% menyatakan tujuan kegiatan reses tidak menindaklanjuti aspirasi. Sementara itu, 20 orang atau 20% menyatakan tujuan kegiatan reses dapat menyerap dan menghimpun aspirasi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pembangunan masih minim dikarenakan tidak dimaksimalkannya kegiatan reses untuk menyerap aspirasi secara menyeluruh disetiap daerah pemilihan.

Tabel 4.25
Tanggapan Responden Tentang Tujuan Lain
Kegiatan Reses Untuk Pencitraan

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	34	136	34
2	Sering	3	29	87	29
3	Kadang-kadang	2	27	54	27
4	Tidak Pernah	1	10	10	10
Total			100	287	100
Rata-rata		2.87			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 4 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.25 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tujuan lain kegiatan reses untuk pencitraan, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab selalu, yaitu 34 orang responden atau 34% dan 29 orang atau 29% menyatakan tujuan lain kegiatan reses untuk pencitraan. Sementara itu, 27 orang atau 27% menyatakan tujuan lain kegiatan reses bukan untuk pencitraan dan 10 orang atau 10% menyatakan tujuan lain kegiatan reses sama sekali bukan untuk pencitraan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 pada umumnya respons masyarakat berbeda-beda, ada yang beranggapan reses merupakan ajang kampanye terselubung yang dilakukan anggota dewan untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Masyarakat juga beranggapan bahwa reses dilakukan untuk pencitraan diri anggota dewan agar terlihat dan terkesan baik di mata masyarakat.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses
Mengawasi Pembangunan Daerah

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0	0
2	Sering	3	16	48	16
3	Kadang-kadang	2	37	74	37
4	Tidak Pernah	1	47	47	47
Total			100	169	100
Rata-rata		1.69			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 5 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.26 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang tujuan lain kegiatan reses untuk pencitraan, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 47 orang responden atau 47% dan 37 orang atau 37% menyatakan kegiatan reses bukan untuk mengawasi pembangunan daerah. Sementara itu, 16 orang atau 16% menyatakan kegiatan reses untuk mengawasi pembangunan daerah.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 dalam pengawasan pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan untuk sarana dan prasarana rumah ibadah, serta bantuan sosial untuk usaha kecil bagi masyarakat masih kurang pengawasan.

4.4.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan dimaksudkan bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya mencapai

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para anggota DPRD Kota Serang tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.27
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses
Dilaksanakan di Seluruh Daerah Pemilihan

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	6	24	6
2	Sering	3	16	48	16
3	Kadang-kadang	2	44	88	44
4	Tidak Pernah	1	34	34	34
Total			100	194	100
Rata-rata		1.94			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 6 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.27 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses dilaksanakan di seluruh daerah pemilihan, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 44 orang responden atau 44% dan 34 orang atau 34% menyatakan kegiatan reses tidak dilaksanakan di seluruh daerah pemilihan. Sementara itu, 6 orang atau 6% menyatakan kegiatan reses selalu dilaksanakan di seluruh daerah pemilihan dan yang menyatakan kegiatan reses sering dilaksanakan di seluruh daerah pemilihan sebanyak 16 orang atau 16%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses dilakukan di seluruh daerah pemilihan belum terlaksana dan hanya dilakukan pada daerah pemilihan pemenangan suara saja sehingga

penyerapan aspirasi masyarakat tidak merata diseluruh daerah pemilihan.

Tabel 4.28
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses
Menggunakan Konsep Audensi

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	5	20	5
2	Sering	3	23	69	23
3	Kadang-kadang	2	44	88	44
4	Tidak Pernah	1	28	28	28
Total			100	205	100
Rata-rata		2.05			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 7 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.28 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses menggunakan konsep audensi, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 44 orang responden atau 44% dan 28 orang atau 28% menyatakan kegiatan reses tidak menggunakan konsep audensi. Sementara itu, 5 orang atau 5% menyatakan kegiatan reses selalu menggunakan konsep audensi dan yang menyatakan kegiatan reses sering menggunakan konsep audensi sebanyak 23 orang atau 23%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses menggunakan cara audensi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mereka cenderung mendengarkan aspirasi masyarakat dari kelompoknya tanpa mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat daerah pemilihan dikarenakan waktu kegiatan reses yang hanya lima hari tidak

dapat menjangkau seluruh masyarakat di daerah pemilihannya.

Tabel 4.29
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses
Menggunakan Konsep Pintu ke Pintu

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	4	1
2	Sering	3	12	36	12
3	Kadang-kadang	2	39	78	39
4	Tidak Pernah	1	48	48	48
Total			100	166	100
Rata-rata		1.66			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 8 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.29 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses menggunakan konsep pintu ke pintu, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 48 orang responden atau 48% dan 39 orang atau 39% menyatakan kegiatan reses tidak menggunakan konsep pintu ke pintu. Sementara itu, 1 orang atau 1% menyatakan kegiatan reses selalu menggunakan konsep pintu ke pintu dan yang menyatakan kegiatan reses sering menggunakan konsep pintu ke pintu sebanyak 12 orang atau 12%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses menggunakan cara pintu ke pintu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang dimaksud pintu ke pintu adalah anggota dewan datang langsung ke daerah yang membutuhkan bantuan bukan hanya melakukan kunjungan kepada kelompok atau partainya saja tanpa mencari

informasi langsung kepada masyarakat daerah pemilihannya.

Tabel 4.30
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Menyediakan
Bantuan Dalam Bentuk Uang/Barang

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	2	8	2
2	Sering	3	20	60	20
3	Kadang-kadang	2	35	70	35
4	Tidak Pernah	1	43	43	43
Total			100	181	100
Rata-rata		1.81			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 9 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.30 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses menyediakan bantuan dalam bentuk uang/barang, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 43 orang responden atau 43% dan 35 orang atau 35% menyatakan kegiatan reses tidak menyediakan bantuan dalam bentuk uang/barang. Sementara itu, 2 orang atau 2% menyatakan kegiatan reses selalu menyediakan bantuan dalam bentuk uang/barang dan yang menyatakan kegiatan reses sering menyediakan bantuan dalam bentuk uang/barang sebanyak 20 orang atau 20%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses menyediakan bantuan dalam bentuk uang/barang hanya dilakukan pada daerah yang memenangkan suaranya saja. Sementara itu, daerah pemilihan yang lainnya kurang mendapat perhatian dikarenakan janji

yang diberikan anggota dewan sebelum menjadi anggota DPRD Kota Serang kepada masyarakat yang memenangkan suara terbanyak saat pemilihan legislatif di daerah pemilihannya.

Tabel 4.31
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Melakukan Kunjungan Ke RW/RT Setempat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	8	32	8
2	Sering	3	19	57	19
3	Kadang-kadang	2	35	70	35
4	Tidak Pernah	1	38	38	38
Total			100	197	100
Rata-rata		1.97			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 10 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.31 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses melakukan kunjungan ke RW/RT setempat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 38 orang responden atau 38% dan 35 orang atau 35% menyatakan kegiatan reses tidak melakukan kunjungan ke RW/RT setempat. Sementara itu, 8 orang atau 8% menyatakan kegiatan reses selalu melakukan kunjungan ke RW/RT setempat dan yang menyatakan kegiatan reses sering melakukan kunjungan ke RW/RT setempat sebanyak 19 orang atau 19%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang melakukan kunjungan ke RW/RT setempat tidak dilakukan kunjungan tetapi para ketua RW/RT diundang untuk dimintai aspirasinya dan yang

menghadirinya itu biasanya dari kelompok atau partainya mereka sendiri karena dalam pelaksanaan kegiatan reses para ketua RT/RW tidak mendapatkan undangan dari pihak kecamatan yang diberikan oleh anggota dewan yang mengadakan kegiatan reses di daerah pemilihannya.

4.4.3 Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.32
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses
Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0	0
2	Sering	3	19	57	19
3	Kadang-kadang	2	47	94	47
4	Tidak Pernah	1	34	34	34
Total			100	185	100
Rata-rata			1.85		

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 11 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.32 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 47 orang responden atau 47% dan 34 orang atau 34%

menyatakan kegiatan reses tidak pernah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, 19 orang atau 19% menyatakan kegiatan reses sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kebutuhan yang sesuai masyarakat belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini dikarenakan yang menjadi prioritas adalah daerah-daerah yang memperoleh suara terbanyak dan daerah yang mudah terjangkau oleh anggota dewan.

Tabel 4.33
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Memiliki
Program Khusus Sesuai Daerah Pemilihan

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	4	1
2	Sering	3	14	42	14
3	Kadang-kadang	2	58	116	58
4	Tidak Pernah	1	27	27	27
Total			100	189	100
Rata-rata		1.89			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 12 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.33 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses memiliki program khusus sesuai dengan daerah pemilihan, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 58 orang responden atau 58% dan 27 orang atau 27% menyatakan kegiatan reses tidak pernah memiliki program khusus sesuai dengan daerah pemilihan. Sementara itu, 1 orang atau 1% menyatakan

kegiatan reses selalu memiliki program khusus sesuai dengan daerah pemilihan dan yang menyatakan kegiatan reses memiliki program khusus sesuai dengan daerah pemilihan sebanyak 14 orang atau 14%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses memiliki program khusus sesuai daerah pemilihan. Kegiatan reses tidak memiliki program khusus seharusnya dalam kegiatan reses ada program pendidikan politik untuk masyarakat dikarenakan masyarakat Kota Serang belum sepenuhnya memahami politik.

Tabel 4.34
Tanggapan Responden Tentang Hasil Kegiatan Reses
Sudah Terlaksana

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0	0
2	Sering	3	16	48	16
3	Kadang-kadang	2	49	98	49
4	Tidak Pernah	1	35	35	35
Total			100	181	100
Rata-rata		1.81			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 13 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.34 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang hasil kegiatan reses sudah terlaksana, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 49 orang responden atau 49% dan 35 orang atau 35% menyatakan hasil kegiatan reses belum terlaksana. Sementara itu, 16 orang atau 16% menyatakan kegiatan reses hasilnya sudah terlaksana.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang hasil kegiatan reses sudah terlaksana belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena penyerapan aspirasi yang kurang maksimal sehingga rencana pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.35
Tanggapan Responden Tentang Hasil Kegiatan Reses Merumuskan Kebijakan yang Dibutuhkan Masyarakat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	4	1
2	Sering	3	16	48	16
3	Kadang-kadang	2	51	102	51
4	Tidak Pernah	1	32	32	32
Total			100	186	100
Rata-rata		1.86			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 14 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.35 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang hasil kegiatan reses merumuskan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 51 orang responden atau 51% dan 32 orang atau 32% menyatakan hasil kegiatan reses tidak merumuskan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, 1 orang atau 1% menyatakan hasil kegiatan reses selalu merumuskan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat dan yang menyatakan hasil kegiatan reses sering merumuskan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat sebanyak 16 orang atau 16%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang hasil kegiatan reses merumuskan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat belum maksimal karena masih sedikitnya peraturan daerah yang dihasilkan dari kegiatan reses.

4.4.4 Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya dimaksudkan memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh anggota DPRD Kota Serang di masa depan. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.36
Tanggapan Responden Tentang Anggota DPRD Memberikan Pengumuman Terkait Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	4	1
2	Sering	3	15	45	15
3	Kadang-kadang	2	29	58	29
4	Tidak Pernah	1	55	55	55
Total			100	162	100
Rata-rata		1.62			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 15 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.36 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang anggota DPRD memberikan pengumuman terkait kegiatan reses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 55 orang responden atau 55% dan 29 orang atau 29%

menyatakan anggota DPRD tidak pernah memberikan pengumuman terkait kegiatan reses. Sementara itu, 1 orang atau 1% menyatakan anggota DPRD sering memberikan pengumuman terkait kegiatan reses dan yang menyatakan anggota DPRD sering memberikan pengumuman terkait kegiatan reses sebanyak 15 orang atau 15%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang anggota DPRD memberikan pengumuman terkait kegiatan reses tidak pernah dilakukan karena pengumuman kegiatan reses hanya diberikan dalam rapat paripurna yang dihadiri SKPD.

Tabel 4.37
Tanggapan Responden Tentang Anggota DPRD Mensosialisasikan Pentingnya Kegiatan Reses Kepada Masyarakat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	12	3
2	Sering	3	5	15	5
3	Kadang-kadang	2	38	76	38
4	Tidak Pernah	1	54	54	54
Total			100	157	100
Rata-rata			1.57		

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 16 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.37 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang anggota DPRD mensosialisasikan pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 54 orang responden atau 54% dan 38 orang atau 38% menyatakan anggota DPRD kadang-kadang mensosialisasikan

pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat. Sementara itu, 3 orang atau 3% menyatakan anggota DPRD selalu mensosialisasikan pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat dan yang menyatakan anggota DPRD sering mensosialisasikan pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat sebanyak 5 orang atau 5%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang anggota DPRD mensosialisasikan pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat tidak pernah dilakukan kepada masyarakat daerah pemilihan karena anggota dewan jarang melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat dan tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan reses dalam pembangunan daerah.

Tabel 4.38
Tanggapan Responden Tentang Anggota DPRD Membuat
Agenda Sesuai Kebutuhan Masyarakat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	7	28	7
2	Sering	3	10	30	10
3	Kadang-kadang	2	39	78	39
4	Tidak Pernah	1	44	44	44
Total			100	180	100
Rata-rata		1.8			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 17 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.38 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang anggota DPRD membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden

menjawab tidak pernah, yaitu 44 orang responden atau 44% dan 39 orang atau 39% menyatakan anggota DPRD kadang-kadang membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, 7 orang atau 7% menyatakan anggota DPRD selalu membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat dan yang menyatakan anggota DPRD sering membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat sebanyak 10 orang atau 10%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang anggota DPRD membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat belum pernah ada penjadwalan karena dalam kegiatan reses anggota dewan tidak memiliki agenda kegiatan reses dalam pelaksanaannya dan terkadang kegiatan reses diadakan tanpa pemberitahuan.

Tabel 4.39
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengetahui
Jadwal Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	8	32	8
2	Sering	3	14	42	14
3	Kadang-kadang	2	39	78	39
4	Tidak Pernah	1	39	39	39
Total			100	191	100
Rata-rata		1.91			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 18 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.39 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang masyarakat mengetahui jadwal kegiatan reses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 39

orang responden atau 39% dan 39 orang atau 39% menyatakan masyarakat kadang-kadang mengetahui jadwal kegiatan reses. Sementara itu, 8 orang atau 8% menyatakan masyarakat selalu mengetahui jadwal kegiatan reses dan yang menyatakan masyarakat sering mengetahui jadwal kegiatan reses sebanyak 14 orang atau 14%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang masyarakat mengetahui jadwal kegiatan reses pada umumnya masyarakat tidak mengetahuinya dan tidak ada jadwal meskipun ada hanya dilakukan pada daerah-daerah yang mudah terjangkau dan daerah tempat tinggal anggota dewan.

4.4.5 Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.40
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Dihadiri
Perwakilan dari RT dan RW

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	7	28	7
2	Sering	3	21	63	21
3	Kadang-kadang	2	46	92	46
4	Tidak Pernah	1	26	26	26
Total			100	209	100
Rata-rata		2.09			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 19 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.40 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses dihadiri perwakilan dari RT dan RW, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 46 orang responden atau 46% dan 26 orang atau 26% menyatakan kegiatan reses tidak dihadiri perwakilan dari RT dan RW. Sementara itu, 7 orang atau 7% menyatakan kegiatan reses selalu dihadiri perwakilan dari RT dan RW dan yang menyatakan kegiatan reses sering dihadiri perwakilan dari RT dan RW sebanyak 21 orang atau 21%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses dihadiri oleh perwakilan dari RT/RW tidak pernah mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan reses tersebut sehingga hanya beberapa yang menghadiri kegiatan reses dan terkadang yang menghadiri kegiatan reses hanya kader partai anggota dewan tersebut.

Tabel 4.41
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat
Terbantu Adanya Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	10	40	10
2	Sering	3	13	39	13
3	Kadang-kadang	2	42	84	42
4	Tidak Pernah	1	35	35	35
Total			100	198	100
Rata-rata		1.98			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 20 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.41 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang masyarakat terbantu dengan adanya kegiatan reses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 42 orang responden atau 42% dan 35 orang atau 35% menyatakan masyarakat tidak pernah terbantu dengan adanya kegiatan reses. Sementara itu, 10 orang atau 10% menyatakan masyarakat selalu terbantu dengan adanya kegiatan reses dan yang menyatakan masyarakat sering terbantu dengan adanya kegiatan reses sebanyak 13 orang atau 13%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang masyarakat terbantu dengan adanya kegiatan reses mayoritas masyarakat tidak merasakan adanya bantuan dari kegiatan reses.

Tabel 4.42
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses
Memenuhi Harapan Masyarakat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	12	3
2	Sering	3	19	57	19
3	Kadang-kadang	2	26	52	26
4	Tidak Pernah	1	52	52	52
Total			100	173	100
Rata-rata		1.73			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 21 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.42 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses memenuhi harapan masyarakat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 52 orang responden atau 52% dan 26 orang atau 26% menyatakan kegiatan reses kadang-kadang memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, 3 orang atau 3% menyatakan kegiatan reses selalu memenuhi harapan masyarakat dan yang menyatakan kegiatan reses sering memenuhi harapan masyarakat sebanyak 19 orang atau 19%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses memenuhi harapan masyarakat dapat dikatakan tidak memenuhi harapan masyarakat karena dari kegiatan reses proses pembangunan di daerah belum maksimal dan bantuan-bantuan belum merata dirasakan masyarakat.

Tabel 4.43
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Terwakili
Kepentingannya

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	16	4
2	Sering	3	22	66	22
3	Kadang-kadang	2	36	72	36
4	Tidak Pernah	1	38	38	38
Total			100	192	100
Rata-rata		1.92			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 22 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.43 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang masyarakat terwakili kepentingannya, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 38 orang responden atau 38% dan 36 orang atau 36% menyatakan masyarakat kadang-kadang terwakili kepentingannya. Sementara itu, 4 orang atau 4% menyatakan masyarakat selalu terwakili kepentingannya dan yang menyatakan masyarakat sering terwakili kepentingannya sebanyak 22 orang atau 22%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang masyarakat terwakili kepentingannya belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah pemilihannya karena belum meratanya penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses.

Tabel 4.44
Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Reses Dinantikan Masyarakat

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	22	88	22
2	Sering	3	26	78	26
3	Kadang-kadang	2	32	64	32
4	Tidak Pernah	1	20	20	20
Total			100	250	100
Rata-rata		2.5			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 23 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.44 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses dinantikan masyarakat, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 32 orang responden atau 32% dan 20 orang atau 20% menyatakan kegiatan reses tidak pernah dinantikan masyarakat. Sementara itu, 22 orang atau 22% menyatakan kegiatan reses selalu dinantikan masyarakat dan yang menyatakan kegiatan reses sering dinantikan masyarakat sebanyak 26 orang atau 26%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang kegiatan reses dinantikan masyarakat, pada umumnya masyarakat sangat menantikan adanya kegiatan reses di tiap-tiap daerahnya karena diharapkan dengan adanya kegiatan reses seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodir.

4.4.6 Tersedianya Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana, dimaksudkan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh anggota DPRD Kota Serang. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.45
Tanggapan Responden Tentang Lokasi Kegiatan Reses Mudah Diakses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	7	28	7
2	Sering	3	24	72	24
3	Kadang-kadang	2	38	76	38
4	Tidak Pernah	1	31	31	31
Total			100	207	100
Rata-rata		2.07			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 24 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.45 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang lokasi kegiatan reses mudah diakses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 38 orang responden atau 38% dan 31 orang atau 31% menyatakan lokasi kegiatan reses tidak mudah diakses. Sementara itu, 7 orang atau 7% menyatakan lokasi kegiatan reses selalu mudah diakses dan yang menyatakan lokasi kegiatan reses sering mudah diakses sebanyak 24 orang atau 24%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang lokasi kegiatan reses mudah diakses sebagian besar masyarakat sulit

untuk mengakses lokasi kegiatan reses tersebut karena terkadang lokasi kegiatan reses jauh dari rumah masyarakat yang harus menghadiri kegiatan reses dan seharusnya anggota dewan yang mendatangi masyarakat secara langsung.

Tabel 4.46
Tanggapan Responden Tentang DPRD Kota Serang Menyediakan Sarana Kritik dan Saran Via Telepon

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	12	3
2	Sering	3	2	6	2
3	Kadang-kadang	2	31	62	31
4	Tidak Pernah	1	64	64	64
Total			100	144	100
Rata-rata		1.44			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 25 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.46 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang DPRD Kota Serang menyediakan sarana kritik dan saran via telepon, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 64 orang responden atau 64% dan 31 orang atau 31% menyatakan DPRD Kota Serang kadang-kadang menyediakan sarana kritik dan saran via telepon. Sementara itu, 3 orang atau 3% menyatakan DPRD Kota Serang selalu menyediakan sarana kritik dan saran via telepon dan yang menyatakan DPRD Kota Serang sering menyediakan sarana kritik dan saran via telepon sebanyak 2 orang atau 2%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014

tentang DPRD Kota Serang menyediakan sarana kritik dan saran via telepon yang dirasakan masyarakat pada umumnya tidak tersedia karena beberapa anggota dewan tidak merespon keluhan masyarakat via telepon.

Tabel 4.47
Tanggapan Responden Tentang Dalam Kegiatan Reses
Menyediakan Sarana Tenda/Ruangan

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	8	32	8
2	Sering	3	28	84	28
3	Kadang-kadang	2	33	66	33
4	Tidak Pernah	1	31	31	31
Total			100	213	100
Rata-rata		2.13			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 26 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.47 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang kegiatan reses menyediakan sarana tenda/ruangan, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 33 orang responden atau 33% dan 31 orang atau 31% menyatakan kegiatan reses tidak pernah menyediakan sarana tenda/ruangan. Sementara itu, 8 orang atau 8% menyatakan kegiatan reses selalu menyediakan sarana tenda/ruangan dan yang menyatakan kegiatan reses sering menyediakan sarana tenda/ruangan sebanyak 28 orang atau 28%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang dalam kegiatan reses menyediakan sarana tenda/ruangan pada umumnya tidak tersedia karena yang menyediakan fasilitas tersebut biasanya

dari pihak kecamatan atau kelurahan.

Tabel 4.48
Tanggapan Responden Tentang Dalam Kegiatan Reses
Menyediakan Kuisisioner/Angket

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	16	4
2	Sering	3	12	36	12
3	Kadang-kadang	2	37	74	37
4	Tidak Pernah	1	47	47	47
Total			100	173	100
Rata-rata		1.73			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 27 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.48 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang dalam kegiatan reses menyediakan kuisisioner/angket, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 47 orang responden atau 47% dan 37 orang atau 37% menyatakan dalam kegiatan reses kadang-kadang menyediakan kuisisioner/angket. Sementara itu, 4 orang atau 4% menyatakan dalam kegiatan reses selalu menyediakan kuisisioner/angket dan yang menyatakan dalam kegiatan reses sering menyediakan kuisisioner/angket sebanyak 12 orang atau 12%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang dalam kegiatan reses menyediakan angket/kuisisioner pada umumnya tidak tersedia karena dalam kegiatan reses masyarakat langsung berbicara tentang permasalahan di daerahnya tanpa mengisi angket/kuisisioner.

Tabel 4.49
Tanggapan Responden Tentang Dalam Kegiatan Reses
Menyediakan Modul/Materi

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0	0
2	Sering	3	6	18	6
3	Kadang-kadang	2	38	76	38
4	Tidak Pernah	1	56	56	56
Total			100	150	100
Rata-rata		1.5			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 28 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.49 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang dalam kegiatan reses menyediakan modul/materi, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 56 orang responden atau 56% dan 38 orang atau 38% menyatakan dalam kegiatan reses kadang-kadang menyediakan modul/materi. Sementara itu, 6 orang atau 6% menyatakan dalam kegiatan reses sering menyediakan modul/materi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang dalam kegiatan reses menyediakan materi pada umumnya tidak tersedia karena biasanya anggota dewan langsung mengadakan tanya jawab kepada masyarakat.

4.4.7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dimaksudkan mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Adapun hasil tanggapan/respons masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.50
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengadukan Anggota DPRD yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses Kepada Badan Kehormatan

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	12	3
2	Sering	3	7	21	7
3	Kadang-kadang	2	28	56	28
4	Tidak Pernah	1	62	62	62
Total			100	151	100
Rata-rata			1.51		

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 29 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.50 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang masyarakat mengadukan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada badan kehormatan, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 62 orang responden atau 62% dan 28 orang atau 28% menyatakan masyarakat kadang-kadang mengadukan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada badan kehormatan. Sementara itu, 3 orang atau 3% menyatakan masyarakat selalu mengadukan anggota DPRD yang tidak melaksanakan

kegiatan reses kepada badan kehormatan dan yang menyatakan masyarakat sering mengadakan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada badan kehormatan sebanyak 7 orang atau 7%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang mengadakan anggota DPRD yang tidak melakukan kegiatan reses kepada badan kehormatan pada umumnya masyarakat tidak melakukannya karena masyarakat tidak mengetahui caranya melaporkan anggota dewan yang tidak melakukan kegiatan reses.

Tabel 4.51
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengadakan Anggota DPRD yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses Kepada Partai Politiknya

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	12	3
2	Sering	3	8	24	8
3	Kadang-kadang	2	28	56	28
4	Tidak Pernah	1	61	61	61
Total			100	153	100
Rata-rata		1.53			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 30 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.51 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang masyarakat mengadakan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada partai politikanya, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 61 orang responden atau 61% dan 28 orang atau 28% menyatakan masyarakat kadang-

kadang mengadakan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada partai politiknya. Sementara itu, 3 orang atau 3% menyatakan masyarakat selalu mengadakan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada partai politiknya dan yang menyatakan masyarakat sering mengadakan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses kepada partai politiknya sebanyak 8 orang atau 8%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang mengadakan anggota DPRD yang tidak melakukan kegiatan reses kepada partai politiknya pada umumnya masyarakat tidak melakukannya karena masyarakat takut mengadakan anggota dewan yang tidak melakukan kegiatan reses kepada partai politik pengusungnya dan masyarakat berfikir partainya pasti membela anggota dewan tersebut.

Tabel 4.52
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengawasi Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0	0
2	Sering	3	13	39	13
3	Kadang-kadang	2	44	88	44
4	Tidak Pernah	1	43	43	43
Total			100	170	100
Rata-rata		1.7			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 31 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.52 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang masyarakat mengawasi kegiatan reses, di mana dari 100

orang responden, mayoritas responden menjawab kadang-kadang, yaitu 44 orang responden atau 44% dan 43 orang atau 43% menyatakan masyarakat kadang-kadang mengawasi kegiatan reses. Sementara itu, 13 orang atau 13% menyatakan masyarakat sering mengawasi kegiatan reses.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang mengawasi kegiatan reses pada umumnya masyarakat tidak melakukannya karena ketidakpedulian masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

Tabel 4.53
Tanggapan Responden Tentang Partai Politiknya
Mengawasi Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	8	32	8
2	Sering	3	10	30	10
3	Kadang-kadang	2	29	58	29
4	Tidak Pernah	1	53	53	53
Total			100	173	100
Rata-rata		1.73			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 32 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.53 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang partai politiknya mengawasi kegiatan reses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 53 orang responden atau 53% dan 29 orang atau 29% menyatakan partai politiknya kadang-kadang mengawasi kegiatan reses. Sementara itu, 8 orang atau 8% menyatakan partai politiknya selalu mengawasi kegiatan reses dan

yang menyatakan partai politiknya sering mengawasi kegiatan reses sebanyak 10 orang atau 10%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang mengawasi kegiatan reses pada umumnya partai politik tidak mengawasinya karena anggota dewan sebelum mengadakan kegiatan reses akan mengadakan rapat dengan pihak partai.

Tabel 4.54
Tanggapan Responden Tentang Adanya Pembangunan daerah yang dikunjungi Anggota DPRD pada Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	6	24	6
2	Sering	3	11	33	11
3	Kadang-kadang	2	37	74	37
4	Tidak Pernah	1	46	46	46
Total			100	177	100
Rata-rata		1.77			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 33 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.54 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang adanya pembangunan daerah yang dikunjungi anggota DPRD pada kegiatan reses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 46 orang responden atau 46% dan 37 orang atau 37% menyatakan kadang-kadang adanya kunjungan anggota DPRD pada kegiatan reses. Sementara itu, 6 orang atau 6% menyatakan selalu adanya kunjungan anggota DPRD pada kegiatan reses dan yang menyatakan sering adanya kunjungan anggota DPRD pada kegiatan reses sebanyak 11

orang atau 11%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014 tentang adanya pembangunan daerah yang dikunjungi anggota DPRD pada kegiatan reses pada umumnya tidak ada kunjungan karena anggota dewan sibuk dalam kegiatan persidangan DPRD Kota Serang.

Tabel 4.55
Tanggapan Responden Tentang Adanya Evaluasi Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (F)	F.X	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	12	3
2	Sering	3	25	75	25
3	Kadang-kadang	2	32	64	32
4	Tidak Pernah	1	40	40	40
Total			100	191	100
Rata-rata		1.91			

Sumber: Diolah dari Kuesioner Pernyataan No. 34 (2014)

Berdasarkan Tabel 4.55 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang adanya evaluasi kegiatan reses, di mana dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah, yaitu 40 orang responden atau 40% dan 32 orang atau 32% menyatakan kadang-kadang melakukan evaluasi kegiatan reses. Sementara itu, 3 orang atau 3% menyatakan selalu adanya evaluasi kegiatan reses dan yang menyatakan sering adanya evaluasi kegiatan reses sebanyak 25 orang atau 25%.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Serang Propinsi Banten masa bhakti 2009-2014

tentang adanya evaluasi kegiatan reses pada umumnya tidak ada evaluasi. Hal ini dari tahun ke tahun tidak adanya evaluasi dari kegiatan reses sehingga kegiatan reses tidak maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dari ketujuh indikator efektivitas di atas tentang pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 dapat direkapitulasi seperti pada Tabel 4.56.

Tabel 4.56
Rekapitulasi Tanggapan Responden Atas Kegiatan Reses

No.	Tanggapan Responden	Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase (%)
1	Kegiatan Reses Memberikan Manfaat	2,01	50,25
2	Tujuan Kegiatan Reses Menyerap dan Menghimpun Aspirasi	1,99	49,75
3	Tujuan Kegiatan Reses Menindaklanjuti Aspirasi	1,95	48,75
4	Tujuan Lain Kegiatan Reses Untuk Pencitraan	2,87	71,75
5	Kegiatan Reses Mengawasi Pembangunan Daerah	1,69	42,25
Rata-rata Persentase Indikator 1			52,55
6	Kegiatan Reses Dilaksanakan di Seluruh Daerah Pemilihan	1,94	48,5
7	Kegiatan Reses Menggunakan Konsep Audensi	2,05	51,25
8	Kegiatan Reses Menggunakan Konsep Pintu ke Pintu	1,66	41,5
9	Kegiatan Reses Menyediakan Bantuan Dalam Bentuk Uang/Barang	1,81	45,25
10	Kegiatan Reses Melakukan Kunjungan Ke RW/RT Setempat	1,97	49,25
Rata-rata Persentase Indikator 2			47,15
11	Kegiatan Reses Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat	1,85	46,25

12	Kegiatan Reses Memiliki Program Khusus Sesuai Daerah Pemilihan	1,89	47,25
13	Hasil Kegiatan Reses Sudah Terlaksana	1,81	45,25
14	Hasil Kegiatan Reses Merumuskan Kebijakan yang Dibutuhkan Masyarakat	1,86	46,5
Rata-rata Persentase Indikator 3			46,31
15	Anggota DPRD Memberikan Pengumuman Terkait Kegiatan Reses	1,62	40,5
16	Anggota DPRD Mensosialisasikan Kegiatan Reses Kepada Masyarakat	1,57	39,25
17	Anggota DPRD Membuat Agenda Sesuai Kebutuhan Masyarakat	1,8	45
18	Masyarakat Mengetahui Jadwal Kegiatan Reses	1,91	47,75
Rata-rata Persentase Indikator 4			43,13
19	Kegiatan Reses Dihadiri Perwakilan dari RT dan RW	2,09	52,25
20	Masyarakat Terbantu Adanya Kegiatan Reses	1,98	49,5
21	Kegiatan Reses Memenuhi Harapan Masyarakat	1,73	43,25
22	Masyarakat Terwakili Kepentingannya	1,92	48
23	Kegiatan Reses Dinantikan Masyarakat	2,5	62,5
Rata-rata Persentase Indikator 5			51,10
24	Lokasi Kegiatan Reses Mudah Diakses	2,07	51,75
25	DPRD Kota Serang Menyediakan Sarana Kritik dan Saran Via Telepon	1,44	36
26	Dalam Kegiatan Reses Menyediakan Sarana Tenda/Ruangan	2,13	53,25
27	Dalam Kegiatan Reses Menyediakan Kuisisioner/Angket	1,73	43,25
28	Dalam Kegiatan Reses Menyediakan Modul/Materi	1,5	37,5
Rata-rata Persentase Indikator 6			44,35

29	Masyarakat Mengadukan Anggota DPRD yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses Kepada Badan Kehormatan	1,51	37,75
30	Masyarakat Mengadukan Anggota DPRD yang Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses Kepada Partai Politiknya	1,53	38,25
31	Masyarakat Mengawasi Kegiatan Reses	1,7	42,5
32	Partai Politiknya Mengawasi Kegiatan Reses	1,73	43,25
33	Adanya Kunjungan Anggota DPRD pada Kegiatan Reses	1,77	44,25
34	Adanya Evaluasi Kegiatan Reses	1,91	47,75
Rata-rata Persentase Indikator 7			42,29
Rata-rata Persentase Total		1,88	46,68

Sumber: Diolah dari data primer (2014)

Tabel 4.56 di atas yang merupakan rekapitulasi dari 34 sub indikator yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rekapitulasi sebesar 46,68%.

Selanjutnya, secara lebih rinci efektivitas pelaksana masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 2,10. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai pada masa reses kurang jelas.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 1,89. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan pada masa reses tidak jelas.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap diperoleh rata-rata

tanggapan responden sebesar 1,85. Hal ini menunjukkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap pada masa reses kurang memadai.

4. Perencanaan yang matang diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 1,73. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang pada masa reses kurang matang.
5. Penyusunan program yang tepat diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 2,04. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program pada masa reses kurang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 1,77. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana pada masa reses kurang memadai.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 1,69. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian pada masa reses kurang pengawasan.

4.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Serang kurang baik atau $\leq 65\%$ dari kriteria yang diharapkan. Adapun perhitungan uji hipotesis adalah sebagai berikut.

Berdasarkan tanggapan responden, diketahui rata-rata pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Serang (\bar{x}) = 46,68, nilai yang dihipotesiskan $\mu_0 = 65$, dan jumlah anggota sampel $n = 100$. Selanjutnya untuk mengetahui

besarnya simpangan baku, dilakukan perhitungan dengan bantuan program excel, yaitu sebesar 6,97. Oleh karena itu, dapat diketahui besarnya t_{hitung} melalui perhitungan berikut ini.

$$t = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \right|$$

$$t = \left| \frac{46,68 - 65}{\frac{6,97}{\sqrt{100}}} \right|$$

$$t = \left| \frac{-18,32}{\frac{6,97}{10}} \right|$$

$$t = \left| \frac{-18,32}{0,697} \right|$$

$$t = |-26,28|$$

$$t = 26,28$$

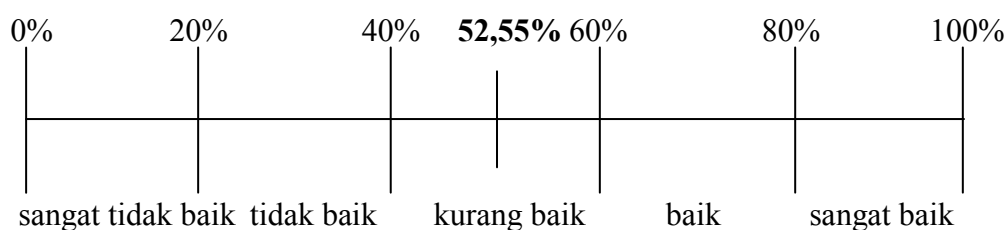
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t_{hitung} melalui uji *one-sample test* adalah sebesar 26,28 dengan derajat kebebasan (df) = 34 - 1 = 33. Sementara itu, t_{tabel} dapat diketahui berdasarkan df = 33 pada taraf kepercayaan 5% adalah sebesar 2,035. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (26,28 < 2,035), maka hipotesis yang diajukan adalah efektivitas pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang $\leq 65\%$ dari kriteria yang diharapkan dapat diterima.

4.6 Pembahasan

Dalam pembahasan ini dibahas tentang efektivitas pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013. Efektivitas suatu organisasi menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) dapat diukur melalui tujuh indikator, yaitu: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Dari ketujuh indikator tersebut, pembahasan hasil penelitian dapat dideskripsikan masing-masing indikator sebagai berikut.

4.6.1 Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dimaksudkan supaya anggota dewan dalam pelaksanaan masa reses mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai kejelasan tujuan yang hendak dicapai yang terdiri dari 5 pernyataan diketahui rata-rata persentasinya adalah sebesar 52,55%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.

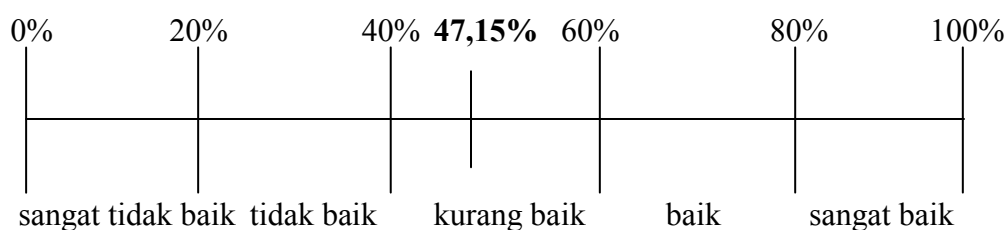


Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2014 termasuk kategori

kurang baik. Hal ini disebabkan waktu pelaksanaan reses yang terbatas, di mana waktu reses yang diberikan waktu selama 5 hari pada hari/jam kerja dan hanya dilakukan kepada partai yang mengusungnya atau basis masa yang menjadi prioritas sehingga sebagian besar masyarakat (konstituen) tidak diikutsertakan dalam kegiatan reses tersebut.

4.6.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dimaksudkan bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para anggota dewan dalam melaksanakan reses tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai kejelasan strategi pencapaian tujuan yang terdiri dari 5 pernyataan diketahui rata-rata persentasenya adalah sebesar 47,15%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.

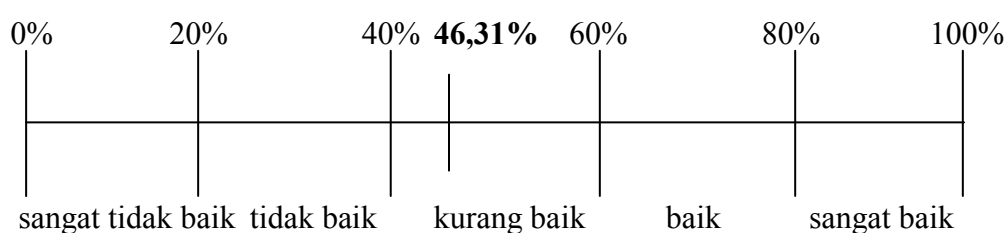


Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan anggota DPRD Kota Serang melakukan kegiatan reses hanya daerah pemilihan tertentu saja atau daerah pemenangan

dalam pemilu sehingga konsep audiensi dan pintu ke pintu dalam menyerap aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik. Sementara itu, anggota dewan belum melakukan kunjungan keseluruhan tempat-tempat RW/RT di masing-masing daerah pemilihan.

4.6.3 Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap yang terdiri dari 4 pernyataan diketahui rata-rata persentasenya adalah sebesar 46,31%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.

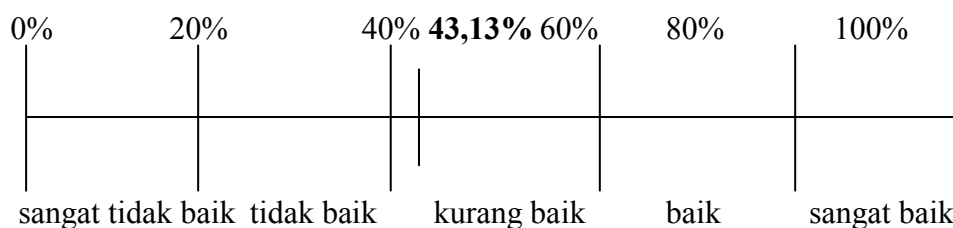


Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan anggota DPRD Kota Serang belum memiliki format baku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan reses sehingga hasil aspirasi masyarakat (konstituen) tidak dapat ditindaklanjuti

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan yang digunakan lebih banyak dari badan eksekutif dibanding dari hasil kegiatan reses.

4.6.4 Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai perencanaan yang matang yang terdiri dari 4 pernyataan diketahui rata-rata persentasinya adalah sebesar 43,13%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.

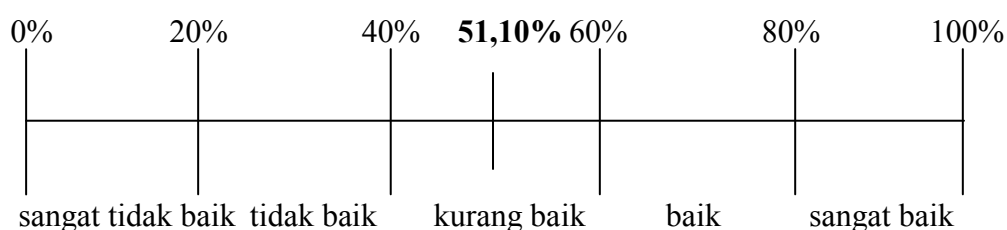


Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan anggota DPRD Kota Serang tidak memberikan pengumuman secara resmi terkait kegiatan reses kepada pihak kecamatan maupun kelurahan sehingga untuk mensosialisasikannya masyarakat pada umumnya tidak mengetahui jadwal kegiatan reses tersebut.

4.6.5 Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai penyusunan program yang tepat yang terdiri dari 5 pernyataan diketahui rata-rata persentasinya adalah sebesar 51,10%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.

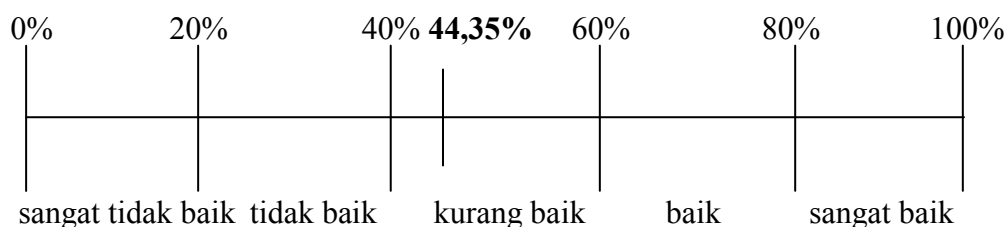


Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan informasi tentang program kegiatan reses hanya diketahui oleh sebagian besar dari partai yang mendukungnya sedangkan masyarakat (konstituen) pada umumnya tidak mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan reses tersebut.

4.6.6 Tersedianya Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari 5 pernyataan diketahui rata-rata persentasinya adalah sebesar

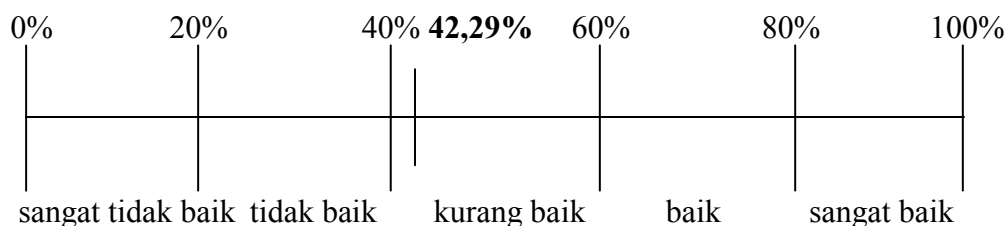
44,35%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.



Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti modul atau materi terkait kegiatan reses, kuisisioner/angket untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, serta tidak ada respon jika mengirim kritik dan saran via telepon. Sementara itu, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia hanya menyediakan tenda atau ruangan yang kapasitasnya terbatas, yaitu hanya untuk 40 orang untuk satu hari kegiatan reses.

4.6.7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Menurut 100 responden terkait pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 mengenai system pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik yang terdiri dari 6 pernyataan diketahui rata-rata persentasinya adalah sebesar 42,29%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat interpretasi skor sebagai berikut.



Berdasarkan interpretasi skor di atas, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 termasuk kategori kurang baik. Hal ini disebabkan Badan Kehormatan yang berfungsi sebagai badan yang mengawasi kinerja anggota dewan tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik dikarenakan anggota dari badan hormatan tersebut adalah anggota dewan itu sendiri sehingga tidak adanya keseimbangan dalam pengawasan kegiatan reses.

4.7 Hasil Kegiatan Reses

1. Tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung lokasi wisata bahari dan wisata sejarah di Banten lama, masyarakat juga mengharapkan pembuatan kampung budaya di wilayah yang memiliki cagar budaya agar menarik bagi wisatawan, selain tempat wisata ziarah yang sudah ada dan menjadi kebanggaan bagi warga Kota Serang, masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah melakukan pembenahan dan penataan di kawasan banten lama karena sampai saat ini kawasan tersebut masih kurang pengelolaannya dan adanya pembinaan terhadap adat bugis di kecamatan kasemen dan adat-adat di Kota Serang . Oleh karna itu di buat Perda No 4 Tahun 2013 Tentang

Pelestarian Kebudayaan Daerah agar pengelolaan cagar budaya, adat istiadat dan tempat wisata sejarah dapat dikelola dengan baik.

2. Tuntutan masyarakat agar pemerintah kota Serang membuka lapangan pekerjaan mengingat setiap tahun angkatan kerja semakin bertambah, masyarakat pun mengharapkan adanya program pengembangan ekonomi kerakyatan dan adanya bantuan untuk kelompok usaha kecil atau usaha bersama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, masyarakat mengharapkan kepada pemerintah Kota Serang agar memperhatikan dengan serius untuk kemudahan dan akses dalam mendapatkan pekerjaan, masyarakat mengharapkan agar adanya pelatihan bagi generasi muda yang potensinya dapat disalurkan karena masih banyak masyarakat Kota Serang yang belum bekerja, hal ini dapat dikoordinasikan dengan BLKI yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi. Oleh karena itu di buat Perda No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan agar pengembangan dan pelatihan terhadap angkatan kerja semakin baik sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Kota Serang.
3. Tuntutan masyarakat untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana posyandu sebagai ujung tombak kesehatan dan pemberdayaan ibu dan anak di seluruh wilayah Kota Serang, masyarakat memohon kepada pemerintah Kota Serang untuk mengatasi tingkat kemiskinan pada masyarakat Kota Serang agar diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan terhadap ibu dan anak yang di sebabkan oleh kesenjangan ekonomi, masyarakat mengharapkan adanya pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi Oleh karena itu di buat Perda No

7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan agar anak dan perempuan dapat terlindungi dan mendapatkan hak dan kewajibannya.

4. Tututan masyarakat Kota Serang meminta agar honor pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) mohon diperhatikan, karang taruna di Kota Serang juga mengahrapkan adanya bantuan tempat untuk kesekretariatan karang taruna di Kota Serang, masyarakat Kota Serang Khususnya para ketua RT dan RW meminta agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehubungan dengan beban kerja yang sangat berat di tengah masyarakat, Oleh karna itu di buat Perda No 8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan agar mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa / Kelurahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka simpulan penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 Tahun 2013, rata-rata tanggapan responden diketahui: kejelasan tujuan yang hendak dicapai pada masa reses kurang jelas; kejelasan strategi pencapaian tujuan pada masa reses tidak jelas; proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap pada masa reses kurang memadai; perencanaan yang matang pada masa reses kurang matang; penyusunan program pada masa reses kurang tepat; sarana dan prasarana pada masa reses kurang memadai; dan sistem pengawasan dan pengendalian pada masa reses kurang pengawasan.

Dari tanggapan responden di atas, pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Serang belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil tanggapan responden yang penulis lakukan, di mana rata-rata tanggapan responden terhadap pelaksanaan reses tersebut adalah sebesar 46,3%.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($26,28 < 2,035$), maka hipotesis yang diajukan adalah efektivitas pelaksanaan masa reses DPRD Kota Serang $\leq 65\%$ dari kriteria yang diharapkan dapat diterima. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Serang masa bhakti 2009-2014 tahun 2013 belum efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah:

1. Kejelasan tujuan dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Serang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat kegiatan-kegiatan reses.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan pada masa reses anggota DPRD Kota Serang perlu adanya pelaksanaan di seluruh wilayah daerah pemilihan, menggunakan konsep audiensi, menyediakan berbagai bantuan sarana dalam bentuk uang maupun barang, dan melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan pada masa reses disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Perencanaan kegiatan pada masa reses dapat dilakukan dengan memberikan pengumuman, sosialisasi, agenda, dan jadwal kegiatan reses kepada seluruh perangkat aparat desa.
5. Penyusunan program pada kegiatan masa reses perlu menghadirkan perwakilan dari setiap RT/RW di daerah pemilihan.
6. Sarana dan prasarana pada kegiatan masa reses harus mudah diakses dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam menyerap aspirasi masyarakat seperti menyediakan angket atau kuesioner.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian pada masa reses perlu dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Serang dan Partai Politik yang mengusungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo
Persada
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung :
Citra Aditya Bakti
- Huntington, Nelson, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara
Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP
YKPN
- Makmur, Syarieff. 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas
Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moenir, H.A.S, 2006. *Menejemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. Bumi
Aksara
- Napitulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Jakarta: Alumni
- Pito, Toni Andrianus, dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem
Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi*. Jakarta:
Arcan
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi 10*. Jakarta: PT. Salemba
Empat

Sedarmayanti.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*.

Bandung : Mandar Maju.

Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Erlangga

Sugiyono .2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

----- . 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

----- .2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

----- .2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia

Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta :
PT. Raja Grafindo Utama

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : RajaGrafindo
Persada

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal
351

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Pasal 344

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

Keputusan Menteri Nomor 162 Tahun 2004

Sumber Lain:

Tata Tertib DPRD Kota Serang Tahun 2009-2014

Web:

Lili Istiqfaiyah. 2012. *Prinsip-prinsip Demokrasi Menurut para Ahli*.
<http://lilyistigfaiyah.blogspot.com/2012/09/prinsip-prinsip-demokrasi-menurut-para.html>. Tanggal Akses 18 September 2014.

Yuanita Rahmi. 2013. *Kerangka Teori*. http://www.academia.edu/4569180/-BAB_II. Tanggal Akses 12 September 2014.

LAMPIRAN

No	Pertanyaan
1	<p>Apakah kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat?</p> <p>a. Ya, kegiatan reses selalu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat</p> <p>b. Ya, kegiatan reses sering memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat</p> <p>c. Ya, kegiatan reses kadang-kadang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat</p> <p>d. Tidak, kegiatan reses tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat</p>
2	<p>Apakah tujuan kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang dapat menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat?</p> <p>a. Ya, tujuan kegiatan reses selalu menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat</p> <p>b. Ya, tujuan kegiatan reses sering menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat</p> <p>c. Ya, tujuan kegiatan reses kadang-kadang menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat</p> <p>d. Tidak, tujuan kegiatan reses tidak menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat</p>
3	<p>Apakah tujuan kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang dapat menindak lanjuti aspirasi masyarakat?</p> <p>a. Ya, aspirasi masyarakat selalu ditindaklanjuti</p> <p>b. Ya, aspirasi masyarakat seraing ditindaklanjuti</p> <p>c. Ya, aspirasi masyarkaak kadang-kadang ditindaklanjuti</p> <p>d. Tidak, aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti</p>
4	<p>Apakah tujuan lain dari kegiatan reses DPRD Kota Serang adalah untuk pencitraan anggota DPRD Kota Serang.</p> <p>a. Ya, kegiatan reses selalu untuk pencitraan</p> <p>b. Ya, kegiatan reses sering untuk pencitraan</p> <p>c. Ya, kegiatan reses kadang-kadang untuk pencitraan</p> <p>d. Tidak, Kegiatan reses tidak untuk pencitraan</p>
5	<p>Apakah kegiatan reses DPRD Kota Serang mengawasi pembangunan daerah?</p> <p>a. Ya, selalu mengawasi pembangunan daerah</p> <p>b. Ya, sering mengawasi pembangunan daerah</p> <p>c. Ya, kadang-kadang mengawasi pembangunan daerah</p> <p>d. Tidak mengawasi pembangunan daerah</p>

6	<p>Apakah kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Kota Serang?</p> <p>a. Ya, selalu dilaksanakan di seluruh wilayah daerah pemilihan</p> <p>b. Ya, sering dilaksanakan di seluruh wilayah daerah pemilihan</p> <p>c. Ya, kadang-kadang dilaksanakan di seluruh wilayah daerah pemilihan</p> <p>d. Tidak dilaksanakan di seluruh wilayah daerah pemilihan</p>
7	<p>Apakah kegiatan reses menggunakan konsep audiensi?</p> <p>a. Ya, selalu menggunakan konsep audiensi</p> <p>b. Ya, sering menggunakan konsep audiensi</p> <p>c. Kadang-kadang menggunakan konsep audiensi</p> <p>d. Tidak menggunakan konsep audiensi</p>
8	<p>Apakah kegiatan reses menggunakan konsep pintu ke pintu?</p> <p>a. Ya, selalu menggunakan konsep pintu ke pintu</p> <p>b. Ya, sering menggunakan konsep pintu ke pintu</p> <p>c. Ya, kadang-kadang menggunakan konsep pintu ke pintu</p> <p>d. Tidak menggunakan konsep pintu ke pintu</p>
9	<p>Apakah kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang dapat menyediakan berbagai bantuan dalam bentuk uang maupun barang.</p> <p>a. Ya, selalu menyediakan bantuan dalam bentuk uang maupun barang</p> <p>b. Ya, sering menyediakan bantuan dalam bentuk uang maupun barang</p> <p>c. Ya, kadang-kadang menyediakan bantuan dalam bentuk uang maupun barang</p> <p>d. Tidak menyediakan bantuan dalam bentuk uang maupun barang</p>
10	<p>Apakah kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat?</p> <p>a. Ya, selalu melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat</p> <p>b. Ya, sering melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat</p> <p>c. Ya, kadang-kadang melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat</p> <p>d. Tidak melakukan kunjungan ke RW dan RT setempat</p>
11	<p>Apakah kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?</p> <p>a. Ya, sudah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>b. Ya, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>c. Ya, kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>d. Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
12	<p>Apakah kegiatan reses memiliki program khusus sesuai karakteristik daerah pemilihan?</p> <p>a. Ya, sangat sesuai karakteristik daerah pemilihan</p> <p>b. Ya, sesuai karakteristik daerah pemilihan</p> <p>c. Ya, kurang sesuai karakteristik daerah pemilihan</p>

	d. Tidak sesuai karakteristik daerah pemilihan
13	Apakah hasil kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang sudah terlaksana? a. Ya, hasil kegiatan reses sudah terlaksana dengan sangat baik b. Ya, hasil kegiatan reses sudah terlaksana dengan baik c. Ya, hasil kegiatan reses sudah terlaksana dengan cukup baik d. Tidak, Hasil kegiatan reses belum terlaksana
14	Apakah hasil kegiatan reses anggota DPRD Kota Serang telah merumuskan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat? a. Ya, kebijakan yang dibutuhkan masyarakat telah dirumuskan dengan sangat baik b. Ya, kebijakan yang dibutuhkan masyarakat telah dirumuskan dengan baik c. Ya, kebijakan yang dibutuhkan masyarakat telah dirumuskan dengan cukup baik d. Tidak, kebijakan yang dibutuhkan masyarakat belum dirumuskan
15	Apakah DPRD Kota Serang memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai adanya kegiatan reses DPRD Kota Serang? a. Ya, selalu memberikan pengumuman kepada masyarakat b. Ya, sering memberikan pengumuman kepada masyarakat c. Ya, kadang-kadang memberikan pengumuman kepada masyarakat d. Tidak memberikan pengumuman kepada masyarakat
16	Apakah DPRD Kota Serang memberikan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan reses kepada masyarakat? a. Ya, selalu memberikan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan reses b. Ya, sering memberikan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan reses c. Ya, kadang-kadang memberikan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan reses d. Tidak memberikan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan reses
17	Apakah DPRD Kota Serang telah membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat? a. Ya, selalu membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat b. Ya, sering membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat c. Ya, kadang-kadang membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat d. Tidak membuat agenda sesuai kebutuhan masyarakat
18	Apakah masyarakat Kota Serang mengetahui jadwal kegiatan reses? a. Ya, selalu mengetahui jadwal kegiatan reses b. Ya, sering mengetahui jadwal kegiatan reses c. Ya, kadang-kadang mengetahui jadwal kegiatan reses d. Tidak mengetahui jadwal kegiatan reses

19	<p>Apakah kegiatan reses dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap RT dan RW di Daerah Pemilihan Kota Serang?</p> <p>a. Ya, selalu dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap RT dan RW</p> <p>b. Ya, sering dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap RT dan RW</p> <p>c. Ya, kadang-kadnag dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap RT dan RW</p> <p>d. Tidak dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap RT dan RW</p>
20	<p>Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan reses?</p> <p>a. Ya, sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan reses</p> <p>b. Ya, merasa terbantu dengan adanya kegiatan reses</p> <p>c. Ya, merasa cukup terbantu dengan adanya kegiatan reses</p> <p>d. Tidak merasa terbantu dengan adanya kegiatan reses</p>
21	<p>Apakah kegiatan reses DPRD Kota Serang sudah memenuhi harapan masyarakat?</p> <p>a. Ya, sudah sangat memenuhi harapan masyarakat</p> <p>b. Ya, sudah memenuhi harapan masyarakat</p> <p>c. Ya, sudah cukup memenuhi harapan masyarakat</p> <p>d. Tidak memenuhi harapan masyarakat</p>
22	<p>Apakah masyarakat Kota Serang merasa terwakili kepentingannya ketika ada kegiatan reses?</p> <p>a. Ya, selalu merasa terwakili kepentingannya ketika ada kegiatan reses</p> <p>b. Ya, merasa terwakili kepentingannya ketika ada kegiatan reses</p> <p>c. Ya, cukup merasa terwakili kepentingannya ketika ada kegiatan reses</p> <p>d. Tidak terwakili kepentingannya ketika ada kegiatan reses</p>
23	<p>Apakah kegiatan reses yang dilakukan Anggota DPRD Kota Serang dinantikan oleh masyarakat?</p> <p>a. Ya, selalu dinantikan oleh masyarakat</p> <p>b. Ya, sering dinantikan oleh masyarakat</p> <p>c. Ya, kadang-kadang dinantikan oleh masyarakat</p> <p>d. Tidak dinantikan oleh masyarakat</p>
24	<p>Apakah lokasi kegiatan reses DPRD Kota Serang mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat?</p> <p>a. Ya, sangat mudah diakses</p> <p>b. Ya, mudah diakses</p> <p>c. Ya, cukup mudah diakses</p> <p>d. Tidak mudah diakses</p>
25	<p>Apakah DPRD Kota Serang menyediakan sarana untuk saran dan kritik dalam pelaksanaannya melalui telepon?</p> <p>a. Ya, menyediakan sarana untuk saran dan kritik melalui telepon</p>

	<p>dengan sangat baik</p> <p>b. Ya, menyediakan sarana untuk saran dan kritik melalui telepon dengan baik</p> <p>c. Ya, menyediakan sarana untuk saran dan kritik melalui telepon dengan cukup baik</p> <p>d. Tidak menyediakan sarana untuk saran dan kritik melalui telepon</p>
26	<p>Apakah DPRD Kota Serang menyediakan sarana seperti tenda maupun ruangan dalam pelaksanaan kegiatan reses?</p> <p>a. Ya, menyediakan sarana seperti tenda maupun ruangan dengan sangat baik</p> <p>b. Ya, menyediakan sarana seperti tenda maupun ruangan dengan baik</p> <p>c. Ya, menyediakan sarana seperti tenda maupun ruangan dengan cukup baik</p> <p>d. Tidak menyediakan sarana seperti tenda maupun ruangan</p>
27	<p>Apakah DPRD Kota Serang menyediakan kuisisioner atau angket?</p> <p>a. Ya, selalu menyediakan kuisisioner atau angket</p> <p>b. Ya, sering menyediakan kuisisioner atau angket</p> <p>c. Ya, kadang-kadang menyediakan kuisisioner atau angket</p> <p>d. Tidak menyediakan kuisisioner atau angket</p>
28	<p>Apakah DPRD Kota Serang menyediakan modul atau materi tentang kegiatan reses?</p> <p>a. Ya, selalu menyediakan modul atau materi tentang kegiatan reses</p> <p>b. Ya, sering menyediakan modul atau materi tentang kegiatan reses</p> <p>c. Ya, kadang-kadang menyediakan modul atau materi tentang kegiatan reses</p> <p>d. Tidak menyediakan modul atau materi tentang kegiatan reses</p>
29	<p>Apakah Masyarakat mengadukan anggota DPRD Kota Serang yang tidak melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Serang?</p> <p>a. Ya, Masyarakat selalu mengadukan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Serang</p> <p>b. Ya, Masyarakat sering mengadukan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Serang</p> <p>c. Ya, Masyarakat kadang-kadang mengadukan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Serang</p> <p>d. Masyarakat tidak mengadukan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Serang</p>
30	<p>Apakah masyarakat mengadukan anggota DPRD Kota Serang yang tidak melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan kepada Partai Politiknya?</p> <p>a. Ya, Masyarakat selalu mengadukan ke Partai Politiknya</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Ya, Masyarakat sering mengadakan ke Partai Politiknya c. Ya, Masyarakat kadang-kadang mengadakan ke Partai Politiknya d. Masyarakat tidak mengadakan ke Partai Politiknya
31	<p>Apakah Masyarakat ikut mengawasi anggota DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan reses?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya, masyarakat selalu ikut mengawasi anggota DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan reses b. Ya, masyarakat sering ikut mengawasi anggota DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan reses c. Ya, masyarakat kadang-kadang ikut mengawasi anggota DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan reses d. Masyarakat tidak ikut mengawasi anggota DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan reses
32	<p>Adakah pengawasan dari Partai Politik terhadap Anggota Dewan DPRD Kota Serang yang melaksanakan kegiatan reses?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya, selalu ada pengawasan dari Partai Politik b. Ya, sering ada pengawasan dari Partai Politik c. Ya, kadang-kadang ada pengawasan dari Partai Politik d. Tidak ada pengawasan dari Partai Politik
33	<p>Apakah adanya pembangunan di daerah yang dikunjungi anggota DPRD Kota Serang pada kegiatan reses?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya, selalu dikunjungi b. Ya, sering dikunjungi c. Ya, kadang-kadang dikunjungi d. Tidak dikunjungi
34	<p>Apakah dengan adanya evaluasi dalam kegiatan reses dapat membuat kegiatan reses semakin baik?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya, selalu membuat kegiatan reses semakin baik b. Ya, sering membuat kegiatan reses semakin baik c. Ya, kadang-kadang membuat kegiatan reses semakin baik d. Tidak membuat kegiatan reses semakin baik

DATA HASIL PENELITIAN

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	1	2	2	1	2
2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
4	3	2	3	3	3	1	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	4	4
5	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
6	2	1	1	2	2	1	1	1	2	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
7	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1
8	2	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	3	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2
9	3	2	2	3	2	1	2	3	2	3	3	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2
10	3	2	3	2	2	2	1	2	3	2	1	3	3	2	3	2	2	3	1	2	2	2
11	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1
12	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	3	3
13	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2
14	2	3	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1
15	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4
16	2	2	2	3	3	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	4	1	1
17	3	2	4	4	2	1	2	2	2	2	3	2	3	4	1	4	3	1	2	3	2	2
18	3	2	2	4	2	2	3	1	1	3	3	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2
19	2	1	2	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
20	1	1	2	3	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	2	2	2	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
22	1	1	1	3	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
23	3	3	2	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	2	2	2
24	2	2	2	3	2	2	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
25	2	3	2	3	1	2	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
26	1	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
27	2	2	2	4	2	3	3	1	1	3	2	1	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2
28	2	2	2	4	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
29	1	2	1	4	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	4	1	1
30	2	2	1	4	1	1	3	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1
31	3	2	3	2	2	2	1	2	3	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	3
32	2	2	2	3	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
33	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	3	3	3	2	2	3	3	2	1	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2
35	2	2	2	3	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
36	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2
37	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
38	1	1	1	3	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
39	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
40	2	1	2	4	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2
41	3	2	2	4	2	4	4	2	2	4	2	3	2	2	3	3	1	2	4	2	3	3
42	3	2	2	4	2	4	1	4	2	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	2	3	2	4	2	4	2	1	1	1	1	2	3	3	1	1	2	1	1	2	1	1
44	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
45	1	1	1	1	2	2	2	3	4	3	3	2	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3
46	2	2	1	4	1	4	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1
47	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1
48	2	3	2	3	2	2	2	1	2	3	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3	2	2
49	3	3	3	4	3	2	1	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	4	3	2	3	3
50	3	2	3	3	1	2	3	2	2	2	3	1	3	3	1	2	3	3	3	2	2	2
51	3	2	3	3	1	2	3	2	1	3	3	2	2	3	2	1	2	3	3	2	2	2
52	3	2	3	3	1	2	3	2	1	3	3	2	2	3	2	1	2	3	3	2	2	2
53	2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	4	1	1
54	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
55	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	2	2	2	3	1	1	2	1	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
58	2	2	2	3	1	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1
59	2	2	2	4	1	1	2	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1
60	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	3	3	3	2	2	3	4	2	4	4	3	3	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4
63	2	2	2	4	1	2	3	1	3	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2
64	1	2	2	3	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	2
65	2	2	2	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1
66	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
67	2	2	2	4	2	1	2	1	1	3	2	1	2	2	1	1	2	3	3	2	2	2
68	3	2	2	1	1	2	2	1	1	3	2	1	2	2	1	1	1	3	3	2	1	1

69	3	2	2	2	1	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
70	2	3	2	4	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
71	2	3	2	4	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
72	2	2	2	4	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3
73	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3
74	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
75	3	3	3	2	3	3	2	2	1	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	4	3
76	3	3	3	2	3	3	2	2	1	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	4	3
77	3	3	3	2	3	3	2	2	1	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	4	3
78	3	3	3	2	3	3	2	2	1	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	4	3
79	3	3	3	2	3	3	2	2	1	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	4	3
80	2	2	1	4	2	4	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1
81	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
82	2	3	2	3	3	2	4	3	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3
83	1	2	2	3	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
84	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
85	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1
86	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	3
87	1	1	1	4	1	2	3	1	3	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	3	1
88	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1
90	1	1	2	2	2	1	4	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1
91	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
93	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1
94	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1
95	2	1	1	4	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
96	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
97	1	2	1	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1
98	3	3	2	4	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3
99	2	2	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2
100	2	2	1	4	1	1	3	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
	201	199	195	287	169	194	205	166	181	197	185	189	181	186	162	157	180	191	209	198	173

3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	75
3	2	2	1	3	3	1	1	2	2	2	2	2	81
3	2	2	1	3	3	1	1	2	2	2	2	2	81
3	2	2	1	3	3	1	1	2	2	2	2	2	81
3	2	2	1	3	3	1	1	2	2	2	2	2	85
3	3	3	1	3	3	1	1	2	2	2	2	2	86
3	4	4	2	4	2	2	3	3	3	4	4	3	101
3	4	4	2	4	4	2	2	3	3	4	4	3	102
3	4	4	2	4	4	2	2	3	3	4	4	3	102
3	4	4	2	4	2	2	3	3	3	4	4	3	101
3	4	4	2	4	2	2	3	3	3	4	4	3	101
2	4	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	59
2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	68
3	3	3	3	4	3	2	3	4	2	3	2	3	99
2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	55
1	2	3	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	59
1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	50
3	3	2	4	1	2	1	2	1	2	2	1	2	63
2	4	2	1	1	2	2	1	1	2	3	2	2	62
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	41
1	3	1	2	2	2	1	2	2	3	2	1	1	57
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	53
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	42
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	52
1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	47
1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	47
1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	45
2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	80
1	1	1	2	3	1	2	2	1	2	1	2	1	57
2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	58
192	250	207	144	213	173	150	151	153	170	173	177	191	6349

Pert_1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	26	26.0	26.0	26.0
Ya, Kadang-kadang	47	47.0	47.0	73.0
Ya, Sering	27	27.0	27.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	24	24.0	24.0	24.0
Ya, Kadang-kadang	54	54.0	54.0	78.0
Ya, Sering	21	21.0	21.0	99.0
Ya, Selalu	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	27	27.0	27.0	27.0
Ya, Kadang-kadang	52	52.0	52.0	79.0
Ya, Sering	20	20.0	20.0	99.0
Ya, Selalu	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	10	10.0	10.0	10.0
	Ya, Kadang-kadang	27	27.0	27.0	37.0
	Ya, Sering	29	29.0	29.0	66.0
	Ya, Selalu	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	47	47.0	47.0	47.0
	Ya, Kadang-kadang	37	37.0	37.0	84.0
	Ya, Sering	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	34	34.0	34.0	34.0
	Ya, Kadang-kadang	44	44.0	44.0	78.0
	Ya, Sering	16	16.0	16.0	94.0
	Ya, Selalu	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	28	28.0	28.0	28.0
	Ya, Kadang-kadang	44	44.0	44.0	72.0
	Ya, Sering	23	23.0	23.0	95.0
	Ya, Selalu	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	48	48.0	48.0	48.0
	Ya, Kadang-kadang	39	39.0	39.0	87.0
	Ya, Sering	12	12.0	12.0	99.0
	Ya, Selalu	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	43	43.0	43.0	43.0
	Ya, Kadang-kadang	35	35.0	35.0	78.0
	Ya, Sering	20	20.0	20.0	98.0
	Ya, Selalu	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	38	38.0	38.0	38.0
Ya, Kadang-kadang	35	35.0	35.0	73.0
Ya, Sering	19	19.0	19.0	92.0
Ya, Selalu	8	8.0	8.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	34	34.0	34.0	34.0
Ya, Kadang-kadang	47	47.0	47.0	81.0
Ya, Sering	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	27	27.0	27.0	27.0
Ya, Kadang-kadang	58	58.0	58.0	85.0
Ya, Sering	14	14.0	14.0	99.0
Ya, Selalu	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	35	35.0	35.0	35.0
Ya, Kadang-kadang	49	49.0	49.0	84.0
Ya, Sering	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	32	32.0	32.0	32.0
Ya, Kadang-kadang	51	51.0	51.0	83.0
Ya, Sering	16	16.0	16.0	99.0
Ya, Selalu	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	55	55.0	55.0	55.0
Ya, Kadang-kadang	29	29.0	29.0	84.0
Ya, Sering	15	15.0	15.0	99.0
Ya, Selalu	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	54	54.0	54.0	54.0
	Ya, Kadang-kadang	38	38.0	38.0	92.0
	Ya, Sering	5	5.0	5.0	97.0
	Ya, Selalu	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	44	44.0	44.0	44.0
	Ya, Kadang-kadang	39	39.0	39.0	83.0
	Ya, Sering	10	10.0	10.0	93.0
	Ya, Selalu	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	39	39.0	39.0	39.0
	Ya, Kadang-kadang	39	39.0	39.0	78.0
	Ya, Sering	14	14.0	14.0	92.0
	Ya, Selalu	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	26	26.0	26.0	26.0
	Ya, Kadang-kadang	46	46.0	46.0	72.0
	Ya, Sering	21	21.0	21.0	93.0
	Ya, Selalu	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	35	35.0	35.0	35.0
	Ya, Kadang-kadang	42	42.0	42.0	77.0
	Ya, Sering	13	13.0	13.0	90.0
	Ya, Selalu	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	52	52.0	52.0	52.0
	Ya, Kadang-kadang	26	26.0	26.0	78.0
	Ya, Sering	19	19.0	19.0	97.0
	Ya, Selalu	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	38	38.0	38.0	38.0
	Ya, Kadang-kadang	36	36.0	36.0	74.0
	Ya, Sering	22	22.0	22.0	96.0
	Ya, Selalu	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	20	20.0	20.0	20.0
	Ya, Kadang-kadang	32	32.0	32.0	52.0
	Ya, Sering	26	26.0	26.0	78.0
	Ya, Selalu	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	31	31.0	31.0	31.0
	Ya, Kadang-kadang	38	38.0	38.0	69.0
	Ya, Sering	24	24.0	24.0	93.0
	Ya, Selalu	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	64	64.0	64.0	64.0
	Ya, Kadang-kadang	31	31.0	31.0	95.0
	Ya, Sering	2	2.0	2.0	97.0
	Ya, Selalu	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	31	31.0	31.0	31.0
	Ya, Kadang-kadang	33	33.0	33.0	64.0
	Ya, Sering	28	28.0	28.0	92.0
	Ya, Selalu	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_27

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	47	47.0	47.0	47.0
	Ya, Kadang-kadang	37	37.0	37.0	84.0
	Ya, Sering	12	12.0	12.0	96.0
	Ya, Selalu	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_28

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	56	56.0	56.0	56.0
	Ya, Kadang-kadang	38	38.0	38.0	94.0
	Ya, Sering	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_29

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	62	62.0	62.0	62.0
	Ya, Kadang-kadang	28	28.0	28.0	90.0
	Ya, Sering	7	7.0	7.0	97.0
	Ya, Selalu	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_30

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	61	61.0	61.0	61.0
	Ya, Kadang-kadang	28	28.0	28.0	89.0
	Ya, Sering	8	8.0	8.0	97.0
	Ya, Selalu	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pert_31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	43	43.0	43.0	43.0
Ya, Kadang-kadang	44	44.0	44.0	87.0
Ya, Sering	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	53	53.0	53.0	53.0
Ya, Kadang-kadang	29	29.0	29.0	82.0
Ya, Sering	10	10.0	10.0	92.0
Ya, Selalu	8	8.0	8.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak, Tidak Pernah	46	46.0	46.0	46.0
Ya, Kadang-kadang	37	37.0	37.0	83.0
Ya, Sering	11	11.0	11.0	94.0
Ya, Selalu	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pert_34

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, Tidak Pernah	40	40.0	40.0	40.0
	Ya, Kadang-kadang	32	32.0	32.0	72.0
	Ya, Sering	25	25.0	25.0	97.0
	Ya, Selalu	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

UJI NORMALITAS DATA SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Efektivitas
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	63.4900
	Std. Deviation	17.95758
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		1.265
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Interpretasi Output:

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1,265 dan Asymp.sig. sebesar 0,082 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

TABEL r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan	
	0.05	0.01		0.05	0.01
3	0.997	0.999	63	0.248	0.322
4	0.950	0.990	64	0.246	0.32
5	0.878	0.959	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	66	0.242	0.315
7	0.754	0.875	67	0.24	0.313
8	0.707	0.834	68	0.239	0.31
9	0.666	0.798	69	0.237	0.308
10	0.632	0.765	70	0.235	0.306
11	0.602	0.735	71	0.234	0.304
12	0.576	0.708	72	0.232	0.302
13	0.553	0.684	73	0.23	0.3
14	0.532	0.661	74	0.229	0.298
15	0.514	0.641	75	0.227	0.296
16	0.497	0.623	76	0.226	0.294
17	0.482	0.606	77	0.224	0.292
18	0.468	0.590	78	0.223	0.29
19	0.456	0.575	79	0.221	0.288
20	0.444	0.561	80	0.22	0.286
21	0.433	0.549	81	0.219	0.285
22	0.423	0.537	82	0.217	0.283
23	0.413	0.526	83	0.216	0.281
24	0.404	0.515	84	0.215	0.28
25	0.396	0.505	85	0.213	0.278
26	0.388	0.496	86	0.212	0.276
27	0.381	0.487	87	0.211	0.275
28	0.374	0.479	88	0.21	0.273
29	0.367	0.471	89	0.208	0.272
30	0.361	0.463	90	0.207	0.27
31	0.355	0.456	91	0.206	0.269
32	0.349	0.449	92	0.205	0.267
33	0.344	0.442	93	0.204	0.266
34	0.339	0.436	94	0.203	0.264
35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
36	0.329	0.424	96	0.201	0.262
37	0.325	0.418	97	0.2	0.26
38	0.320	0.413	98	0.199	0.259
39	0.316	0.408	99	0.198	0.258
40	0.312	0.403	100	0.197	0.256
41	0.308	0.398	101	0.196	0.255
42	0.304	0.393	102	0.195	0.254
43	0.301	0.389	103	0.194	0.253
44	0.297	0.384	104	0.193	0.252
45	0.294	0.380	105	0.192	0.25
46	0.291	0.376	106	0.191	0.249
47	0.288	0.372	107	0.19	0.248
48	0.285	0.368	108	0.189	0.247
49	0.282	0.365	109	0.188	0.246
50	0.279	0.361	110	0.187	0.245
51	0.276	0.358	111	0.187	0.244
52	0.273	0.354	112	0.186	0.242
53	0.271	0.351	113	0.185	0.241
54	0.268	0.348	114	0.184	0.24
55	0.266	0.345	115	0.183	0.239
56	0.263	0.341	116	0.182	0.238
57	0.261	0.339	117	0.182	0.237
58	0.259	0.336	118	0.181	0.236
59	0.256	0.333	119	0.18	0.235
60	0.254	0.330	120	0.179	0.234
61	0.252	0.327	121	0.179	0.233
62	0.250	0.325	122	0.178	0.232

Tabel Distribusi t Uji Dua Pihak

dk	5%	dk	5%	dk	5%	dk	5%
1	12.706	41	2.020	81	1.990	121	1.980
2	4.303	42	2.018	82	1.989	122	1.980
3	3.182	43	2.017	83	1.989	123	1.979
4	2.776	44	2.015	84	1.989	124	1.979
5	2.571	45	2.014	85	1.988	125	1.979
6	2.447	46	2.013	86	1.988	126	1.979
7	2.365	47	2.012	87	1.988	127	1.979
8	2.306	48	2.011	88	1.987	128	1.979
9	2.262	49	2.010	89	1.987	129	1.979
10	2.228	50	2.009	90	1.987	130	1.978
11	2.201	51	2.008	91	1.986	131	1.978
12	2.179	52	2.007	92	1.986	132	1.978
13	2.160	53	2.006	93	1.986	133	1.978
14	2.145	54	2.005	94	1.986	134	1.978
15	2.131	55	2.004	95	1.985	135	1.978
16	2.120	56	2.003	96	1.985	136	1.978
17	2.110	57	2.002	97	1.985	137	1.977
18	2.101	58	2.002	98	1.984	138	1.977
19	2.093	59	2.001	99	1.984	139	1.977
20	2.086	60	2.000	100	1.984	140	1.977
21	2.080	61	2.000	101	1.984	141	1.977
22	2.074	62	1.999	102	1.983	142	1.977
23	2.069	63	1.998	103	1.983	143	1.977
24	2.064	64	1.998	104	1.983	144	1.977
25	2.060	65	1.997	105	1.983	145	1.976
26	2.056	66	1.997	106	1.983	146	1.976
27	2.052	67	1.996	107	1.982	147	1.976
28	2.048	68	1.995	108	1.982	148	1.976
29	2.045	69	1.995	109	1.982	149	1.976
30	2.042	70	1.994	110	1.982	150	1.976
31	2.040	71	1.994	111	1.982	151	1.976
32	2.037	72	1.993	112	1.981	152	1.976
33	2.035	73	1.993	113	1.981	153	1.976
34	2.032	74	1.993	114	1.981	154	1.975
35	2.030	75	1.992	115	1.981	155	1.975
36	2.028	76	1.992	116	1.981	156	1.975
37	2.026	77	1.991	117	1.980	157	1.975
38	2.024	78	1.991	118	1.980	158	1.975
39	2.023	79	1.990	119	1.980	159	1.975
40	2.021	80	1.990	120	1.980	160	1.975

dk	1%	dk	1%	dk	1%	dk	1%
1	63.657	41	2.701	81	2.638	121	2.617
2	9.925	42	2.698	82	2.637	122	2.617
3	5.841	43	2.695	83	2.636	123	2.616
4	4.604	44	2.692	84	2.636	124	2.616
5	4.032	45	2.690	85	2.635	125	2.616
6	3.707	46	2.687	86	2.634	126	2.615
7	3.499	47	2.685	87	2.634	127	2.615
8	3.355	48	2.682	88	2.633	128	2.615
9	3.250	49	2.680	89	2.632	129	2.614
10	3.169	50	2.678	90	2.632	130	2.614
11	3.106	51	2.676	91	2.631	131	2.614
12	3.055	52	2.674	92	2.630	132	2.614
13	3.012	53	2.672	93	2.630	133	2.613
14	2.977	54	2.670	94	2.629	134	2.613
15	2.947	55	2.668	95	2.629	135	2.613
16	2.921	56	2.667	96	2.628	136	2.612
17	2.898	57	2.665	97	2.627	137	2.612
18	2.878	58	2.663	98	2.627	138	2.612
19	2.861	59	2.662	99	2.626	139	2.612
20	2.845	60	2.660	100	2.626	140	2.611
21	2.831	61	2.659	101	2.625	141	2.611
22	2.819	62	2.657	102	2.625	142	2.611
23	2.807	63	2.656	103	2.624	143	2.611
24	2.797	64	2.655	104	2.624	144	2.610
25	2.787	65	2.654	105	2.623	145	2.610
26	2.779	66	2.652	106	2.623	146	2.610
27	2.771	67	2.651	107	2.623	147	2.610
28	2.763	68	2.650	108	2.622	148	2.609
29	2.756	69	2.649	109	2.622	149	2.609
30	2.750	70	2.648	110	2.621	150	2.609
31	2.744	71	2.647	111	2.621	151	2.609
32	2.738	72	2.646	112	2.620	152	2.609
33	2.733	73	2.645	113	2.620	153	2.608
34	2.728	74	2.644	114	2.620	154	2.608
35	2.724	75	2.643	115	2.619	155	2.608
36	2.719	76	2.642	116	2.619	156	2.608
37	2.715	77	2.641	117	2.619	157	2.608
38	2.712	78	2.640	118	2.618	158	2.607
39	2.708	79	2.640	119	2.618	159	2.607
40	2.704	80	2.639	120	2.617	160	2.607



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU KOTA SERANG**

NO	KECAMATAN / PPK	KELURAHAN / DESA / PPS	TPS	PEMILIH		
				LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. SERANG		332	87.468	84.633	172.101
1		1. SERANG	41	10.703	10.468	21.171
2		2. CIP/RE	40	10.780	10.503	21.283
3		3. SUMUR PECUNG	32	9.140	8.942	18.082
4		4. KOTA BARU	13	3.392	2.929	6.321
5		5. LOPANG	34	7.297	6.943	14.240
6		6. CIMUNCANG	36	10.463	10.082	20.545
7		7. UNYUR	49	14.747	14.113	28.860
8		8. SUKAWANA	10	1.790	1.738	3.528
9		9. LONTAR BAKLI	14	3.356	3.510	6.876
10		10. KALIGANDU	28	7.232	7.151	14.383
11		11. TERONDOL	15	3.343	3.195	6.538
12		12. KAGUNGAN	20	5.215	5.059	10.274
	2. KASEMEN		142	33.582	32.605	66.187
13		1. KASEMEN	18	4.633	4.445	9.078
14		2. MGS.10 PRIYAYI	12	2.608	2.460	5.068
15		3. TERUMBU	13	2.864	2.804	5.668
16		4. WARUNG JAUJ	11	2.939	2.805	5.744
17		5. BENDUNG	15	2.809	2.682	5.491
18		6. BANTEN	26	5.980	5.825	11.805
19		7. SAWAH LUHUR	18	3.750	3.775	7.525
20		8. KILASAH	11	2.095	2.592	4.687
21		9. KASUNYATAN	13	2.898	2.869	5.767
22		10. MARGALUYU	10	2.418	2.331	4.749
	3. WALANTAKA		121	29.831	28.750	58.581
23		1. WALANTAKA	6	1.401	1.477	2.878
24		2. CIGDONG	5	1.415	1.357	2.772
25		3. NYAPAH	6	1.525	1.461	2.987
26		4. PANGAMPELAN	12	2.875	2.859	5.734
27		5. KIARA	8	2.032	1.969	4.001
28		6. PAGER AGUNG	12	3.390	3.149	6.539
29		7. KALDJARAN	10	2.321	2.233	4.557
30		8. KAPUREN	9	2.052	1.984	4.036
31		9. TERITIH	12	3.032	2.962	5.994
32		10. PABUARAN	6	1.566	1.540	3.106
33		11. PASULUHAN	6	1.629	1.514	3.143
34		12. TEGALSARI	5	1.230	1.162	2.392
35		13. PIPITAN	17	4.006	3.887	7.893
36		14. LEBAK WINGI	6	1.263	1.196	2.459
	4. CURUG		77	20.068	18.720	38.788
37		1. CURUG	6	1.506	1.482	3.088
38		2. TINGGAR	8	2.169	2.106	4.275
39		3. KEMANISAN	12	2.902	2.655	5.558
40		4. CIPETE	8	1.760	1.698	3.458
41		5. CILAKU	9	2.698	2.573	5.271
42		6. PANCALAKSANA	7	2.008	1.833	3.841
43		7. SUKAWANA	6	1.579	1.369	2.948
44		8. SUKALAKSANA	8	1.872	1.768	3.640
45		9. CURUG MANIS	7	1.952	1.840	3.792
46		10. SUKAJAYA	6	1.522	1.395	2.917



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU KOTA SERANG

NO	KECAMATAN / PPK	KELURAHAN / DESA / PPS	TPS	PEMILIH		
				LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	5. CIPOCOKJAYA		118	31.844	29.649	61.484
47		1. CIPOCOKJAYA	20	5.055	4.875	9.930
48		2. KARUNDANG	11	3.500	2.563	6.063
49		3. PANAYANGAN	16	4.338	4.233	8.571
50		4. BANJAR AGUNG	17	4.659	4.478	9.137
51		5. BANJARSARI	20	6.076	6.040	12.116
52		6. TEMBONG	11	2.562	2.330	4.892
53		7. DALUNG	10	2.578	2.383	4.961
54		8. GELAM	13	3.076	2.738	5.814
	6. TAKYAKAN		125	29.579	28.801	58.380
55		1. TAKYAKAN	11	2.592	2.451	5.043
56		2. SAYAR	11	2.370	2.140	4.510
57		3. PANCUR	7	1.710	1.634	3.344
58		4. KURANJI	7	1.513	1.415	2.928
59		5. KALANGANYAR	6	1.319	1.188	2.507
60		6. CILOWONG	15	3.309	3.061	6.370
61		7. PANGUNGJATI	9	2.313	2.267	4.580
62		8. DRANGONG	24	5.555	5.951	11.507
63		9. UMBUL TENGAH	7	1.940	1.689	3.629
64		10. SEPANG	10	2.918	2.757	5.675
65		11. LIALANG	10	3.057	2.925	5.982
66		12. TAMAN BARU	8	1.600	2.231	3.831
JUMLAH TOTAL KOTA SERANG			915	232.372	223.149	455.521

Ditetapkan di : Serang

tanggal 9 Juni 2014





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-unstirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-unstirta.ac.id

Nomor : 1395 /UM 43.6.1/FG/2014

12 Juni 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *riset* mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Septian Gestiardi
NIM : 6661092196

Semester : X

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Periode 2009-2014

Data : Data Pemilih Tetap Tahun 2009

diperlukan : Data Pemilih Tetap Tahun 2014

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
nd: <http://www.fkip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fkip-untirta.ac.id

Nomor : 1304 /UN.43.6.1/PG/2014

12 Juni 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan reses mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Septian Gestiardi
NIM : 6661092196

Semester : X
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Periode 2009-2014
Data : Data Program dalam kegiatan reses
diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP: 197407052006042011

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SERANG
1. PENYAMPAIAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013
2. PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA USUL
WALIKOTA SERANG
3. PENUTUPAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2012

I. Waktu Pelaksanaan

- Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Desember 2012
Waktu : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Serang
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Serang
1. Penyampaian Penyempurnaan Hasil Evaluasi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2013
 2. Persetujuan Bersama terhadap Raperda Usul Walikota Serang
 3. Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012

II. Jumlah Anggota Masa Bhakti 2009 - 2014

a. Fraksi Partai Demokrat	7 Orang
b. Fraksi Partai Golongan Karya	7 Orang
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Orang
d. Fraksi Maslahat	13 Orang
e. Fraksi Gabungan Hanura	<u>10 Orang</u>
Jumlah	45 Orang

III. Jumlah Anggota Yang Hadir

a. Fraksi Partai Demokrat	6 Orang
b. Fraksi Partai Golongan Karya	2 Orang
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7 Orang
d. Fraksi Maslahat	11 Orang
e. Fraksi Gabungan Hanura	<u>6 Orang</u>
Jumlah	32 Orang

IV. Anggota DPRD yang hadir :

- a. Fraksi Partai Demokrat
 1. H. Amanudin Toha Ketua
 2. Ramlan Junaidi, S.Sos Wakil Ketua
 3. Samuri, SE Sekretaris
 4. Hj. Nur'aeni, S.Sos, MSi Anggota
 5. Redi Ismail Anggota
 6. Dra. Muajjah Anggota
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 1. Ach. Anis Fuad BKH Jawahir Sekretaris
 2. H. Moh. Mishari Anggota
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 1. Sutadi, SP Ketua
 2. Encop Sofia, MA Wakil Ketua
 3. Bambang Janoko, SE Anggota
 4. Ujang Syafrudinman Anggota
 5. M. Tomi Anggota
 6. H. Sahrani, SE Anggota
 7. Ahmad Satiri, AS Anggota
 - d. Fraksi Maslahat
 1. Sukara, S.Kom Ketua
 2. H. M. Abdurahman, SE Wakil Ketua
 3. H. Ahmad Rosadi Sekretaris
 4. H. Lukman Latief Anggota
 5. Wawan Mulyawan, S.Sos.I Anggota
 6. Acep Rofitudin Anggota
 7. Marlan Syafar, SE Anggota
 8. DR. H. Furtasan Ali Yusuf, SE.,S.Kom.,MM Anggota
 9. Drs. H. Samsul Bahri, MSj Anggota
 10. Agus Effendi Anggota
 11. Hj. Muajjah Anggota
 - e. Fraksi Gabungan Hanura
 1. H. Rohani Wakil Ketua
 2. Muji Rohman, SH Sekretaris
-

3. Rizal Azis, SP	Anggota
4. Agus A Subarli, ST	Anggota
5. Acim Muchtar	Anggota
6. Drs. Aminudin	Anggota

V. Jumlah Anggota yang tidak hadir :

a. Fraksi Partai Demokrat	1 Orang
b. Fraksi Partai Golongan Karya	5 Orang
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1 Orang
d. Fraksi Maslahat	2 Orang
e. Fraksi Gabungan Hanura	<u>1 Orang</u>
Jumlah	13 Orang

VI. Anggota yang tidak hadir :

a. Fraksi Partai Demokrat	
1. Aan Nurhandiat, AMd.Kom	Anggota
b. Fraksi Golongan Karya	
1. Hj. Ratna Komalasari	Ketua
2. Mahfuzh, SE	Wakil Ketua
3. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, MSI	Anggota
4. H. Namin, SH	Anggota
5. H. Mujib	Anggota
c. Fraksi PDIP	
1. Sun'op	Anggota
d. Fraksi Maslahat	
1. Hif Fariudin, SE	Anggota
2. Euis Rismawati	Anggota
e. Fraksi Gabungan Hanura	
1. H. Junaedi, SE	Ketua
2. H. Tajudin	Anggota
3. Afiaturohman, SE	Anggota
4. Hj. Siti Suwarini, SAP	Anggota

VII. Turut hadir :

- Wakil Walikota Serang
- Sekretaris Daerah Kota Serang
- Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
- Perwakilan KODIM 0602 Serang

VIII. Sekretariat :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si | Sekretaris DPRD Kota Serang |
| 2. Moh. Ma'mun Chudari, SE | Kabag Persidangan |
| 3. Ritadi, S.Sos, MSi | Kabag Umum |
| 4. Drs. H. Khaerul Saleh, M.Pkth.MM | Kabag Keuangan |
| 5. Sumartini, SH | Pelaksana |

IX. Jalannya Acara

(Di Mulai Pukul 14.27 WIB)

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM, WR. WB

- YTH. SDR. WAKIL WALIKOTA SERANG;
- YTH. PARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG;
- YTH. SDR. UNSUR TNI, POLRI, PERWAKILAN PENGADILAN NEGERI SERANG DAN PERWAKILAN DARI KEMENTERIAN AGAMA SERANG;
- YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG BESERTA PARA KEPALA SKPD DAN STAF AHLI PEMERINTAH KOTA SERANG;
- YTH. INSAN PERS SERTA TAMU UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA - TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS PERKENAAN-NYALAH KITA MASIH BISA BERTEGUR SAPA, BERKOMUNIKASI DENGAN NIAT YANG TULUS UNTUK TETAP MENJAGA TALISILATURRAHM.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA PIMPINAN UMAT DAN SURI TAULADAN KITA, BAGINDA RASULULLAH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KOTA SERANG**

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Serang, Banten Telp. (0254) 209173 - 209174

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG**

NOMOR : 08 /KEP.PIM-DPRD/XII/2012

TENTANG

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka hasil rapat Kepala Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kota Serang perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Memperhatikan :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
2. Keputusan DPRD Kota Serang Nomor 188.342/39 - Kep.DPRD/XI/2012 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.961-Huk/2012 Tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Serang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
4. Penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Hasil Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kota Serang akan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Serang dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Serang
pada Tanggal 21 Desember 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG,**

Ketua


Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA





Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos

BAMBANG JANOKO, SE

HIF FARIUDIN, SE

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kota Serang
 Nomor : 08 /Kep-Pim.DPRD/2012
 Tanggal : 21 Desember 2012

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang APBD TA.2013 yang dilakukan Kepala Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Serang dapat disimpulkan sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN	739.440.539.226,-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.694.448.534,-
	Pendapatan Pajak Daerah	36.000.000.000,-
	Hasil Retribusi Daerah	12.210.939.276,-
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.483.509.258,-
	DANA PERIMBANGAN	592.357.901.692,-
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.033.214.692,-
	Dana Alokasi Umum	513.769.007.000,-
	Dana Alokasi Khusus	35.555.680.000,-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.388.189.000,-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Pemerintah lainnya	58.154.701.000,-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.744.488.000,-
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya	8.489.000.000,-
2.	BELANJA	745.440.539.226,-
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	404.909.044.540,-
	Belanja Pegawai	348.813.604.540,-
	Belanja Hibah	43.750.750.000,-
	Belanja Bantuan Sosial	2.150.000.000,-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.948.200.000,-
	Belanja Tidak Terduga	1.244.490.000,-



PERUBAHAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPRD
TAHUN 2014

NO	KECAMATAN / PPK	KELURAHAN / DESA / PPS	TPS	PEMILIH		
				LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. SERANG		469	83.579	83.839	170.418
1		1. SERANG	55	10.672	10.448	21.120
2		2. CIPARE	55	10.733	10.446	21.179
3		3. SUMUR PECUNG	51	9.034	8.065	17.099
4		4. KOTA BARU	17	3.370	2.908	6.278
5		5. LOPANG	40	7.195	6.877	14.072
6		6. CIMUNCANG	54	10.355	9.964	20.319
7		7. UNYUR	77	14.583	13.970	28.553
8		8. SUKAWANA	10	1.162	1.705	3.471
9		9. LONTAR BARU	20	3.355	3.507	6.857
10		10. KALIDANDU	41	7.960	7.016	14.976
11		11. TERGONDOL	15	3.258	3.130	6.381
12		12. KAGUNGAN	26	5.175	5.001	10.177
	2. KASEMEN		181	34.340	32.858	68.998
13		1. KASEMEN	25	4.697	4.490	9.172
14		2. MESJID PRIYAYI	14	2.693	2.518	5.217
15		3. TERUMBU	17	3.011	2.915	5.926
16		4. WARUNG JAUD	15	2.980	2.854	5.834
17		5. BENDUNG	15	2.648	2.656	5.314
18		6. BANTEN	29	6.328	5.637	11.965
19		7. SAWAH LUHUR	22	3.744	3.752	7.496
20		8. KILASAH	14	2.762	2.677	5.357
21		9. KASUNYATAN	16	2.923	2.863	5.812
22		10. MARGALUYU	14	2.447	2.338	4.785
	3. WALANTAKA		161	29.794	28.637	58.431
23		1. WALANTAKA	7	1.479	1.451	2.940
24		2. CIGDONG	8	1.415	1.349	2.765
25		3. NYAPAH	8	1.527	1.462	2.989
26		4. PANGAMPELAN	17	2.850	2.825	5.675
27		5. KIARA	11	2.023	1.958	3.991
28		6. PAGER AGUNG	16	3.418	3.153	6.571
29		7. KALODRAN	13	2.353	2.256	4.611
30		8. KAPURON	11	2.035	1.967	4.002
31		9. TERITIH	17	3.027	2.949	5.976
32		10. PABUARAN	8	1.546	1.501	3.077
33		11. PASULUHAN	9	1.629	1.505	3.134
34		12. TEGALBANI	7	1.223	1.157	2.380
35		13. PIPITAN	22	4.096	3.883	7.959
36		14. LEBAK WANGI	7	1.260	1.191	2.451
	4. DURUG		107	18.977	18.828	38.805
37		1. CUPUG	7	1.616	1.490	3.106
38		2. TINGGAR	11	2.145	2.072	4.217
39		3. KEMAHISAN	14	2.663	2.620	5.485
40		4. CIPETE	10	1.755	1.704	3.460
41		5. DLAKU	15	2.680	2.596	5.276
42		6. PANGALAKSANA	11	2.028	1.833	3.859
43		7. SUKAWANA	10	1.577	1.347	2.924
44		8. SUKALAKSANA	10	1.854	1.747	3.601
45		9. DURUG MANIS	10	1.922	1.808	3.733
46		10. SUKAJAYA	9	1.536	1.411	2.947
	5. CIPOGOKJAYA		176	31.866	29.871	61.838
47		1. CIPOGOKJAYA	28	5.305	4.883	9.888
48		2. KARUNDANG	18	3.472	2.596	6.068
49		3. PANANCANGAN	29	4.320	4.194	8.514
50		4. BANJAR AGUNG	27	4.670	4.511	9.181
51		5. BANJARSARI	34	6.071	6.338	12.109
52		6. TEMBONG	13	2.587	2.351	4.938
53		7. DALUNG	13	2.683	2.392	4.975
54		8. GELAM	15	3.057	2.706	5.763

SPPD No.

Berangkat dari
(Tempat kedudukan)

pada tanggal

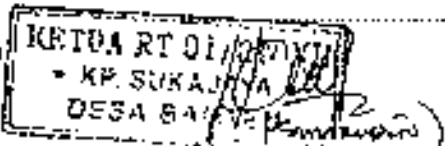
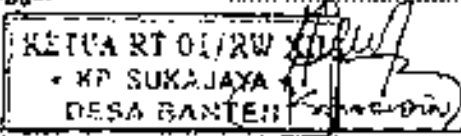
Ke



Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

.....



II. Tiba di : Berangkat dari :

Pada tanggal : Ke :

Kepala :  Kepala : 

III. Tiba di :  Berangkat dari : 

Pada tanggal : Ke :

Kepala :  Kepala : 

IV. Tiba di : Berangkat dari :

Pada tanggal : Ke :

Kepala : Pada tanggal :

Kepala :

V. Tiba Kembali di :

Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG



VI. CATATAN LAIN-LAIN :



VII. PERHATIAN



Pegawai yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No.
 Berangkat dari
 (Tempat kedudukan)
 pada tanggal
 Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

ii. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala  Kepala 

iii. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala  Kepala 

iv. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala  Kepala 

v. Tiba Kembali di :
 Pada tanggal
 Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

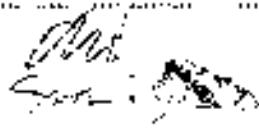
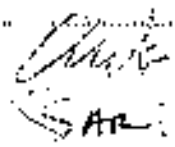




vi. CATATAN LAIN-LAIN :

vii. PERHATIAN
 Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No.

Berangkat dari
(Tempat kedudukan)
pada tanggal
Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

I.	Tiba di Pada tanggal Kepala		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	
III.	Tiba di Pada tanggal Kepala		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	
IV.	Tiba di Pada tanggal Kepala		Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	
V.	Tiba Kembali di Pada tanggal Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya			

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

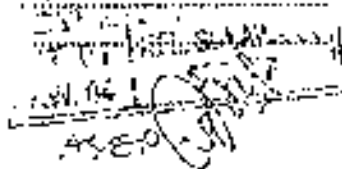

VII. PERHATIAN

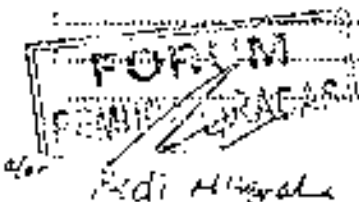

Pegawai yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No.
 Berangkat dari
 (Tempat kedudukan)
 pada tanggal
 Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

II. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala
 

III. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala
 

IV. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala

V. Tiba Kembali di :
 Pada tanggal :
 Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

.....

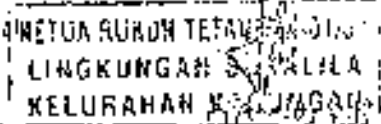
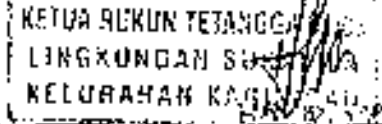
VI. CATATAN LAIN-LAIN :



VII. PERHATIAN
 Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

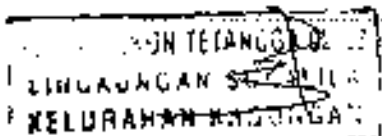
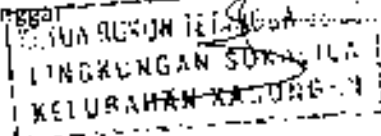
SPPD No.
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

Selaku Pelaksana teknis Kegiatan

[Handwritten Signature]

I. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala  Pada tanggal
Kepala 

II. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala  Pada tanggal
Kepala 

III. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala  Pada tanggal
Kepala 

V. Tiba kembali di
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


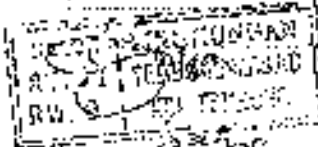
SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG


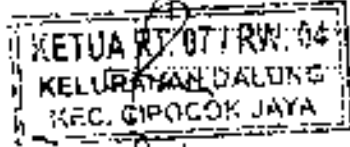
VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesafahan, kealpaannya.

SPPD No.
 Berangkat dari
 (tempat kedudukan)
 Pada tanggal
 Ke

Sefaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala
 
Saban *Saban*

III. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala
 
Lahmat *Lahmat*

IV. Tiba di Berangkat dari
 Pada tanggal Ke
 Kepala Pada tanggal
 Kepala

V. Tiba kembali di
 Pada tanggal
 Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

.....

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN
 Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesafahan, kealpaannya.

SPPD No.
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

KETUA RT. 03 / RW. 03
LINGBUNGAN
KELURAHAN SELAM

Kendang W

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

KETUA RT. 03 / RW. 03
LINGBUNGAN
KELURAHAN SELAM

Kendang W

III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



IV. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

KETUA RT. 04 / RW. 03
KELURAHAN DALUNG
KEC. CIPOCOK JAYA

JATIM

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

KETUA RT. 04 / RW. 03
KELURAHAN DALUNG
KEC. CIPOCOK JAYA

JATIM

V. Tiba kembali di
Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN

Pegabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No. :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

Ami S

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



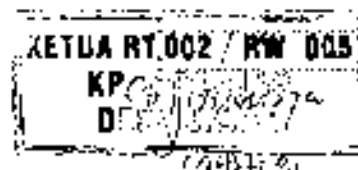
Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



IV. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



V. Tiba kembali di
Pada tanggal


Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaiannya.

SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Pada tanggal : Ke :	
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan 	
II. Tiba di Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal : Kepala
III. Tiba di Pada tanggal Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
V. Tiba kembali di Pada tanggal Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	
SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG 	
VI. CATATAN LAIN LAIN	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

SPPD No. :
Berangkat dari
(Tempat kedudukan) :
pada tanggal :
Ke :

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : RT 03/02
KP. COWE
KEL. SERANG
K. 4.5.2.2

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : RT 03/01
KEL. SERANG
K. 4.5.2.1

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala : RT 03/01
KEL. SERANG
K. 4.5.2.1

V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

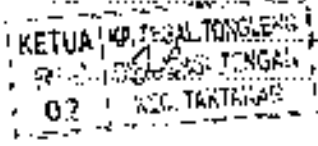
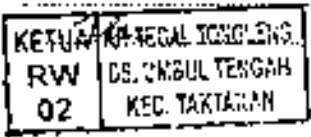
VI. CATATAN LAIN-LAIN :

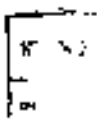
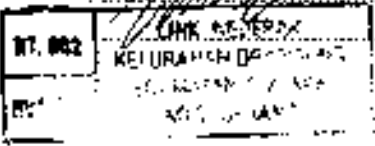
VII. PERHATIAN
Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No.
Berangkat dari
(Tempat kedudukan)
pada tanggal
Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala


III. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala


IV. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala


V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN
Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

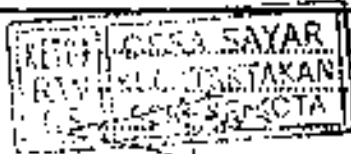
SPPD No.

Berangkat dari
(Tempat kedudukan)
pada tanggal
Ke



Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

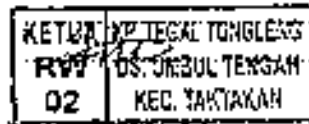
II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



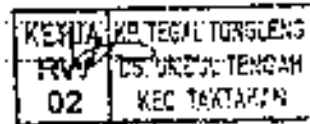
Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala



Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala



IV. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

[Handwritten signature]

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

[Handwritten signature]

V. Tiba Kembali di
Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VI. CATATAN LAIN-LAIN :


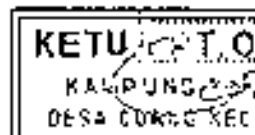

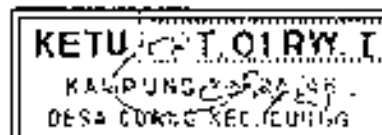


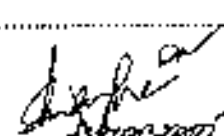
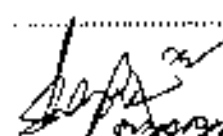
VII. PERHATIAN



Pegawai yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No.
Berangkat dari
(Tempat kedudukan) :
pada tanggal :
Ke :

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala :  Pada tanggal : 
Kepala :  Kepala : 
Cahyadi *Cahyadi*

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala :  Kepala : 

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala :  Kepala : 
H. ANIS SURUR SALAM, SH.M.S *H. ANIS SURUR SALAM, SH.M.S*
NIP. 1952040519800014057 *NIP. 1952040519800014057*

V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN
Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No. :

Berangkat dari
(Tempat kedudukan) :

pada tanggal :

Ke :

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

II. Tiba di :

Pada tanggal :


Kepala :

Berangkat dari :

Ke :

Pada tanggal :

Kepala :

III. Tiba di :

Pada tanggal :

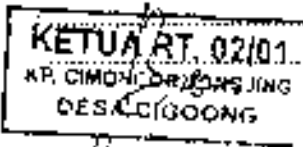
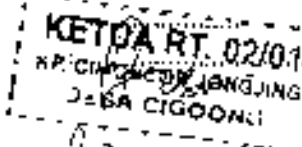
Kepala :

Berangkat dari :

Ke :

Pada tanggal :

Kepala :

IV. Tiba di :

Pada tanggal :

Kepala :

Berangkat dari :

Ke :

Pada tanggal :

Kepala :

V. Tiba Kembali di :

Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG



VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERMATIAN

Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

SPPD No. :
Berangkat dari :
(Tempat kedudukan) :
pada tanggal :
Ke :

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

[Handwritten signature]

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : *[Handwritten signature]* Pada tanggal :
Kepala : *[Handwritten signature]*

III. Pada tanggal : Ke :
KELURAHAN TAKTAKAN
KOTA SERANG
ERLINAWATI, S.AP
KIP. 18720320 20004 2 001

IV. RUKUN TETANGGA
KP. CORI
KELURAHAN TAKTAKAN
Kepala : Berangkat dari :
Ke : Pada tanggal :
Kepala : RUKUN TETANGGA
KP. CORI
KELURAHAN TAKTAKAN

V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG



[Handwritten signature]


VI. CATATAN LAIN-LAIN :



VII. PERHATIAN
Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesafahan, kealpaannya.

SPPD No.
Berangkat dari
[Tempat kedudukan]
pada tanggal
Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala


III. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala


IV. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala


V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

VII. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN
Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

**DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SERANG**

ACARA

1. PENYAMPAIAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013
2. PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA USUL WALIKOTA SERANG
3. PENUTUPAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2012

HARI Jumat
TANGGAL 21 Desember 2012
TEMPAT Gedung DPRD Kota Serang (Graha Kawunganten)

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	AMBAT, M. H.	KABID	DINAS	
2	
3	H.	
4	H. ...	KABID	...	
5	H. ...	Depy. Kab	Depang Kab	
6	Adang D.	TA	DPKO	
7	...	KABID	...	
8	
9	Komandani	
10	...	Koordinator	Ko. Kasamen	10
11	H.	11
12	A. ...	KA	...	12
13	13
14	H.	14
15	...	KABID	...	15
16	H.	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	BUDI M.	...	WALANTARA	21
22	DTK	22
23	23
24	24
25	25
25	PIYANTU	25
27	ASE ...	KAB. KS	BPAKKB	27
28	H.	28
29	29
30	30

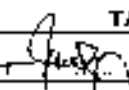
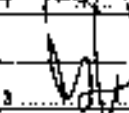
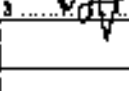
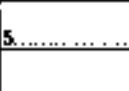
Kawunganten

SIDANG

**DAFTAR HADIR UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SERANG
ACARA**

1. PENYAMPAIAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013
2. PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA USUL WALIKOTA SERANG
3. PENUTUPAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2012

HARI : Jumat
TANGGAL : 21 Desember 2012
TEMPAT : Gedung DPRD Kota Serang (Graha Kawinganten)

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	PETRAUS D F	Dm Rail 0227	Muswadi	
2	AKHMAD BELAL	KA. BKD	BKD	
3	H. HIDAYAT	KADIS	DDU	
4	M.	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Waktu : 12.00
Tanggal : 21 Agustus 2013
Tempat : RT 02 / XIII Kp. PAMARICAN

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA YANGAN
1	IKROM	PAMARICAN	1
2	M. SALEH	—	2
3	SARIFUDIN	PAMARICAN	3
4	PAUSTOFA	—	4
5	ABDUL LALIF	—	5
6	KAEFI	—	6
7	HASRI	—	7
8	KOMARUDIN	—	8
9	ROSIMAN	—	9
10	DIDIN	—	10
11	RUDI	—	11
12	MAHMO	—	12
13	HAWASI	—	13
14	JENAL	—	14
15	ROJUDIN	—	15
16	SUHILI	—	16
17	SAFRUDIN	—	17
18	Tajudin	—	18
19	Osi	—	19
20	Hasan	—	20
21	MAD SALIM	KRANG SERANG	21
22	Asri Bai	—	22
23	SALABIAN	—	23
24	BILIS	—	24
25	ROHIM	—	25
26	GONDI	—	26
27	JENAL	—	27
28	MARHADI	—	28
29	LUKMAN	—	29
30	ISMATI	—	30
31	IB BAJUNI	—	31
32	USE. SANTI	—	32
33	MUKHIS	—	33
34	TOKI	—	34
35	HADI HAWASI	—	35
36	HADI	—	36
37	JANI	Kp ODEL	37
38	JEMI	Kp KARANGSERANG	38
39	JAI	Kp AMBON	39
40	Jurnal	—	40

PEMBAK PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUSANTINI, SH

NIP.198731012013002012

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SFRANG

Hari: Senin
Tanggal: 22 Agustus 2013
Tempat: Kelurahan Sewak Lumer

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SATANI	Sewak Lumer	[Signature]
2	SAYUTI		[Signature]
3	H. KARNADO		[Signature]
4	JARALI A		[Signature]
5	USADJANI		[Signature]
6	ENRO ATMAJA		[Signature]
7	SAMAN		[Signature]
8	SADGI		[Signature]
9	HEMI		[Signature]
10	ARSAO		[Signature]
11	BAOANG		[Signature]
12	SABERI		[Signature]
13	HASAN		[Signature]
14	HAMIM		[Signature]
15	SUPRI	Cangkring	[Signature]
16	JUBEDI		[Signature]
17	JUPREK		[Signature]
18	SARIWIN		[Signature]
19	SIF		[Signature]
20	RIZAN		[Signature]
21	NASSAHIDI		[Signature]
22	HO LIE		[Signature]
23	MEDI		[Signature]
24	DAMIN		[Signature]
25	DANI		[Signature]
26	SELAMET		[Signature]
27	HER		[Signature]
28	MAD		[Signature]
29	SATIBI		[Signature]
30	IWAN	Sewak Lumer	[Signature]
31	M. TAM		[Signature]
32	ROHANI		[Signature]
33	ABIP		[Signature]
34	ADIA		[Signature]
35	SITRI		[Signature]
36	MAMUD		[Signature]
37	MADIAL		[Signature]
38	M. YANI		[Signature]
39	SIMAN		[Signature]
40	AYUN		[Signature]

SEJARAH PELAKSANAAN TERMINUS KEGIATAN

[Signature]
SUMARTI, S.P.
NIK 19471201 203001 2-391

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMUKIMAN KOTA SERANG

Hari: Senin
Tanggal: 26 Agustus 2023
Tempat: Kelurahan Bantekar

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hamsir	Jerakah	1.
2	TISI	Jerakah	2.
3	ABIM	Jerakah	3.
4	Tarmidi	Jerakah	4.
5	Mad Hasmi	Jerakah	5.
6	SAPUDIN RT.	Jerakah	6.
7	RONI	Jerakah	7.
8	PACMI	Jerakah	8.
9	HU DARI	Jerakah	9.
10	USMAD ASRO	Jerakah	10.
11	AJIP	Jerakah	11.
12	USTAD. Menni	Jerakah	12.
13	RUBIN	Jerakah	13.
14	MADI	Jerakah	14.
15	PANDI	Jerakah	15.
16	LATIF	Jerakah	16.
17	IMUL	Jerakah	17.
18	KHOTIB	Jerakah	18.
19	MALIK	Jerakah	19.
20	SM	Jerakah	20.
21	B HIRAGUM	Kecamatan	21.
22	ZAKARIA	Kecamatan	22.
23	ROHAN	Kp. Sekawali	23.
24	NAIM. RT	"	24.
25	SAPUDIN	"	25.
26	MUTHIDI	"	26.
27	SARII	"	27.
28	YANI	"	28.
29	YULIUS	"	29.
30	MAMIN	"	30.
31	TOMIR	"	31.
32	TAMCIS	"	32.
33	RUDI	"	33.
34	RUDIN	"	34.
35	MUTAI	"	35.
36	BAHRANI	"	36.
37	IYAR	"	37.
38	IBU - MASTARIYA	"	38.
39	ANICAH	"	39.
40	JUNTIYAH	"	40.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTINI, SH

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG III

Minggu Selasa
Tanggal 17 Agustus 2013
Tempat Rayon Tegalrejo P.S. Cakraman

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	JALYA	Bontar	1
2	SARQINI		2
3	MAK		3
4	NAEMAN		4
5	HASAN		5
6	MAJADI		6
7	H. Haerudin		7
8	H. Samsudin		8
9	Hadroni		9
10	RI. SATHRE		10
11	HAIM		11
12	Kohman		12
13	KOHIMI		13
14	ARI		14
15	DIKI	Cakraman	15
16	MUL		16
17	NUR		17
18	JENI		18
19	Wahyu		19
20	YUNI		20
21	MADYEREN		21
22	FAHRI		22
23	SUMITA		23
24	SAMUDRA		24
25	ANBA		25
26	PANI DWI	Banney	26
27	ELINDA		27
28	DANI		28
29	DWANE SHAWA		29
30	KOSIM		30
31	KADMA		31
32	KARTAMIN		32
33	DANDA		33
34	WARCA		34
35	SUKRI		35
36	TASBI		36
37	LISTAD UJANG		37
38	TANYAD.		38
39	WASARI		39
40	IWAN		40

PELIKAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


EL MARTINASH
NIP. 19821301 2003 2 013

DAFTAR HADIR KEGIATAN PESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG ...

Mari Rabu
Tanggal 11 Agustus 2013
Tempat RW 05 - Desa Sukat

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. XUDIMAN	Dusun Jambak	
2	H. XUDIMAN	"	
3	MURAH	"	
4	H. BARAK	Sayar	
5	SAMA	"	
6	Ally	"	
7	H. RUMAH	"	
8	BARAK	"	
9	H. MARI	Kelompok	
10	BARAK	"	
11	H. MARIAN	Sayar	
12	BARAK	"	
13	BARAK	"	
14	BARAK	"	
15	NATIRIL	"	
16	NATIRIL	"	
17	NATIRIL	"	
18	NATIRIL	"	
19	BARAK	"	
20	BARAK	"	
21	BARAK	Batu Gede	
22	BARAK	"	
23	BARAK	"	
24	BARAK	"	
25	BARAK	"	
26	BARAK	"	
27	BARAK	"	
28	BARAK	Batu Gede	
29	BARAK	Batu Gede	
30	BARAK	"	
31	BARAK	"	
32	BARAK	Batu Gede	
33	BARAK	"	
34	BARAK	"	
35	BARAK	"	
36	BARAK	Batu Gede	
37	BARAK	"	
38	BARAK	"	
39	BARAK	Batu Gede	
40	BARAK	"	

PEJABAT PELAKSANA TERKHUS KEGIATAN

[Signature]
SUMARTO, S.P.
N.P. 19821101 20001 2 011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Nomor: KAMIS
Tangga: 22 Agustus 2013
tempat: RW 02 14 - Tagal - Tangkayud

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	M ALI	Kp. Tagal Tangkayud	[Signature]
2	SUANDI	"	[Signature]
3	UDIN	"	[Signature]
4	JUMARI	"	[Signature]
5	SATMAN	"	[Signature]
6	HASANUDIN	"	[Signature]
7	HABRUDIN	"	[Signature]
8	SERMOIN	"	[Signature]
9	MASDUKI	"	[Signature]
10	SAHILSI	"	[Signature]
11	SAIDIL	"	[Signature]
12	MUSLIM	"	[Signature]
13	SAPRONI	"	[Signature]
14	MADPEL	"	[Signature]
15	SADJANI	"	[Signature]
16	DARUN	"	[Signature]
17	HALIM	"	[Signature]
18	REXI	"	[Signature]
19	JENURI	"	[Signature]
20	KUSNI	"	[Signature]
21	ASNAWI	"	[Signature]
22	VILLI	"	[Signature]
23	RAMANI	"	[Signature]
24	KARIM	"	[Signature]
25	ABDUL	"	[Signature]
26	TAMIR	"	[Signature]
27	RAMAD	Kp. Kumpang	[Signature]
28	MUHAMMAD	"	[Signature]
29	MASUKI	"	[Signature]
30	MASUKI	"	[Signature]
31	MARJUK	"	[Signature]
32	SUER	"	[Signature]
33	TARDI	"	[Signature]
34	HENDRI	"	[Signature]
35	RAUL	"	[Signature]
36	YMANI	"	[Signature]
37	AHARI	"	[Signature]
38	Sudirman	"	[Signature]
39	Udyan	"	[Signature]

DIBARU' PE. AKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTINI, SH
NIP. 1963121019854001

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG ...

Jumlah
Tangga 23 Agustus 2013
Tempat RT 002/103 Gug. Kobaran kel. Drangup

NO.	NAMA	ALAMAT	PANDA TANGAN
1	M. Sidiq	Kepulauan G07	1
2	Sabri	"	2
3	Huda	"	3
4	Amin	"	4
5	Yandi	"	5
6	Fubi	"	6
7	Pardi	"	7
8	JAKI	"	8
9	M. H. M. Sidiq	"	9
10	MARIM	Drangup RT 002	10
11	M. H. M. Sidiq	"	11
12	M. H. M. Sidiq	"	12
13	M. H. M. Sidiq	"	13
14	M. H. M. Sidiq	"	14
15	MUMEDI	"	15
16	HERI	"	16
17	HARIANTO	"	17
18	Sabilus	"	18
19	Halim	"	19
20	WARDI	"	20
21	IBADI	"	21
22	Fosuki	"	22
23	IRMAH	"	23
24	WANI	"	24
25	KOTIK	"	25
26	Hawati	"	26
27	Hawati	"	27
28	Sapandi	KP. Kofe	28
29	MUBATI	"	29
30	D. Sidiq	"	30
31	Maula	"	31
32	Maula	"	32
33	Maula	"	33
34	Maula	KP. Drangup	34
35	H. Wandi	"	35
36	JAKI	"	36
37	M. H. M. Sidiq	"	37
38	Fachri	"	38
39	M. H. M. Sidiq	"	39
40	M. H. M. Sidiq	"	40

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

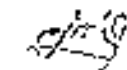

SUMARTINI, SH
NIP. 198111012010012011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Waktu: 08.00
Tanggal: 26 Agustus 2013
Tempat: RS. Fajar - Taktalean

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Abdullah	Cicatih	
2	Abdullah Adeli	Dela Bata	
3	Alvin	Umbul Tegal	
4	Harini	Clubul Tegal	
5	Isma	-	
6	Hadi	Mungah	
7	Haris	-	
8	Sarinda	-	
9	Fitri	-	
10	Mamad	Tegal Tegal	
11	Fatullah	Pajenean	
12	Harun	Pajenean	
13	Harun	Pajenean	
14	Suwardi	Tegal Tegal	
15	Harun	Clubul Tegal	
16	Hadi	-	
17	Abdullah Al-B.	Pajenean	
18	Harun	-	
19	Harun	-	
20	Harun	-	
21	Harun	Pajenean	
22	Hadi	-	
23	Harun	-	
24	Hadi	-	
25	Hadi	Pajenean	
26	Hadi	-	
27	Harun	-	
28	Harun	-	
29	Harun	-	
30	Harun	-	
31	Harun	Legde Bihidaban	
32	Harun	-	
33	Harun	-	
34	Harun	-	
35	Harun	-	
36	Harun	Umbul Tegal	
37	Harun	-	
38	Harun	Kabonki	
39	Harun	Clubul Tegal	
40	Harun	-	

PEJADAT PELAYANAN TEKNIK KEGIATAN


SUMARTINI, S.H.
NIP. 19521101190001001

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
CAKUPAN PEMILIHAN KOTA SERANG

Waktu: Selasa
Tanggal: 27 Agustus 2013
Tempat: DS. Cendek Kupuk - Tanjungsari

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ANSORI	DRC Kota Serang	[Signature]
2.	NURHAYATI	Taman Jago	[Signature]
3.	Praka	"	[Signature]
4.	Badah	"	[Signature]
5.	Kusni	Taman Baru	[Signature]
6.	Supriatna	"	[Signature]
7.	SOPHAN	"	[Signature]
8.	Purba	"	[Signature]
9.	Kusni	"	[Signature]
10.	Habibi	Taman Jago	[Signature]
11.	Satrio	"	[Signature]
12.	MHAWATI	"	[Signature]
13.	HAJI	Taman Baru	[Signature]
14.	Hajunah	"	[Signature]
15.	Sanjidi	"	[Signature]
16.	Fikri	"	[Signature]
17.	Husni	"	[Signature]
18.	Adhianto	Taman Jago	[Signature]
19.	Haris	Taman Baru	[Signature]
20.	Haris	"	[Signature]
21.	Haris	"	[Signature]
22.	Safar	Taman Jago	[Signature]
23.	Lumiyati	Taman Jago	[Signature]
24.	Lumiyati	"	[Signature]
25.	Wahid	"	[Signature]
26.	Sanjidi	Taman Baru	[Signature]
27.	Rohandi	Taman Jago	[Signature]
28.	Rohandi	"	[Signature]
29.	Nardi	"	[Signature]
30.	Uti	"	[Signature]
31.	Uti	"	[Signature]
32.	Xsifa	"	[Signature]
33.	Xsifa	"	[Signature]
34.	Abdulhikmah	"	[Signature]
35.	Uti	Taman Baru	[Signature]
36.	Uti	"	[Signature]
37.	Uti	"	[Signature]
38.	Petani	"	[Signature]
39.	Nurhikmah	Taman Jago	[Signature]
40.	Fahar	"	[Signature]

PELAKSANA KEGIATAN

[Signature]
SUMARTINI, SH
NIP. 19721101 200903 2 1111

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG . . .

No: : 144
Tanggal: : 21 Agustus 2013
Tempat: : kel. Cipocok Jaya

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	SAMCAWI	CIPOCOC	1. [Signature]
2.	Romli Hasan		2. [Signature]
3.	HARSA		3. [Signature]
4.	Mubarak		4. [Signature]
5.	Julia		5. [Signature]
6.	H. IYUN		6. [Signature]
7.	Deneng		7. [Signature]
8.	Heri		8. [Signature]
9.	Sigit Purnawan		9. [Signature]
10.	Prasman		10. [Signature]
11.	Ravi		11. [Signature]
12.	NERLIYAH		12. [Signature]
13.	wanudin		13. [Signature]
14.	BALIKAH		14. [Signature]
15.	yuda		15. [Signature]
16.	Wati	CIPOCOC	16. [Signature]
17.	weni		17. [Signature]
18.	Siti Siti		18. [Signature]
19.	SATI		19. [Signature]
20.	IRAH		20. [Signature]
21.	Komar		21. [Signature]
22.	Choir		22. [Signature]
23.	AMIDI		23. [Signature]
24.	+bundi		24. [Signature]
25.	Salahudin		25. [Signature]
26.	Ade abis		26. [Signature]
27.	Padrah		27. [Signature]
28.	Umar		28. [Signature]
29.	Pame		29. [Signature]
30.	Udin		30. [Signature]
31.	TOTO		31. [Signature]
32.	CHORO		32. [Signature]
33.	Fitriyah		33. [Signature]
34.	Samsun		34. [Signature]
35.	Tarik		35. [Signature]
36.	ahm		36. [Signature]
37.	Ecep Suharna		37. [Signature]
38.	Zamsul		38. [Signature]
39.	Uyang		39. [Signature]
40.	Yoni		40. [Signature]

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

[Signature]
SUMARTINI, SH
NIP. 298111013010012011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG .J.I.

Mari : Paksi
Yangga : 21 Agustus 2013
Tempat : kel. Cipocok Jaya

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	SAMICAWI	CIPOCOC	1.
2.	Romli hasan		2.
3.	HARDA		3.
4.	Mubarak		4.
5.	fahri		5.
6.	H. IPUN		6.
7.	Beneng		7.
8.	Agri		8.
9.	SIGIT puimawan		9.
10.	Harmanu		10.
11.	Ravi		11.
12.	JERLIYAH		12.
13.	wahyudin		13.
14.	BAHMAN		14.
15.	YUDA		15.
16.	Idi	CIPOCOC	16.
17.	weni		17.
18.	Siti dini		18.
19.	SAFI		19.
20.	IKAH		20.
21.	Kemar		21.
22.	TAHRA		22.
23.	MIDI		23.
24.	Handi		24.
25.	Laksmi		25.
26.	Ade abis		26.
27.	Rafael		27.
28.	Umar		28.
29.	Rahel		29.
30.	Udin		30.
31.	TOTU		31.
32.	OPUS		32.
33.	Agri wati		33.
34.	Sani Sani		34.
35.	TAPIK		35.
36.	Ahan		36.
37.	cecep sriharma		37.
38.	Zamsur		38.
39.	Ugung		39.
40.	Yoni		40.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTIN SH
NIP. 19821101 201001 2 031

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2013
Tempat : Kelurahan Banjar Agung

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Sobari	Banjar Agung	1.
2.	Johan Anwar		2.
3.	Zumaidi		3.
4.	Indi		4.
5.	ZENAL		5.
6.	Imat		6.
7.	Irfan		7.
8.	Carto		8.
9.	Jaya		9.
10.	Yana		10.
11.	Sobari wahyuden		11.
12.	Hon		12.
13.	Redi		13.
14.	Kurniawan		14.
15.	ARIS		15.
16.	Iman		16.
17.	Bahagi		17.
18.	H. Dep		18.
19.	Irma halimah		19.
20.	Vera		20.
21.	Azi		21.
22.	Yudi		22.
23.	Abdul -		23.
24.	yana		24.
25.	Deden		25.
26.	Arini		26.
27.	Gdi		27.
28.	Rona		28.
29.	Abas		29.
30.	Sugri		30.
31.	Quin		31.
32.	Orin		32.
33.	Hasan		33.
34.	Utep		34.
35.	Sugandi		35.
36.	Jarab		36.
37.	Efan		37.
38.	Agus		38.
39.	anis		39.
40.	Doni		40.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTINI SH
NIP. 15823101 201001 2 011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG .1.

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Agustus 2013
Tempat : Rm 05 Gtya Perumahan APCI

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Mulyo	GPA	1. Mulyo
2.	PANDI		2. Pandi
3.	AMIN		3. Amin
4.	Samsul		4. Samsul
5.	SARIPUDIN		5. Saripudin
6.	MIRA		6. Mira
7.	Iman		7. Iman
8.	CANDRA		8. Candra
9.	Abu		9. Abu
10.	Supri		10. Supri
11.	WAWAT		11. Wawat
12.	NALI		12. Nali
13.	Jasman		13. Jasman
14.	Asnawati		14. Asnawati
15.	AYIP		15. Ayip
16.	heri		16. Heri
17.	Abang		17. Abang
18.	OMAR		18. Omar
19.	FIRAT		19. Firat
20.	EENDI	GPA	20. Eendi
21.	Jani		21. Jani
22.	Mahat		22. Mahat
23.	Yanto		23. Yanto
24.	Wan		24. Wan
25.	Rahm		25. Rahm
26.	Surga		26. Surga
27.	ARTIS		27. Artis
28.	Herdi		28. Herdi
29.	YAYAT		29. Yayat
30.	Rahmat		30. Rahmat
31.	RULI		31. Ruli
32.	Ali		32. Ali
33.	ZAMRONI		33. Zamroni
34.	Martan		34. Martan
35.	KIFIKI		35. Kifiki
36.	Wahid		36. Wahid
37.	Rahman		37. Rahman
38.	Abin		38. Abin
39.	Zulha		39. Zulha
40.	IVA		40. Iva

PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN

(Signature)

SUZMARTINI, SP
N.P. 19821301 201001 2 013

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG ...

Mari : siswa
Tanggal : 27 Agustus 2013
Tempat : Meskomkom Ciputat Jaya

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Dani	Ciputat Jaya	1. Dani
2.	EKA		2. Eka
3.	Suparman		3. Suparman
4.	Andika		4. Andika
5.	Adang		5. Adang
6.	Yusuf		6. Yusuf
7.	Umm Umamah		7. Umm
8.	ETIK		8. Etik
9.	Sahlanudin		9. Sahlanudin
10.	ERLI: errawati		10. ERLI
11.	DEDI		11. Dedi
12.	AGUNG		12. Agung
13.	Farisi		13. Farisi
14.	EPENDIS		14. Ependis
15.	fuad. m.		15. Fuad
16.	Abdulhak		16. Abdulhak
17.	Yeni		17. Yeni
18.	ANG		18. Ang
19.	Patin fitrah		19. Patin
20.	ahmad		20. Ahmad
21.	NISA		21. Nisa
22.	WIDIASIH		22. Widiasih
23.	udin		23. Udin
24.	ela		24. Ela
25.	eda		25. Eda
26.	yuni		26. Yuni
27.	Yuni		27. Yuni
28.	dris		28. Dris
29.	herdi		29. Herdi
30.	IMAM		30. Imam
31.	UTAMI Lesari		31. Utami
32.	meti		32. Meti
33.	yuyun		33. Yuyun
34.	adi		34. Adi
35.	UlpatH		35. UlpatH
36.	YAMI		36. Yami
37.	Salah		37. Salah
38.	Gesti		38. Gesti
39.	nigra		39. Nigra
40.	hansel		40. Hansel

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTINI, S.P
NIP. 198211012010022011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG ...21

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2013
Tempat : Kecamatan Cipocok Jaya

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Daud	Cipocok Jaya	1. Daud
2.	EKA		2. EKA
3.	Suparman		3. Suparman
4.	Angga		4. Angga
5.	Jadana		5. Jadana
6.	Kiyah		6. Kiyah
7.	Wan Umagah		7. Wan Umagah
8.	ETIK		8. ETIK
9.	Lahudin		9. Lahudin
10.	ERTU. ERMAWATI		10. ERMAWATI
11.	DEDI		11. DEDI
12.	AGUNG		12. AGUNG
13.	FARIS		13. FARIS
14.	EPENDIS		14. EPENDIS
15.	FUAD. M.		15. FUAD. M.
16.	Abdullah		16. Abdullah
17.	Nani		17. Nani
18.	ANIF		18. ANIF
19.	Datu Huda		19. Datu Huda
20.	ahmad		20. ahmad
21.	WISA		21. WISA
22.	WIDIASIH		22. WIDIASIH
23.	Uzer		23. Uzer
24.	elA		24. elA
25.	eds		25. eds
26.	yuri		26. yuri
27.	agus		27. agus
28.	aris		28. aris
29.	herdi		29. herdi
30.	IMAM		30. IMAM
31.	UTANI Lesari		31. UTANI Lesari
32.	meti		32. meti
33.	yuyun		33. yuyun
34.	adi		34. adi
35.	ULFATH		35. ULFATH
36.	YAMI		36. YAMI
37.	Saleh		37. Saleh
38.	Gesti		38. Gesti
39.	nina		39. nina
40.	hammad		40. hammad

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTI, N. SH
NIP.19821101200012013

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESSES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG IV

Waktu
Tanggal
Tempat

21 Agustus 2013
Cipeaung

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	IRFAL MASEDIAN	Cipeaung	[Signature]
2	Sukmajaya	-	[Signature]
3	KOLIGADI	-	[Signature]
4	tumami	-	[Signature]
5	SARK BAEHADI	-	[Signature]
6	toni Hartawan	Cipeaung - cang	[Signature]
7	Poni Cudiyanti	-	[Signature]
8	Eri Sumartini	-	[Signature]
9	ALFIAH	-	[Signature]
10	Taswirudin	-	[Signature]
11	Eko Gunawan	-	[Signature]
12	WAHYU IRWAN	-	[Signature]
13	ARDIYANTO	-	[Signature]
14	Pahwodani	-	[Signature]
15	ERUDITE	Cipeaung - cang	[Signature]
16	Kardi Muffalim	-	[Signature]
17	Ima Nurima	-	[Signature]
18	Jufu Susanti	-	[Signature]
19	Kiki Dwi Pratiwi	-	[Signature]
20	AGUNG MUGROHO	-	[Signature]
21	Ida padliyati	-	[Signature]
22	Lita juliantH	Cipeaung	[Signature]
23	GUGUN	-	[Signature]
24	HERI NURIZAL ALIAN	-	[Signature]
25	Nafa Anggraeni	-	[Signature]
26	Sahara	-	[Signature]
27	ALDI KHAN I.	-	[Signature]
28	SUBEMI	-	[Signature]
29	Ponfani Rahman	-	[Signature]
30	DEDI REZMADI	-	[Signature]
31	MARTIN	-	[Signature]
32	edwar	Cipeaung - cang	[Signature]
33	Wardini	-	[Signature]
34	Gustawan	-	[Signature]
35	Hafa Gunhoro	-	[Signature]
36	FATAH HASAN	-	[Signature]
37	Madroji	-	[Signature]
38	Sakur dini	-	[Signature]
39	Mustafar	-	[Signature]
40	DARROBI	-	[Signature]

PEJABAT PELAYANAN TEKNIS KEGIATAN

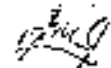
[Signature]
SUMASTINI, SP
NIP.19821101200312001

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAFRAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Mari Kamis
Tanggal 22 Agustus 2013
Tempat kec. walamandera

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	TUHADI	kec. walamandera	1. Tuhandi
2.	Nurwahid	"	2. Nurwahid
3.	SALWATI	"	3. Salwati
4.	MARJONO	"	4. Marjono
5.	Ech Lumnas	"	5. Ech Lumnas
6.	Marlian Ruman	"	6. Marlian Ruman
7.	SUAGITO	"	7. Suagito
8.	Pradono	"	8. Pradono
9.	AHMAD ZAIMI	"	9. Ahmad Zaimi
10.	Juli	"	10. Juli
11.	Yudi Pujiyasa	"	11. Yudi Pujiyasa
12.	ZAINAL ARIFFIN	walamandera	12. Zainal Arifin
13.	HENOKI MAUKI	"	13. Henoki Mauki
14.	Wayu Liana	"	14. Wayu Liana
15.	Vinodjudin	"	15. Vinodjudin
16.	Achman Mansyur	"	16. Achman Mansyur
17.	Tuziana	"	17. Tuziana
18.	Damarwati	"	18. Damarwati
19.	Hamam Purnaman	"	19. Hamam Purnaman
20.	Subandi	"	20. Subandi
21.	Wijaya Triana	"	21. Wijaya Triana
22.	Ali Kasrik	kec. walamandera	22. Ali Kasrik
23.	PURBANO	"	23. Purbano
24.	AGUS WIYANTO	"	24. Agus Wiyanto
25.	HARJONO	"	25. Harjono
26.	IMAN HERMANA	"	26. Iman Hermana
27.	Ruswah Sitarta	"	27. Ruswah Sitarta
28.	Supriatna	"	28. Supriatna
29.	ade Irma	"	29. Ade Irma
30.	Deli Satrio	"	30. Deli Satrio
31.	Mubaloh	kec. walamandera	31. Mubaloh
32.	EDDY NAMANTO	"	32. Eddy Namanto
33.	Mini Andijah	"	33. Mini Andijah
34.	SYAERIADI	"	34. Syaeriadi
35.	Juwahdi	"	35. Juwahdi
36.	Yoni Pusita Puri	"	36. Yoni Pusita Puri
37.	YUSMINTI	"	37. Yusminti
38.	SUHERMAN	"	38. Suherman
39.	HOMAH	"	39. Homah
40.	EMPIIT	"	40. Empiit

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SUSARTHA SH
NIP. 19621101 200303 2 001

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG ...

hari: Jumat
Tanggal: 23 Agustus 2013
Tempat: ...

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Lina Liliyani	Cung	1. Lina
2.	Glenn Fauzola	"	2. Glenn
3.	INDAH LUTFIKASARI	"	3. Indah
4.	Warda F. Yanti	"	4. Warda
5.	Nurwahyuni	"	5. Nurwahyuni
6.	ABDUL FATHIR	kec. cung	6. Abdul Fathir
7.	DENDRA	"	7. Dendra
8.	INDA TRIYADI	"	8. Ina
9.	Lutfiana	"	9. Lutfiana
10.	Syahrudin	"	10. Syahrudin
11.	RINIE Diniyah	"	11. Rinie
12.	Madia	"	12. Madia
13.	YOT. GOPARHAM	"	13. Yot
14.	ALGI ARMANSYAH	kec. cung	14. Algi
15.	U. Muktarudin	"	15. Muktarudin
16.	Amalia	"	16. Amalia
17.	FEROI ARIE	"	17. Feroi
18.	Dalaludin	"	18. Dalaludin
19.	M. Jordan	"	19. Jordan
20.	Defahadi	"	20. Defahadi
21.	M. Yamin	"	21. Yamin
22.	Hilman	kec. cung	22. Hilman
23.	RAMAYADI	"	23. Ramayadi
24.	AGUS HERMANSYAH	"	24. Agus
25.	Widodo	"	25. Widodo
26.	IGAH AHMADA	"	26. Ighah
27.	Wahdat	"	27. Wahdat
28.	MUFAN PUTRA	"	28. Mufan
29.	Harahap Kusna	kec. cung	29. Harahap
30.	FIKRI HESSADA	"	30. Fikri
31.	RHOWAN DARUSALAM	"	31. Rhowan
32.	Munandar	"	32. Munandar
33.	ILLO Nurhalimah	"	33. Illo
34.	Umanis	"	34. Umanis
35.	Thermin	"	35. Thermin
36.	TAKTA AZHILLA	"	36. Takta
37.	Hudi Duhartaadi	"	37. Hudi
38.	SAHA RAHMA	kec. cung	38. Saha
39.	wahyu azzalali	"	39. Wahyu
40.	CIGITI ta	"	40. Cigiti

PEJABAT PELAKSANA TEKNIKSI KEGIATAN


SUMARTONO
 NIP. 19671104 2008 3 011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Hari : Senin
Tanggal : 26 Agustus 2013
Tempat : kel. terpis

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Jurney	kel. terpis	[Signature]
2	ADIB KODARI	"	[Signature]
3	Agus Wikandono	"	[Signature]
4	Nurwan	"	[Signature]
5	ISMU KUSNUL	"	[Signature]
6	Andi Fajriyati	"	[Signature]
7	Bagus Firmansyah	"	[Signature]
8	Huchawati	"	[Signature]
9	Hudayyah	terpis	[Signature]
10	WIYANTO	"	[Signature]
11	MURDIN KUSKANA	"	[Signature]
12	Septian	"	[Signature]
13	FAZUL MUNA	"	[Signature]
14	Gahy Mulharani	"	[Signature]
15	Tahir	"	[Signature]
16	Nurhaniz	"	[Signature]
17	ARIS SETIADI	"	[Signature]
18	RYAN HIDAYATULLAH	"	[Signature]
19	Shahmad Herman	"	[Signature]
20	Hanna Mutia	"	[Signature]
21	Dani Armando	"	[Signature]
22	PENTRIKIBAR	kel. terpis	[Signature]
23	Hari Laksono	"	[Signature]
24	Eka Dharma	"	[Signature]
25	LAZUARDI	"	[Signature]
26	AGAR FITRON	"	[Signature]
27	Farid Ar-Razi	"	[Signature]
28	Qotobullohri	"	[Signature]
29	Asyraf Recepti	"	[Signature]
30	Amad fathoni	"	[Signature]
31	Widhan Ardians	"	[Signature]
32	Nural Guda	kel. terpis	[Signature]
33	To Fahmi	"	[Signature]
34	Dani Lisani	"	[Signature]
35	ARI SUKATI	"	[Signature]
36	HAPO	"	[Signature]
37	Wahman Ulhams	"	[Signature]
38	Ranuzki	"	[Signature]
39	Jabri Kusdi	"	[Signature]
40	Carlotus ummah	"	[Signature]

PEMBAK PEI AKSANA TERHMS KEGIATAN



[Signature]
SUMANTIRI, SH
NIP. 19621201 201001 2031

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Hari: Selasa
Tanggal: 27 Agustus 2013
Tempat: kel. Sukawana

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Iba Zahari	kel. Sukawana	1. Iba
2.	IDHAM HOLID	-	2. IDHAM
3.	IM FAKHATUL UYUN	-	3. IM FAKHATUL UYUN
4.	Airabau Dini	-	4. Airabau Dini
5.	Isuaroh	-	5. Isuaroh
6.	Murtawati	-	6. Murtawati
7.	KHidar	-	7. KHidar
8.	M. Fahrul Izzah	-	8. Fahrul Izzah
9.	Mur Pradeli	-	9. Mur Pradeli
10.	A. RAU	-	10. A. RAU
11.	SYAMSUL FAHRI	-	11. SYAMSUL FAHRI
12.	Maman Palanawan	-	12. Maman Palanawan
13.	Khalid Hidayat	-	13. Khalid Hidayat
14.	GAAM GUNARDI	-	14. GAAM GUNARDI
15.	NARZO	Sukawana	15. NARZO
16.	NANDI HARUNINGRHO	-	16. NANDI HARUNINGRHO
17.	POI NINA HAKIM	-	17. POI NINA HAKIM
18.	Hamboli	-	18. Hamboli
19.	ABDUL HOLLIK	-	19. ABDUL HOLLIK
20.	NUR HULIS	-	20. NUR HULIS
21.	Mohammad Aceh	-	21. Mohammad Aceh
22.	Julkifli	-	22. Julkifli
23.	Amant	-	23. Amant
24.	ARDI WILANGGON	-	24. ARDI WILANGGON
25.	NOVA PETIARAN	-	25. NOVA PETIARAN
26.	PONSKI W GUSTAF	Sukawana	26. PONSKI W GUSTAF
27.	HIDAYAT	-	27. HIDAYAT
28.	Ferisudin	-	28. Ferisudin
29.	Mustawati	-	29. Mustawati
30.	MILLAH AFIAN	-	30. MILLAH AFIAN
31.	OTO SIKHENDI	-	31. OTO SIKHENDI
32.	BAKRI BAROKAH	-	32. BAKRI BAROKAH
33.	JURAD	-	33. JURAD
34.	Yohya baedawi	kel. Sukawana	34. Yohya baedawi
35.	JAKOP OETAMANS	-	35. JAKOP OETAMANS
36.	Gito Inong	-	36. Gito Inong
37.	Rudi Sanjudin	-	37. Rudi Sanjudin
38.	Kyauki	-	38. Kyauki
39.	Julendar	-	39. Julendar
40.	Badi	-	40. Badi

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SUMARTONO SH
NIP. 270811012010012011

DAFTAR MAJLIS KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I

Tempat: 21 Agustus 2013
Lima - Kulung Apu Masjid

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HASURU	Kulung Apu	[Signature]
2.	Juwana		[Signature]
3.	[Signature]		[Signature]
4.	[Signature]		[Signature]
5.	[Signature]		[Signature]
6.	RESIMAN		[Signature]
7.	MISRA		[Signature]
8.	SEMMA		[Signature]
9.	[Signature]		[Signature]
10.	KUSLI		[Signature]
11.	SARIM		[Signature]
12.	BILIKAWA		[Signature]
13.	JALORI JAWA		[Signature]
14.	SIDI ORAH		[Signature]
15.	M. HALAT		[Signature]
16.	[Signature]		[Signature]
17.	Janni		[Signature]
18.	[Signature]		[Signature]
19.	MURSIH		[Signature]
20.	[Signature]	Kulung Apu	[Signature]
21.	ABUSMAH		[Signature]
22.	Lolita		[Signature]
23.	H. ARBI		[Signature]
24.	RANICOT.M		[Signature]
25.	UAT DUMBA		[Signature]
26.	ASTARA		[Signature]
27.	A. NAWARAH		[Signature]
28.	RIPUNY		[Signature]
29.	[Signature]		[Signature]
30.	ILY6		[Signature]
31.	[Signature]		[Signature]
32.	Heleni		[Signature]
33.	TB HUSNI		[Signature]
34.	LILIS		[Signature]
35.	[Signature]		[Signature]
36.	Selama		[Signature]
37.	Rizkiandi		[Signature]
38.	A. RIZKI		[Signature]
39.	[Signature]		[Signature]
40.	P. ALIY		[Signature]

PLIBAT PEKSAKANA TEKNIS KEGIATAN

SUMARTINI, SH


N.P.198211012010012011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I

No. : 000000
Tanggal : 22 Agustus 2013
Tempat : 06 / XIII Kelurahan Cipare

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	YATNA		
2	ARIFIN		
3	URIP		
4	UDI		
5	...		
6	UKAN		
7	ABIS		
8	...		
9	...		
10	Ayda		
11	Jawani		
12	...		
13	Agus		
14	...		
15	Haryun		
16	Kladi		
17	YUSUP		
18	Neng Leticia		
19	Hutmut		
20	CECEP		
21	yudha		
22	Maripat		
23	Faturrahman		
24	Ranang		
25	Ikhsan		
26	Tara		
27	Sandi		
28	Cicik		
29	yennysh		
30	Enma		
31	Fahzi		
32	SOLEH		
33	Dian		
34	Agustiani		
35	Ayu		
36	Yusi		
37	Ocha		
38	Miriam Nurhasanah		
39	Kusnanti		
40	Juli		

PEJABAT PELAKSANA TENNIS KEGIATAN


SUMARTINI, SH
NIP.1982101210012001

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESFES
DAFTAR PEMIRIHAN KOTA SERANG, I

Hari: Jum'at
 Tanggal: 23 Agustus 2013
 Tempat: Set PPK Kel. Ungar

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Gantoro	ungar	1.
2	Rusman Zaidi		2.
3	Harahap		3.
4	Lola		4.
5	Sabilun		5.
6	Uli		6.
7	IYAH		7.
8	Sulita Rika		8.
9	ADE DARLAN		9.
10	Estimono S.		10.
11	Martani Amriyad		11.
12	M. SAMLAH		12.
13	Tati		13.
14	HILMI		14.
15	ILHAM		15.
16	IDA		16.
17	EVI		17.
18	MAMAT		18.
19	WALIDI		19.
20	H. ROSIDI	ungar	20.
21	WAWAN		21.
22	H. Suharko		22.
23	KURDI		23.
24	JAKOVA		24.
25	BAHRI		25.
26	M. Bernandi		26.
27	Abd. Ruz		27.
28	Fachrud Rofi		28.
29	BU LILIS		29.
30	BU YURI		30.
31	Agus		31.
32	ADE S		32.
33	H. LIANDAN		33.
34	IRAK		34.
35	ELA		35.
36	Butartang		36.
37	IBUKANNA		37.
38	Satriah		38.
39	ASPURI		39.
40	ROC		40.

PEMIMPIN PELAYANAN TERIMIS KEGIATAN

SUMARTANI SA

NIP. 19721012 201001 2 011

DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES
DAIRAH PEMILIHAN KOTA SERANG I.

Hari : Senin
Tanggal : 26 Agustus 2013
Tempat : Majelis Taklim AL Falaah Kop. Dugur

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	AOE Junin	W. Kaser	
2.	MIMING		
3.	SABILLAH		
4.	PAIK PAWI		
5.	Pra Sufian		
6.	R. Masduki (Pondok)		
7.	DAVID		
8.	RUBONI		
9.	Rahmad		
10.	SALMAN		
11.	ROHILI		
12.	DANDI		
13.	RUSTI		
14.	P. ENIK		
15.	MUHTAB		
16.	MAMAN		
17.	Derino	W. Garuda	
18.	S. Muband		
19.	H. Moh. Djin		
20.	H. M. H.		
21.	Yona		
22.	DARNO		
23.	LEK		
24.	Wandi		
25.	Rahmy		
26.	Masduki		
27.	NOBACCA		
28.	W. H.		
29.	H. M. H.	Sekeloa	
30.	M. M. H.		
31.	M. M. H.		
32.	S. P. I. K.		
33.	A. H. A. D. I.		
34.	P. P. I. K.		
35.	AOE		
36.	S. M. H.		
37.	DURRAN		
38.	M. M. H.		
39.	M. S. H.		
40.	W. M. H.		

BIKIPERKORPRI

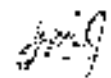
Sumarino, SH
N.P. 19821001 701001 2 001

DAFTAR HADIR KEGIATAN BESES
DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG

Hari: Selasa
 Tanggal: 27 Agustus 2013
 Tempat: Gedung Takwa Kel. Ungur

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. AMIR	Ungur	[Signature]
2	HAMSAR		[Signature]
3	UWA		[Signature]
4	MWAN Setiawan		[Signature]
5	Sarkim		[Signature]
6	Krombang		[Signature]
7	A. Rivaldi		[Signature]
8	Rodiah		[Signature]
9	Prerana		[Signature]
10	HADIJATI		[Signature]
11	FAISOL		[Signature]
12	KHA		[Signature]
13	Selvi		[Signature]
14	Reni		[Signature]
15	V. Kili		[Signature]
16	[Redacted]		[Signature]
17	[Redacted]		[Signature]
18	Ibah		[Signature]
19	IRAN	Kebanaran	[Signature]
20	Ulli		[Signature]
21	[Redacted]		[Signature]
22	SAPUDIN		[Signature]
23	MAUWI		[Signature]
24	DOB		[Signature]
25	MAHDI		[Signature]
26	INOY		[Signature]
27	AGUS		[Signature]
28	M. KESUMA		[Signature]
29	Ada Kurnia		[Signature]
30	UWA SAWUB		[Signature]
31	Holid		[Signature]
32	[Redacted]		[Signature]
33	MUDI		[Signature]
34	IMAT		[Signature]
35	MSARMIN		[Signature]
36	HASAN BASRI		[Signature]
37	H. MARKALI		[Signature]
38	GAMUDIN		[Signature]
39	ASIH		[Signature]
40	Samlawati S		[Signature]

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN




 SUMARINDI, SH
 NIP. 15821161 503001 2111

REKAM - REKAM DESA DI KOTA SERANG


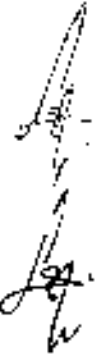


NO	KECAMATAN	DESA	NO	KECAMATAN	DESA		
1.	Serang	1	Serang	4	Wafantaka	1	Nyapah
		2	Kagungan			2	Wafantaka
		3	Lontar Baru			3	Pesufuhan
		4	Kota Baru			4	Pabuaran
		5	Cimuncang			5	Lebak Wangi
		6	Cipare			6	Pipitan
		7	Sumur Pecung			7	Pagar Agung
		8	Lopang			8	Pengampelan
		9	Kaligandu			9	Krara
		10	Unyur			10	Teritih
		11	Trondol			11	Kalodran
		12	Sukawana			12	Kepuren
2.	Cipocok Jaya	1	Cipocok	5	Kasemen	1	Kasemen
		2	Penancangan			2	Banten
		3	Gelam			3	Sawah Luhur
		4	Tembong			4	Klasah
		5	Dalung			5	Warung Jaud
		6	Banjir Agung			6	Marga'ayu
		7	Banjir Ash			7	Kasunyalan
		8	Karundang			8	Terumbu
3.	Curug	1	Curug	6	Taktakan	1	Taktakan
		2	Curug Manis			2	Drangong
		3	Cipete			3	Lialang
		4	Suka Jaya			4	Taman Baru
		5	Suka Laksana			5	Umbul Tengah
		6	Panca Laksana			6	Cilowong
		7	Kemanisan			7	Pancur
		8	Sukawana			8	Karanji
		9	Cilaku			9	Kalang Anyar
		10	Tinggar			10	Panggung Jati
						11	Sepang
						12	Sayar

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	9/10-2012	Buat Bae I	♂
	23/7-2012	Perbaiki Ltr ttg masalah, rumusan & tujuan	♂
	30/7-2013	Perjelas Masalah dgn cara penalaran	♂
	10/2-2014	Revisi Bab I	♂
	18/2-2014	Revisi Bab II	♂
	24/2-2014	Revisi Teori dan Bab III	♂

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
3/	3 - 2014	Kari Teori bentuk penjelasan keahliannya Metode, referensi update & Cari sumber lain selain Sugiono	
11/	13 - 2014	Baca Buku Gibson Jelaskan lebih rinci di Bab 2 & 3 terkait Deskripsi teor. dan Operationalisasi Variabel.	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
		Perbaiki UBM	
	9/11/16	1. Tambahkan capaian aspek penerapan asosiasi di resep & UBM. 2. Perbaiki bab 2-3	
	18/11/16	Peminatan kuis instrumen	
	20/11/16	Harus kerjakan dgn 108. Tgg' ptt.	
	20/11/16	Kuis Skatman	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

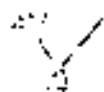
PANDUAN SKRIPSI

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	25/6 - 2014	Acc Seminar	
	22/7 - 14	Perbaiki literasi	
	15/8 - 2014	Acc kelengkapan kegiatan literasi tutup poskors	
	20/8 - 14	Acc. ke insya	
	30/9 - 14	Acc. layangan	
	20/11 - 2015	Acc. Selay ke pembimbing	
	25/1 - 2015	Perbaiki laporan Darin byk yg kurang	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

75 | 12/2015 Perbaiki perbaikannya

18/2/15 Acc selay

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	25/16-2014	Kec. Seminar.	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali



PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SERANG
NOMOR : 188.342 /) KEP-DPRD/X/2014**

T E N T A N G

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- Memperhatikan:
1. Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kota Serang dan Ketua Fraksi DPRD Kota Serang tanggal 26 September 2014;
 2. Surat dari Fraksi Golkar tanggal 26 September 2014 No. 172.4/06-FP. Golkar/2014, Perihal Usulan Nama-nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat dari DPC PDI-P tanggal 7 September 2014, Perihal Susunan Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang dari Fraksi PDI Perjuangan;
 4. Surat dari Fraksi Gerindra, tanggal 29 September 2014 No. 2/GERINDRA/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra Kota Serang;
 5. Surat dari Fraksi Demokrat, tanggal 22 September 2014 No. 172/06/F.PD/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan;
 6. Surat dari Fraksi PKB, tanggal 25 September 2014 No. 05/F-PKB/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi PKB DPRD Kota Serang;
 7. Surat dari Fraksi Nasdem, tanggal 23 September 2014 No. 04/F-NASDEM/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Perubahan Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Nasdem DPRD Kota Serang;
 8. Surat dari Fraksi Amanat Hanura tanggal 24 September 2014 No. 04/F-AH/IX/2014, Perihal Pengajuan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan;
 9. Surat dari Fraksi Madani, tanggal 24 September 2014 No. 02/F-MADANI/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Madani DPRD Kota Serang;
 10. Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tanggal 1 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

Menerapkan :

- KESATU** : Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa tugas-tugas alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

SUBADRI USULUDIN
N P. 19670802 198603 1 003

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Serang
Nomor : 188.342/1 -Kep. DPRD/X/2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

KOMISI I

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	H. MOH MISHARI, SE	GOLKAR
2	KEVIN HARINUSA, SH. MH	PDI-P
3	SURADI, SP	PDI-P
4	Ir. HALASHON SIMBOLON	GERINDRA
5	RAMLAN JUNAIDI, S.Sos	DEMOKRAT
6	Hj. SITI SUWARINI, S.AP	PKB
7	Drs. AMINUDIN	PKB
8	JUMHADI, Sag	NASDEM
9	H. IIS ISMAIL	AMANAT HANURA
10	AGUS EFENDI, S.Ip	MADANI
11	IYUS GUSMANA, S.Pd.r	MADANI

KOMISI II

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	ICHSAN, S.Pd	GOLKAR
2	Dra. Hj. WAHYU HIDAYATI	GOLKAR
3	M. ALI SOEROHMAN	PDI-P
4	LIA MAHDALIA A.Md	GERINDRA
5	JAJULI	DEMOKRAT
6	WAHYU PAPAT JUNI ROMADONIA, SE	PKB
7	RONI ALFANTO, SE	NASDEM
8	DR. H. FURTAHAN ALYUSUF, SE. S.Kom. MM	AMANAT HANURA
9	SUKARA, S.Kom	AMANAT HANURA
10	Tb. RIOWAN AHMAD, S.PI	MADANI
11	ASEP SULAEMAN	MADANI

KOMISI III

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	Hj. MIRA MERDIANTY	GOLKAR
2	Acb. AMIS FUAD, SE Bin KH. DJAWAHIR	GOLKAR
3	SAMLAWI SAID	PDI-P
4	H. EKA SURYANA	GERINDRA
5	ABDUL MUHIT, MA	DEMOKRAT
6	H. ROHANI, SE	PKB
7	Hj. YETI KURNAETI, SE	NASDEM
8	UF FARIUDIN, SE	AMANAT HANURA
9	H UHEN ZUHAENI, HZ, SE	MADANI

KOMISI IV

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	H. NAMIN, SH	GOLKAR
2	UJANG SYAFRUDIRMAN, SE	PDI-P
3	MOCHAMAD RUSAN	GERINDRA
4	FIRDAUS GHOZALI, SE	DEMOKRAT
5	H. TAJUDIN	PKB
7	MUJI ROHMAN, SH	PKB
8	PRANA RISMAYANDI	NASDEM
9	DEDE RAFIUDIN	AMANAT HANURA
10	Dra DEVIANA IDRIS	AMANAT HANURA
11	MARYAMAN, S.Pd.	MADANI

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG

MAKANG S. S. S. S.
NIP. 19670802 198603 1 003



PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SERANG
NOMOR : 188.342 / Z. KEP-DPRD/X/2014**

T E N T A N G

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

- Memimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- Memperhatikan:
1. Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kota Serang dan Ketua Fraksi DPRD Kota Serang tanggal 26 September 2014;
 2. Surat dari Fraksi Golkar tanggal 26 September 2014 No. 172.4/06-PP. Golkar/2014, Perihal Usulan Nama-nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat dari DPC PDI.P tanggal 7 September 2014, Perihal Susunan Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang dari Fraksi PDI Perjuangan;
 4. Surat dari Fraksi Gerindra, tanggal 29 September 2014 No. 2/GERINDRA/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra Kota Serang;
 5. Surat dari Fraksi Demokrat, tanggal 22 September 2014 No. 172/06/F.PD/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan;
 6. Surat dari Fraksi PKB, tanggal 25 September 2014 No. 03/F-PKB/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi PKB DPRD Kota Serang;
 7. Surat dari Fraksi Nasdem, tanggal 23 September 2014 No. 04/F-NASDEM/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Perubahan Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Nasdem DPRD Kota Serang;
 8. Surat dari Fraksi Amanat Hanura tanggal 24 September 2014 No. 04/F-AH/IX/2014, Perihal Pengajuan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan;
 9. Surat dari Fraksi Madani tanggal 24 September 2014 No. 02/F-MADANI/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Madani DPRD Kota Serang;
 10. Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tanggal 1 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa tugas-tugas alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

HANAN SAE UDIN
NI 9670802 198603 1 003

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Serang
Nomor : 188.342/2 -Kep. DPRD/X/2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**


NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	ICHSAN, S.Pd	GOLKAR
2	H. NAMIN, SH	GOLKAR
3	H. MOH MISHARI, SE	GOLKAR
4	SURADI, SP	PDI-P
5	M. ALI SOEROHMAN	PDI-P
6	H. EKA SURYANA	GERINDRA
7	MOCHAMAD RUSAN	GERINDRA
8	FIRDAUS GHOZALI	DEMOKRAT
9	RAMLAN JUNAIDI, S.Sos	DEMOKRAT
10	WAHYU PAPAT JUNI ROMADONIA, SE	PKB
11	Drs. AMINUDIN	PKB
12	RONI ALFANTO, SE	NASDEM
13	PRANA RISMAYANDI	NASDEM
14	DR. H. FURTASAN ALI YUSUF, SE,S.Kom.MM	AMANAT HANURA
15	W. PARIUDIN, SE	AMANAT HANURA
16	SUKARA, S.Kom	AMANAT HANURA
17	AGUS EFENDI, S.IP	MADANI
18	IYUS GUSMANA, S.Pd	MADANI

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG


SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**


ANANG SAEFUDIN
NIP. 19670802 198603 1 003



PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SERANG
NOMOR : 188.342 / 3 KEP-DPRD/X/2014**

T E N T A N G

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- Memperhatikan:
1. Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kota Serang dan Ketua Fraksi DPRD Kota Serang tanggal 26 September 2014;
 2. Surat dari Fraksi Golkar tanggal 26 September 2014 No. 172.4/06-FP. Golkar/2014, Perihal Usulan Nama-nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat dari Fraksi PDI.P tanggal 7 September 2014, Perihal Susunan Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang dari Fraksi PDI Perjuangan;
 4. Surat dari Fraksi Gerindra, tanggal 29 September 2014 No. 2/GERINDRA/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra Kota Serang;
 5. Surat dari Fraksi Demokrat, tanggal 22 September 2014 No. 172/06/F.PD/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan;
 6. Surat dari Fraksi PKB, tanggal 25 September 2014 No. 05/F-PKB/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi PKB DPRD Kota Serang;
 7. Surat dari Fraksi Nasdem, tanggal 23 September 2014 No. 04/F-NASDEM/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Perubahan Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Nasdem DPRD Kota Serang;
 8. Surat dari Fraksi Amanat Hanura tanggal 24 September 2014 No. 04/F-AH/IX/2014, Perihal Pengajuan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan;
 9. Surat dari Fraksi Madani tanggal 24 September 2014 No. 02/F-MADANI/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Madani DPRD Kota Serang;
 10. Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tanggal 1 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa tugas-tugas alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

RAMA KURNIAWATI
NIP. 19670802 198603 1 003

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Serang
Nomor : 188.342/3 -Kep. DPRD/X/2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	ICHSAN, S.Pd	GOLKAR
2	H. NAMIN, SH	GOLKAR
3	H. MOH MISHARI, SE	GOLKAR
4	KEVIN HARINUSA, SH MH	PDI-P
5	SAMLAWI SAID	PDI-P
6	Ir. HALASHON SIMBOLON	GERINDRA
7	LIA MAHDALIA, A Md	GERINDRA
8	JAJULI	DEMOKRAT
9	ABDUL MUHIT, MA	DEMOKRAT
10	WAHYU PAPAT JUNI ROMADONIA, SE	PKB
11	H. ROHANI, SE	PKB
12	Hj. SITI SUWARINI, S.AP	PKB
13	JUMHADI, S.Ag	NASDEM
14	Hj. TETI KURNAETI, SE	NASDEM
15	DEDE RAFIUDIN	AMANAT HANURA
16	Dra. DEVIANA IDRIS	AMANAT HANURA
17	MARYAMAN, S.P.S	MADANI
18	ASEP SULAEMAN	MADANI

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

NIP. 19670802 198603 1 003



PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SERANG
NOMOR : 188.342 / 4 KEP-DPRD/X/2014**

T E N T A N G

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kota Serang dan Ketua Fraksi DPRD Kota Serang tanggal 26 September 2014;

2. Surat dari Fraksi Golkar tanggal 26 September 2014 No. 172.4/06-FP. Golkar/2014, Perihal Usulan Nama-nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
3. Surat dari DPC PDI.P tanggal 7 September 2014, Perihal Susunan Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang dari Fraksi PDI Perjuangan;
4. Surat dari Fraksi Gerindra, tanggal 29 September 2014 No. 2/GERINDRA/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra Kota Serang;
5. Surat dari Fraksi Demokrat, tanggal 22 September 2014 No. 172/06/F.PD/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan;
6. Surat dari Fraksi PKB, tanggal 25 September 2014 No. 05/F-PKB/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi PKB DPRD Kota Serang;
7. Surat dari Fraksi Nasdem, tanggal 23 September 2014 No. 04/F-NASDEM/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Perubahan Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Nasdem DPRD Kota Serang;
8. Surat dari Fraksi Amanat Hanura tanggal 24 September 2014 No. 04/F-AH/IX/2014, Perihal Pengajuan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan;
9. Surat dari Fraksi Madani tanggal 24 September 2014 No. 02/F-MADANI/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Madani DPRD Kota Serang;
10. Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tanggal 1 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

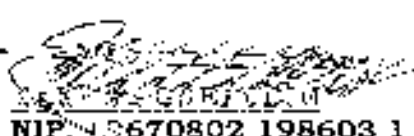
- KESATU** : Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa tugas-tugas alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI ESULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**


NIP. 4670802 198603 1 003

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Serang
Nomor : 188.342/4 -Kep. DPRD/X/2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	Ach ANIS FUAD, SE Bn KH. DJAWAHIR	GOLKAR
2	Hj MIRA MERDIANTY	GOLKAR
3	KEVIN HARINUSA, SH. MH	PDI-P
4	UJANG SYAFRUDIRMAN, SE	PDI-P
5	H. EKA SURYANA	GERINDRA
6	ABDUL MUHIT, MA	DEMOKRAT
7	MUJI ROHMAN, SH	PKB
8	Hj. TETI KURNAETI, SE	NASDEM
9	H. HIS ISMAIL	AMANAT HANURA
10	H. UHEN ZUHAENI, HZ, SE	MADANI
11	Tb. RIDWAN AHMAD, S.Pt	MADANI

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

PAWATI SAEFUDIN
NIS. 25570802 198603 1 003



PENGUMUMAN

Nomor : 03 / P/Pimp.DPRD/IX/2014

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019

- Dasar :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 511, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)

MENGUMUMKAN :**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI - FRAKSI DPRD KOTA SERANG
MASA JABATAN 2014 - 2019****I. FRAKSI GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
1.	ICHSAN, SPD	KETUA
2.	H. NAMIN, SH	WAKIL KETUA
3.	H. MISHARI, SE	SEKRETARIS
4.	H. SUBADRI USULUDIN, S.P	ANGGOTA
5.	Dtr. Hj. WAHYUHIDAYATI	ANGGOTA
6.	Hj. MIRA MERDIANTY	ANGGOTA
7.	ACH. ANIS FUAD, SE, BIR. KH. DJAWAHIR	ANGGOTA

II. FRAKSI DEMOKRAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	PIRDAUS GHOJALI, SE	KETUA
2.	RAMLAN JUNAIDI, S.SOS	WAKIL KETUA
3.	JAJULI	SEKRETARIS
4.	ABDUL MUHIT, MA	ANGGOTA
5.	H. AMANUDIN TOHA, SE	ANGGOTA

III. FRAKSI PDI

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEVIN HARINUSA, SH.MH	KETUA
2.	SAMLAWI SAID	WAKIL KETUA
3.	M. ALI SOEROHMAN	SEKRETARIS
4.	BAMBANG JANOKO, SE	ANGGOTA
5.	UJANG SYAFRUDIRMAN, SE	ANGGOTA
6.	SURADI, SP	ANGGOTA

IV. FRAKSI NASDEM

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. TETI KURNAETI, SE	KETUA
2.	RONI ALFANTO, SE	WAKIL KETUA
3.	JUMHADI, Sag	SEKRETARIS
4.	PRANA RISMAYANDI	ANGGOTA

V. FRAKSI GERINDRA

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. EKA SURYANA	KETUA
2.	LIA MAHDALIA, Amd	WAKIL KETUA
3.	Ir. HALASHON SIMBOLON	SEKRETARIS
4.	BUDI RUSTANDI	ANGGOTA
5.	MOCHAMAD RUS'AN	ANGGOTA

VI. FRAKSI KEBANGKRITAN BANGSA

NO	NAMA	JABATAN
1.	WAHYU PAPAT JUNI ROMADONIA, SE <i>P.P.B</i>	KETUA
2.	Hj. SITI SWARINI, S.AP <i>P.P.B</i>	WAKIL KETUA
3.	Drs. AMINUDIN <i>P.P.B</i>	SEKRETARIS
4.	H. ROHANI, SE <i>P.P.B</i>	ANGGOTA
5.	H.TAJUDIN <i>P.P.B</i>	ANGGOTA
6.	MUJI ROHMAN, SH <i>P.P.B</i>	ANGGOTA

VII. FRAKSI MADANI

NO	NAMA	JABATAN
1.	H.UHEN ZUHAENI, HZ.SE <i>P.P.P</i>	KETUA
2.	MARYAMAN, S.Pd <i>P.P.P</i>	WAKIL KETUA
3.	TB.RIDWAN AKHMAD, S.Pd <i>P.P.P</i>	SEKRETARIS
4.	AGUS EFENDI, S.IP <i>P.P.P</i>	ANGGOTA
5.	ASEP SULAIMAN, S.Pd <i>P.P.P</i>	ANGGOTA
6.	IYUS GUSMANA, S.Pd.I <i>P.P.P</i>	ANGGOTA

VIII. FRAKSI AMANAT MANURA

NO	NAMA	JABATAN
1.	DR.H.FURTASAN ALI YUSUF, SE.S.KOM.MM <i>P.P.P</i>	KETUA
2.	DEDE RAFIUDIN <i>P.P.P</i>	WAKIL KETUA
3.	SUKARA, S. KOM <i>P.P.P</i>	SEKRETARIS
4.	HIF FARIUDIN, SE <i>P.P.P</i>	ANGGOTA
5.	H.HS ISMAIL <i>P.P.P</i>	ANGGOTA
6.	DRA.DEVIANA IDRIS <i>P.P.P</i>	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
Ketua Sementara

[Signature]
ACH. ANIS FUAD, SE. Bin. KH. DJAWAHIR



PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SERANG
NOMOR : 188.342 / § KEP-DPRD/X/2014**

T E N T A N G

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kota Serang dan Ketua Fraksi DPRD Kota Serang tanggal 26 September 2014;

2. Surat dari Fraksi Golkar tanggal 26 September 2014 No. 172.4/06-FP Golkar/2014, Perihal Usulan Nama-nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
3. Surat dari DPC PDI-P tanggal 7 September 2014, Perihal Susunan Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang dari Fraksi PDI Perjuangan;
4. Surat dari Fraksi Gerindra, tanggal 29 September 2014 No. 2/GERINDRA/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra Kota Serang;
5. Surat dari Fraksi Demokrat, tanggal 22 September 2014 No. 172/06/F.PD/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan;
6. Surat dari Fraksi PKB, tanggal 25 September 2014 No. 05/F-PKB/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi PKB DPRD Kota Serang;
7. Surat dari Fraksi Nasdem, tanggal 23 September 2014 No. 04/F-NASDEM/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Perubahan Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Nasdem DPRD Kota Serang;
8. Surat dari Fraksi Amanat Hanura tanggal 24 September 2014 No. 04/F-AH/IX/2014, Perihal Pengajuan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan;
9. Surat dari Fraksi Madani tanggal 24 September 2014 No. 02/F-MADANI/DPRD/KOTA-SRG/IX/2014, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Fraksi Madani DPRD Kota Serang;
10. Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang tanggal 1 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa tugas-tugas alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI USULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

RENA
NIP. 670802 198603 1 003

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Serang
Nomor : 188.342/5 -Kep. DPRD/X/2014
Tanggal : 1 Oktober 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD KOTA SERANG MASA JABATAN 2014 - 2019**

NO	NAMA ANGGOTA	UNSUR FRAKSI
1	SAMLAWI SAID	PDI-P
2	JAJULI	DEMOKRAT
3	H. TAJUDIN	PKB
4	IIF FARIUDIN, SE	AMANAT HANURA
5	ASEP SULAEMAN	MADANI

Ditandatangani di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA DPRD KOTA SERANG

SUBADRI SULUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA SERANG**

ANG S...
NIP. 45/0802 198603 1 003

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013

NO	PERATURAN DAERAH TAHUN 2013	TENTANG	PENETAPAN PENGESAHAN
1.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 1 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 62	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.	Pengesahan tanggal 12 April 2013 Pengundangan Tanggal 15 April 2013
2.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 2	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Serang	Pengesahan tanggal 12 April 2013 Pengundangan Tanggal 15 April 2013
3.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 63	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengesahan tanggal 12 April 2013 Pengundangan Tanggal 15 April 2013
4.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 4 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 64	Pelestarian Kebudayaan Daerah	Pengesahan tanggal 12 April 2013 Pengundangan Tanggal 15 April 2013
5.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 4 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 65	Perubahan Status Lina Bulas Desa Menjadi Kelurahan di Empat Kecamatan	Pengesahan tanggal 10 Juni 2013 Pengundangan Tanggal 14 Juni 2013
6.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 6 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 66	Penyelenggaraan Kelengkapan Kerjaan	Pengesahan tanggal 10 Juni 2013 Pengundangan Tanggal 14 Juni 2013
7.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 7 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 67	Perlindungan Anak dan Perempuan	Pengesahan tanggal 10 Juni 2013 Pengundangan Tanggal 14 Juni 2013
8.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 8 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 68	Lomba Komunitas	Pengesahan tanggal 10 Juni 2013 Pengundangan Tanggal 14 Juni 2013

9.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 69	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pengesahan tanggal 14 Juni 2013 Pengundangan Tanggal 17 Juni 2013
10.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 10	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012	Pengesahan tanggal 21 Agustus 2013 Pengundangan Tanggal 22 Agustus 2013
11.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 11	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013	Pengesahan tanggal 2 Oktober 2013 Pengundangan tanggal 3 Oktober 2013
12.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014	Pengesahan tanggal 19 Desember 2013 Pengundangan Tanggal 20 Desember 2013
13.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 70	Perijinan Jasa Konstruksi	Pengesahan tanggal 20 Desember 2013 Pengundangan Tanggal 24 Desember 2013
14.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 71	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah	Pengesahan tanggal 24 Desember 2013 Pengundangan Tanggal 27 Desember 2013
15.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 72	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengesahan tanggal 24 Desember 2013 Pengundangan Tanggal 30 Desember 2013
16.	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 16	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Serang	Pengesahan tanggal 27 Desember 2013 Pengundangan Tanggal 30 Desember 2013/11 Pebruari 2014

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Septian Gestiardi lahir di Lampung, 29 September 1991 dari pasangan Bapak Nardi (alm) dan Ibu Sawitem. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Pada tahun 1997 penulis masuk SD Negeri Taman Baru 2 Serang dan lulus tahun 2003. Tahun 2003 penulis melanjutkan ke SMPN 4 Kota Serang dan lulus tahun 2006 setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 5 Kota Serang dan lulus tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 penulis berkesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi

program strata satu (S-1) di Untirta Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Eksekutif Muda Untirta periode 2009 s.d. 2010. Pada tahun 2011 s.d. 2012 sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Tahun 2013 s.d. 2014 sebagai Menkominfo BEM Untirta. Pada tahun 2013 s.d. sekarang, penulis meniti karier sebagai tenaga honorer Staff Administrasi di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten.